



kfr

kajian fiskal
regional

Provinsi Sumatera Selatan

Volume 7, Nomor 4, Desember 2024



Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Selatan

Kajian Fiskal Regional
Provinsi Sumatera Selatan

Volume 7 Nomor 4, Desember 2024



Kajian Fiskal Regional diterbitkan oleh Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Sumsel, Kementerian Keuangan, dengan
periode publikasi triwulanan

Diterbitkan oleh:

Kanwil DJPb Provinsi Sumsel

Pengarah:

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumsel

Penanggung Jawab:

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Reviewer:

Dr. Sukanto, S.E., M.Si.

Yessi Marseilli

Kontributor:

Sasaran Pembangunan dan Tantangan Daerah: Riedho Hizwar

Analisis Ekonomi Regional: Riedho Hizwar

Analisis Fiskal Regional: Yudho Bintoro Sandi, M. Telly Anggra, Tomi Afriyanto
Suntari, A'rsyil A'zim, Hanip Tarmizi

Pengembangan Ekonomi Daerah: Yudho Bintoro Sandi

Analisis Tematik: Yessi Marseilli

Desain dan Layout: Yudho Bintoro Sandi dan Nur Rahma Kartika

Alamat Redaksi: Gedung Keuangan Negara Palembang Lantai II
Jl. Kapten A. Rivai No. 2-4 Palembang

Situs Web: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumsel/id/>

Download KFR



Feedback



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan dapat menyelesaikan penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

KFR berperan untuk memberikan gambaran perkembangan implementasi kebijakan fiskal Pemerintah dan dampaknya terhadap perekonomian regional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024. Penyusunan KFR ini diharapkan dapat menjadi alat analisis, evaluasi dan menjadi media informasi yang bernilai strategis baik bagi Kementerian Keuangan maupun bagi para mitra kerja Kementerian Keuangan di Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan kerendahan hati, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi menyediakan data dan informasi dan telah berpartisipasi dalam penyelesaian KFR Provinsi Sumatera Selatan ini. Kami berharap koordinasi dan kerjasama dalam penyusunan KFR Provinsi Sumatera Selatan dapat terus berlanjut secara berkala di masa mendatang, guna mendukung kesinambungan implementasi kebijakan fiskal di Sumatera Selatan. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif dari semua pihak, selalu kami harapkan, agar dapat menjadi perbaikan, penyempurnaan dan peningkatan kualitas dari hasil kajian yang dilakukan.

Harapan kami, semoga KFR Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para pembuat dan pelaksana kebijakan di Sumatera Selatan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam upaya memberikan kontribusi pemikiran demi terwujudnya pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 27 Februari 2025

**Kepala Kantor Wilayah DJPb
Provinsi Sumatera Selatan**



Ditandatangani secara elektronik
Rahmadi Murwanto



DAFTAR ISI

Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Selatan
Volume 7 Nomor 4, Desember 2024

TIM PENYUSUN ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

RINGKASAN EKSEKUTIF..... v

DASHBOARD..... vi

BAB I SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH 1

BAB II ANALISIS EKONOMI REGIONAL 5

 A. PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKROEKONOMI 6

 B. PERKEMBANGAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN 8

BAB III ANALISIS FISKAL REGIONAL 10

 A. PELAKSANAAN APBN DI PROVINSI SUMSEL..... 11

 B. PELAKSANAAN APBD DI PROVINSI SUMSEL..... 27

 C. PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN..... 34

BAB IV PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH..... 37

 A. HARMONISASI BELANJA K/L DAN DAK FISIK DI TINGKAT WILAYAH 38

BAB V ANALISIS TEMATIK 44

 A. REVIU ATAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL DI SUMSEL..... 45

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI..... 54

RINGKASAN EKSEKUTIF

Implementasi kebijakan pembangunan di Sumatera Selatan yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional perlu diukur efektivitas dan keselarasannya dengan kebijakan nasional. Untuk itulah, Kajian Fiskal Regional Tahun 2024 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan ini disusun sebagai output analisis atas efektivitas kebijakan fiskal terhadap pencapaian tujuan makroekonomi pada konteks regional dengan harapan dapat menjadi referensi yang kredibel untuk digunakan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Sasaran Pembangunan, Kondisi Perekonomian dan Kesejahteraan Regional

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026 dan disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah 2024, telah ditetapkan target/sasaran pembangunan Sumatera Selatan. Beberapa indikator kinerja pembangunan telah mencapai target yang ditetapkan, seperti tingkat kemiskinan yang turun menjadi 10,51%, lebih baik dari target 10,95%. Selanjutnya tingkat pengangguran yang turun menjadi 3,86%, lebih baik dari target yang ditetapkan 4,14%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat menjadi 73,84, melampaui target yg ditetapkan pada angka 71,63, serta Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 128,53 dari target sebesar 109,11. Inflasi berada di angka 1,2%, lebih rendah dari rentang target 2,5%±1%. Indikator lainnya masih membutuhkan peningkatan kinerja yaitu pertumbuhan ekonomi yang berada di angka 5,03%, lebih rendah dari target 5,74%, dan tingkat ketimpangan (rasio gini) yang berada di angka 0,331, lebih tinggi dari target 0,324.

Pelaksanaan APBN dan APBD

Dari sisi fiskal APBN, Pendapatan Negara selama tahun 2024 mencapai 106,47% dari target atau sebesar Rp23,90 triliun, tumbuh 7,42% (yoy), sementara realisasi Belanja Negara mencapai 96,79% dari pagu atau senilai Rp52,88 triliun, tumbuh 4,53% (yoy). Yang masih menjadi tantangan pada pendapatan negara di Sumsel antara lain adalah penerimaan pajak yang masih bertumpu pada sektor tertentu yang dapat menyebabkan kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi maupun harga komoditas. Sementara pada sisi belanja, efisiensi dan kualitas belanja masih perlu jadi perhatian utama. Terlebih lagi dengan kebijakan efisiensi anggaran sejak akhir tahun, perlu dipastikan keberlangsungan dan kualitas layanan seluruh satuan kerja kepada masyarakat.

Kinerja APBD juga mencatatkan kinerja positif pada tahun 2024 yang utamanya dipengaruhi oleh

pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dan pembangunan infrastruktur di Sumsel. Pendapatan daerah tercapai Rp49,47 triliun, tumbuh 21,68% (yoy) dan belanja daerah yang mencapai Rp48,47 triliun, tumbuh 16,38% (yoy). Tantangan pada APBD Sumsel adalah pada sisi pendapatan daerah yang masih sangat bergantung pada pendapatan dari dana transfer, kondisi ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang masih sangat rendah. Sedangkan pada sisi belanja daerah, proporsi belanja operasional masih sangat tinggi, sementara pada belanja modal yang diharapkan dapat memberikan impact pada perekonomian daerah masih sangat rendah proporsinya.

Pengembangan Ekonomi Daerah

Pada pengembangan ekonomi daerah, terutama melalui harmonisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di tingkat wilayah, masih dijumpai beberapa tantangan di antaranya adalah terdapat blokir anggaran pada satker K/L dan regulasi DAK Fisik yang terlambat sehingga kegiatan tidak dapat diakselerasi sejak awal tahun. Sinergi pusat dan daerah harus terus diupayakan agar target/output kegiatan dapat segera dicapai dan segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Analisis Tematik Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional di Daerah

Analisis tematik pada KFR 2024 ini mengangkat topik implementasi kebijakan ketahanan pangan nasional di daerah. Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah saat ini yang berkomitmen menuju swasembada pangan dan energi. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) digunakan untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah. IKP Provinsi Sumatera Selatan mendapat skor 74,07 pada tahun 2024, berada pada urutan ke 21 dari 34 provinsi di seluruh Indonesia, termasuk dalam kategori wilayah tahan pangan, namun dari 13 kabupaten dan 4 kota dalam wilayah Prov. Sumsel, terdapat satu kabupaten yang masuk dalam kategori agak rentan dan satu kota yang selalu berada dalam peringkat bawah dari 98 kota di Indonesia.

Kesimpulan dan Rekomendasi

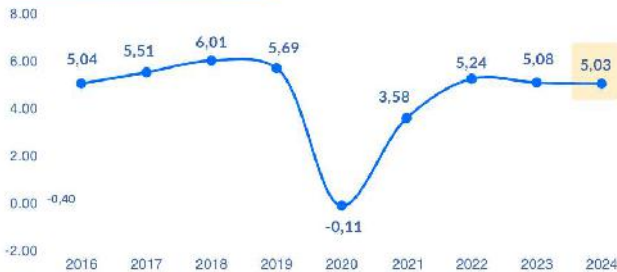
Secara keseluruhan kinerja ekonomi dan fiskal Sumsel selama tahun 2024 mencatatkan pertumbuhan yang positif dan diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk tahun 2025. Berbagai tantangan/kendala selama tahun 2024 diharapkan dapat menjadi *lesson learned* sehingga dapat dilakukan perbaikan yang berkelanjutan. Sinergi lintas sektor maupun antar pemangku kepentingan, baik dari tingkat pusat maupun daerah, sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi.



Dashboard Ekonomi Regional

Indikator Makro Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi (c - to - c)



Perekonomian Sumsel menunjukkan tren pertumbuhan yang positif sepanjang tahun 2024. Ekonomi Sumsel pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03% (ctc), lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,08% (ctc). Pertumbuhan ekonomi Sumsel tersebut sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan merupakan yang tertinggi di Pulau Sumatera bersama Sumatera Utara.

Sumber: BPS Provinsi Sumsel

Laju Inflasi

Tahun 2024 (%)



Laju inflasi Sumsel pada tahun 2024 terkendali. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju inflasi Sumsel di tahun 2024 adalah penyesuaian harga BBM, kenaikan harga emas, kenaikan harga minyak goreng, kenaikan tarif angkutan udara, cuaca ekstrem, dan upaya konsisten pengendalian inflasi oleh pemerintah daerah.

Indikator Kesejahteraan

Selain pertumbuhan ekonomi yang tetap positif, Perkembangan indikator kesejahteraan Sumsel hingga triwulan IV 2024 menunjukkan perkembangan yang terus membaik

Kemiskinan

(Per September 2024)

10,51%

Gini Ratio

s.d. September 2024

0,331

Tingkat Pengangguran Terbuka

s.d. Agustus 2024

3,86%

Tingkat Pengangguran Terbuka

per Desember 2024

128,53

Sumber: BPS Provinsi Sumsel

Indikator Ketahanan Pangan

Selain pertumbuhan ekonomi yang tetap positif, Perkembangan indikator kesejahteraan Sumsel hingga triwulan IV 2024 menunjukkan perkembangan yang terus membaik

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
OKU	73,74	66,54	74,23	74,93	71,1	74,36	73,01
OKI	75,49	76,59	76,12	76,81	75,89	79,04	79,54
MUARA ENIM	72,12	72,84	72,7	71,54	71,29	73,22	75,62
LAHAT	70,82	68,94	70,55	68,85	72	72,87	75,19
MUSI RAWAS	76,58	77,34	77,53	75,33	77,38	79,56	77,66
MUSI BANYUASIN	75,13	75,94	75,03	77,27	77,89	79,09	79,48
BANYUASIN	77,25	77,71	77,9	78,3	77,97	78,91	79,17
OKU TIMUR	78,49	80,49	81,22	80,5	81,01	84,52	85,17
OKU SELATAN	73,87	71,88	73,86	74,3	74,46	76,15	75,37
OGAN ILIR	73,96	74,88	73,83	71,74	73,28	76,32	77,55
EMPAT LAWANG	71,18	66,75	65,75	66,07	65,25	69,27	67,42
PALI	67,97	71,72	70,18	71,31	72,46	73,71	78,79
MURATARA	62,03	61,49	49,7	60,33	59,23	60,31	59,58
PALEMBANG	73,26	74,36	72,57	73,83	74,71	83,29	83,62
PAGARALAM	36,41	41,64	41,62	47,09	46,47	59,17	57,79
LUBUK LINGGAU	48,9	51,06	53,37	53,91	53,71	66,26	66,1
PRABUMULIH	51,88	63,21	61,23	60,17	59,71	68,83	68,11

(*Keterangan Cut off point Skor Komposit)

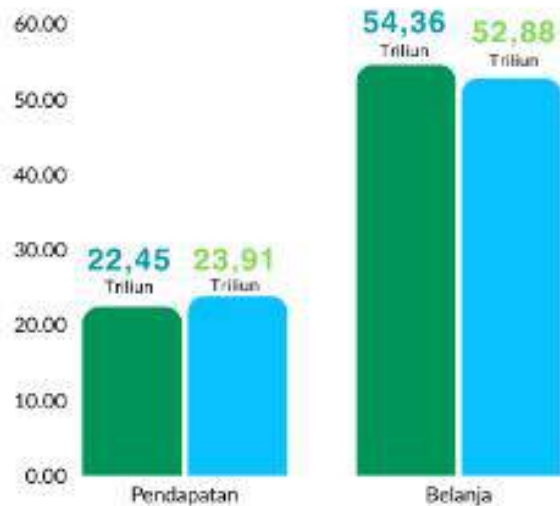
Kelompok IKP	Kabupaten	Kota	Kelompok IKP	Kabupaten	Kota
1	<= 41,52	<= 28,84	4	> 59,58 - 67,75	> 51,29 - 61,1
2	> 41,52 - 51,42	> 28,84 - 41,44	5	> 67,75 - 75,68	> 61,13 - 70,64
3	> 51,42 - 59,58	> 41,44 - 51,29	6	> 75,68	> 70,64

Kinerja Fiskal Regional

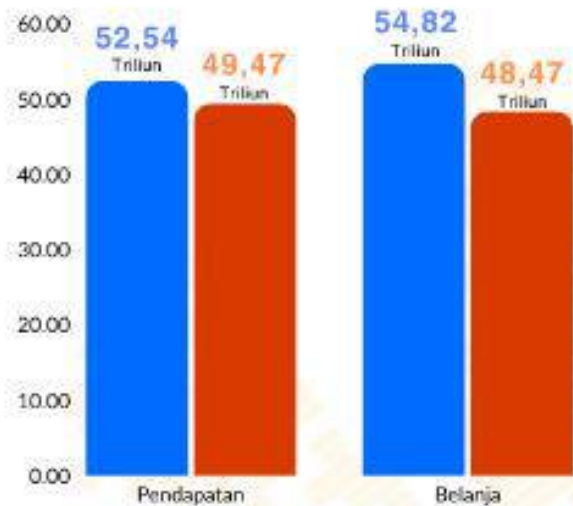
Tahun 2024



Pagu
Realisasi

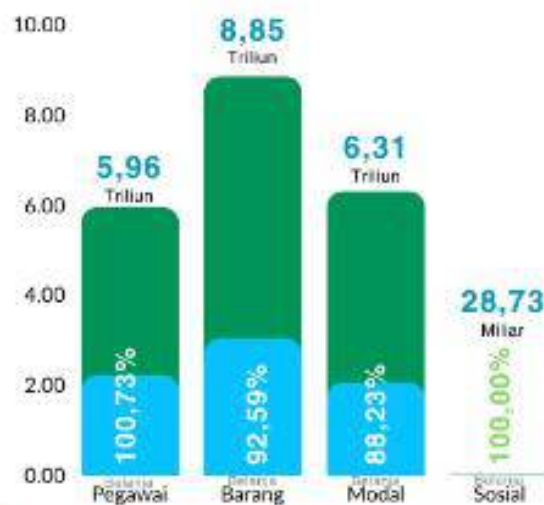


Pagu
Realisasi



APBN

Sumber: Ovwine Monitoring SPAN



APBD

Sumber: Dit. APK, DJPb





BAB I

Sasaran Pembangunan dan Tantangan Daerah



1.1 Pendahuluan

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi. Dalam konteks Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), pembangunan difokuskan pada upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi peran fiskal daerah. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024, arah kebijakan pembangunan di tingkat daerah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Sumsel 2024-2026 yang berfungsi sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumsel 2024.

Sumsel memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama dengan potensi sumber daya alam yang melimpah serta kontribusi yang signifikan dalam sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan. Sebagai salah satu provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dalam beberapa tahun terakhir, Sumsel menghadapi tantangan dalam menjaga kesinambungan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang berbasis pada penguatan fiskal, efisiensi pengelolaan anggaran, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menghadapi dinamika ekonomi global maupun tantangan internal.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diimplementasikan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. Keberlanjutan kebijakan pembangunan juga perlu didukung oleh regulasi yang adaptif serta strategi yang berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, dokumen Kajian Fiskal Regional (KFR) 2024 memainkan peran penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, sekaligus memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk perbaikan ke depan.

Sebagai bagian dari kajian fiskal, analisis terhadap implementasi kebijakan pembangunan diperlukan guna mengukur efektivitas dan keselarasan antara kebijakan nasional dan daerah. Kajian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai referensi strategis dalam menyusun kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan daerah yang lebih akurat. Bab ini menguraikan sasaran pembangunan daerah, tingkat keselarasan dengan RPJMD dan RPD, serta capaian pembangunan yang telah terealisasi. Selain itu, tantangan utama dalam implementasi pembangunan juga dikaji untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah.

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPD Provinsi Sumsel periode 2024-2026. Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat 5 (lima) isu strategis daerah Sumsel, yaitu

1. Penguatan Ekonomi Didukung Infrastruktur Yang Handal
2. Akselerasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
3. SDM Sehat, Mandiri, dan Berdaya Saing
4. Pembangunan Berkelanjutan dan Efisiensi Sumber Daya

5. Transformasi Pelayanan Publik pada Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Arah kebijakan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumsel tahun 2024 kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, dengan mengusung 4 (empat) prioritas pembangunan daerah dan 8 (delapan) isu strategis, yaitu:

Tabel 1.1. Indikator Kinerja Tahun 2023

Prioritas Daerah	Isu Strategis Daerah
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Peningkatan Kualitas UMKM Berbasis Digital
	Peningkatan Perekonomian dan Nilai Tambah Sektor Unggulan
	Percepatan Realisasi Proyek Strategis di Sumsel
	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kerakyatan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Pengelolaan Lingkungan, Mitigasi dan Penanganan Bencana
Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Pelaksanaan Pemilu/Pilkada Serentak Tahun 2024
	Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ketentruman Ketertiban Umum

Sumber: RPD dan RKPD Provinsi Sumsel 2024 (diolah)

Untuk memberikan ukuran kinerja dalam melihat capaian dari prioritas pembangunan dan respon atas isu strategis, Pemerintah Daerah Provinsi Sumsel menetapkan indikator kinerja tahun 2024, yang diantaranya:

Tabel 1.1. Indikator Kinerja Prov. Sumsel Tahun 2024

Sasaran	Target
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,74
Inflasi (%)	2,5% ± 1%
Rasio Gini (Rasio)	0,324
Pendapatan Per Kapita (Rp Juta)	71,67
Kemiskinan (%)	10,95
Pengangguran (%)	4,14
IPM (Indeks)	71,63
Stunting (%)	14,30
Nilai Tukar Petani	109,11

Sumber: RKPD Provinsi Sumsel 2024 (diolah)

1.3 Keselarasan RPJMN dengan RPD

RPD Sumsel 2024-2026 telah disusun dengan mengacu pada prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024, serta diarahkan untuk mendukung kebijakan strategis yang tertuang dalam RKP 2024. Keselarasan antara RPJMN dan RPD dapat dilihat dari beberapa aspek utama berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan

- RPD Sumsel mengadopsi kebijakan nasional dalam memperkuat sektor industri pengolahan dan UMKM guna menciptakan nilai tambah ekonomi dan memperluas lapangan kerja.
 - Fokus pada pengembangan kawasan ekonomi khusus dan industri berbasis komoditas unggulan daerah seperti pertanian dan perkebunan.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan daya saing tenaga kerja
 - Sejalan dengan RPJMN, RPD Sumsel menitikberatkan kebijakan pada peningkatan akses pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan IPM serta menekan angka pengangguran.
 - Program peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan sertifikasi di berbagai sektor strategis diakomodasi dalam kebijakan daerah.
 3. Penguatan fiskal daerah dan efektivitas belanja publik
 - RPD Sumsel mengakomodasi kebijakan nasional dalam penguatan fiskal daerah dengan mendorong strategi optimalisasi pajak daerah serta inovasi pendapatan daerah melalui strategi local taxing power.
 - Efektivitas belanja daerah dioptimalkan melalui kebijakan yang lebih terarah dalam pengalokasian dana transfer pusat dan pengelolaan APBD yang lebih akuntabel dan transparan.
 4. Ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan
 - RPD Sumsel selaras dengan RPJMN dalam memperkuat ketahanan pangan dengan peningkatan produksi sektor pertanian dan perikanan.
 - Kebijakan pembangunan berkelanjutan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam serta mitigasi dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi.

1.4 Capaian atas Keselarasan RPJMN dengan RPD

Evaluasi terhadap implementasi RPJMN dan RPD menunjukkan bahwa beberapa indikator utama telah mencapai target yang ditetapkan, mencerminkan efektivitas kebijakan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun capaian utama meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi Sumsel mencapai 5,03%, lebih rendah dari target 5,74%, namun masih menunjukkan tren positif dalam penguatan ekonomi daerah.
2. Inflasi terkendali di angka 1,2%, lebih rendah dari rentang target 2,5% ± 1%, mencerminkan stabilitas harga yang terjaga.
3. Rasio Gini mencapai 0,331, sedikit lebih tinggi dari target 0,324, mengindikasikan tantangan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.
4. Tingkat Kemiskinan turun menjadi 10,51%, lebih baik dari target 10,95%, menunjukkan efektivitas program pengentasan kemiskinan.
5. Tingkat Pengangguran mencapai 3,86%, lebih baik dari target 4,14%, menandakan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
6. IPM meningkat ke 73,84, melampaui target 71,63, mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
7. Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 128,53, jauh melampaui target 109,11, menunjukkan peningkatan kesejahteraan petani dan daya beli sektor pertanian.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa strategi pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional telah memberikan hasil yang positif, meskipun tetap diperlukan langkah-langkah perbaikan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1.5 Tantangan Sasaran Pembangunan

Meskipun beberapa capaian pembangunan telah menunjukkan tren positif, Sumatera Selatan masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan pembangunan. Tantangan ini mencakup aspek ekonomi, sosial kependudukan, serta aspek lainnya yang perlu mendapat perhatian untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang lebih inklusif dan berdaya saing.

1.5.1 Tantangan Ekonomi Daerah

- **Ketimpangan Struktur Ekonomi** – Ketergantungan yang tinggi pada sektor pertambangan dan perkebunan membuat Sumatera Selatan rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.
- **Ketahanan Fiskal** – Tingkat ketergantungan pada transfer dana pusat masih tinggi, sementara pendapatan asli daerah (PAD) belum optimal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
- **Daya Saing UMKM** – Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menghadapi kendala dalam akses permodalan, adopsi teknologi, serta daya saing di pasar nasional dan internasional.
- **Investasi dan Infrastruktur** – Masih terdapat tantangan dalam meningkatkan daya tarik investasi, terutama dalam pengembangan infrastruktur yang menunjang konektivitas antarwilayah.

1.5.2 Tantangan Sosial Kependudukan

- **Kesenjangan Akses Pendidikan dan Kesehatan** – Meskipun IPM meningkat, masih terdapat kesenjangan dalam akses layanan pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil.
- **Tingkat Pengangguran** – Meskipun pengangguran menurun, tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan masih menjadi perhatian utama.
- **Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan** – Penurunan angka kemiskinan berjalan lambat, sementara ketimpangan ekonomi masih cukup tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh Rasio Gini.
- **Stunting dan Ketahanan Pangan** – Prevalensi stunting yang masih tinggi menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

1.5.3 Tantangan Ekonomi Lainnya

- **Perubahan Iklim dan Lingkungan** – Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali berisiko menimbulkan dampak lingkungan yang berkepanjangan.
- **Ketahanan Energi dan Sumber Daya Alam** – Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang belum optimal masih menjadi isu dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- **Stabilitas Sosial dan Keamanan** – Dinamika sosial politik serta potensi konflik sumber daya di tingkat lokal perlu dikelola dengan baik untuk menciptakan stabilitas jangka panjang.

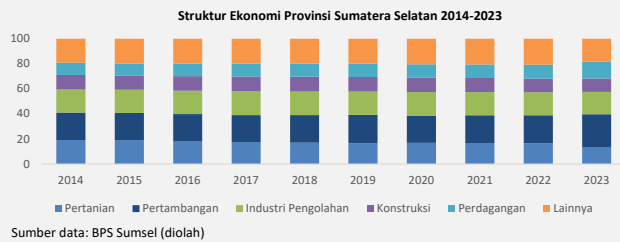
- **Digitalisasi dan Inovasi Teknologi** – Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi masih menghadapi tantangan dalam hal aksesibilitas, literasi digital, serta kesiapan infrastruktur di daerah.

Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih adaptif, inovatif, dan inklusif. Dengan langkah strategis yang tepat, diharapkan Sumatera Selatan dapat mengatasi hambatan pembangunan dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan RPD.

Boks 1

Transformasi Ekonomi Sumsel dalam Kerangka Pembangunan 2024-2026: Pendekatan Input-Output

Latar Belakang

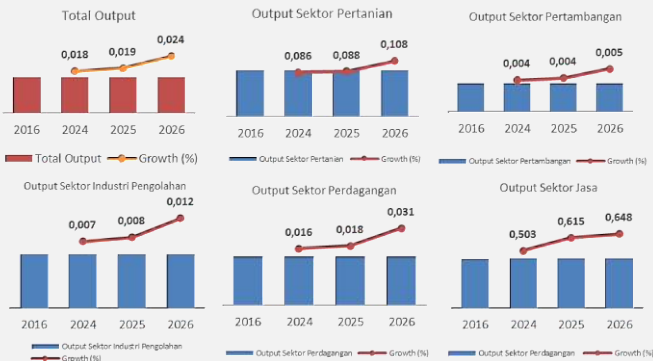


Ringkasan Hasil Analisis

Angka Pengganda Output Berdasarkan Tabel Input-Output Sumsel 2016

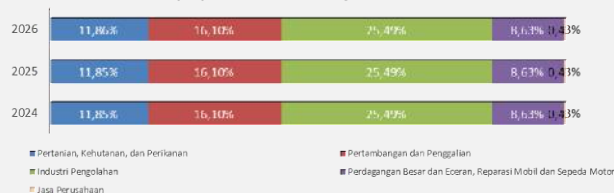
Kategori	Angka Pengganda Output	Kategori	Angka Pengganda Output
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,27140297	Informasi dan Komunikasi	1,4049955
Pertambangan dan Penggalian	1,41904724	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,2092518
Industri Pengolahan	1,68540936	Real Estate	1,2344473
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	2,94092564	Jasa Perusahaan	1,4343508
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	1,65020189	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,5053021
Konstruksi	1,64169693	Jasa Pendidikan	1,3889928
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,39209418	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,6524421
Transportasi dan Pergudangan	1,67506066	Jasa Lainnya	1,4502388
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,72189074		

Output yang Tercipta Akibat Belanja Daerah Kebijakan Transformasi Ekonomi Sumsel 2024-2026 (Rp Triliun)



Kesimpulan

Kontribusi Total Output pada Sektor Terkait Kebijakan Transformasi Ekonomi Sumsel



Dalam 10 tahun terakhir, perekonomian Sumsel didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian sebagai pilar utama. Pada tahun 2023, sektor ini berkontribusi atas 26,61% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumsel dan menjadi kontributor yang tertinggi.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumsel merumuskan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang menempatkan transformasi ekonomi sebagai salah satu prioritas utama. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi melalui optimalisasi alokasi anggaran dan belanja pemerintah daerah yang difokuskan untuk memperkuat sektor-sektor unggulan lain yang lebih berkelanjutan, seperti agribisnis, industri pengolahan, energi terbarukan, dan pariwisata. Berdasarkan hal tersebut, dialokasikan belanja daerah sebesar Rp344,38 miliar pada sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa selama tahun 2024-2026.

Berdasarkan hasil olahan tabel input-output tahun 2016, sektor industri pengolahan memiliki angka pengganda output terbesar dalam sektor yang diteliti pada analisis ini. Bila terdapat perubahan permintaan akhir sebesar Rp1 juta, maka perubahan total output yang tercipta adalah Rp1,68 juta. Sementara itu sisanya, bila terdapat tambahan permintaan akhir sebesar Rp1 juta, maka tambahan output yang tercipta pada masing-masing yaitu sektor pertanian sebesar Rp1,27 juta, sektor pertambangan sebesar Rp1,41 juta, sektor perdagangan sebesar Rp1,39 juta, dan sektor jasa sebesar Rp1,43 juta.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumsel dalam mengoptimalkan alokasi anggaran dan belanja pemerintah daerah yang difokuskan untuk memperkuat sektor-sektor unggulan lain yang lebih berkelanjutan, memberikan dampak pada sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan sektor jasa khususnya pariwisata. Terlihat pada grafik dimana pertumbuhan output pada sektor-sektor tersebut lebih tinggi dibandingkan pada sektor pertambangan, dimana yang tertinggi terjadi pada sektor jasa yang akan tumbuh 0,648% dibandingkan tahun 2016.

Kebijakan transformasi ekonomi yang dilakukan Sumsel dapat menurunkan ketergantungan pada sektor pertambangan, dimana kontribusi sektor ini diproyeksikan akan menurun di kisaran 16,10% di 2024-2026 dibandingkan di 2023 yang mencapai 26,61%. Kebijakan ini akan berdampak pada meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan menjadi yang tertinggi mencapai 25,49%, diikuti kontribusi sektor pertanian mencapai 11,85%, sektor perdagangan mencapai 8,63%, dan sektor jasa mencapai 0,43%.



BAB II

Perkembangan Ekonomi Regional

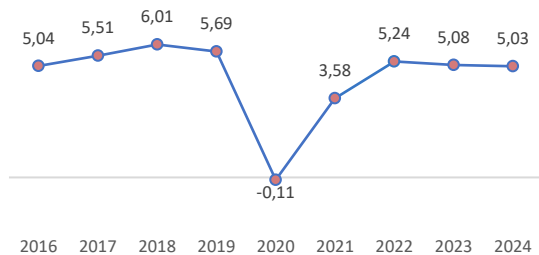


2.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Sumsel menunjukkan tren pertumbuhan yang positif sepanjang tahun 2024. Ekonomi Sumsel pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03% (ctc), lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,08% (ctc). Pertumbuhan ekonomi Sumsel tersebut sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan merupakan yang tertinggi di Pulau Sumatera bersama Sumatera Utara.

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Sumsel (CtC,%)



sumber: BPS Sumsel, 2024

Dari sisi pengeluaran, semua komponen pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan andil positif terhadap pertumbuhan. Konsumsi rumah tangga sebagai sumber pertumbuhan tertinggi memberikan andil sebesar 2,76% dari total pertumbuhan ekonomi Sumsel. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi sumber pertumbuhan terbesar kedua dengan andil sebesar 1,35%. Ekspor luar negeri memberikan andil sebesar 0,95%, Konsumsi Pemerintah 0,28%, dan Konsumsi LNPRT 0,12%.

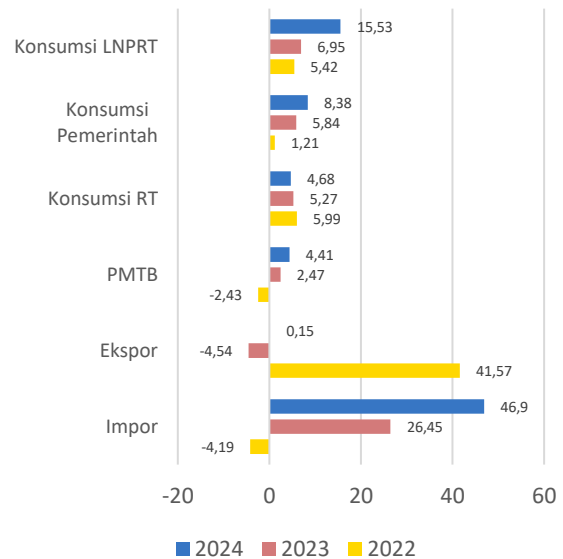
Dari sisi lapangan usaha, semua sektor memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Sumsel. Tiga sektor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan andil sebesar 0,85%, Sektor Industri Pengolahan sebesar 0,80%, dan sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,76%.

2.1.1.1. PDRB Menurut Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, sebagian besar pertumbuhan ekonomi Sumsel pada tahun 2024 didorong oleh permintaan domestik yang kuat. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,68% (ctc) dipengaruhi oleh meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 9,85%, meningkatnya mobilitas penduduk yang tercermin dari peningkatan jumlah penumpang kereta api dan angkutan udara, dan tumbuhnya sektor pariwisata yang terlihat dari meningkatnya jumlah wisatawan ke Sumsel. Selain itu, kuatnya permintaan domestik Sumsel juga terlihat pada Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh 15,53% (ctc) dipengaruhi oleh meningkatnya kegiatan partai politik ditengah pelaksanaan Pemilihan Umum 2024.

Konsumsi Pemerintah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 8,38% (ctc). Pertumbuhan konsumsi pemerintah didorong oleh realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah yang sama-sama tumbuh positif, baik untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal maupun belanja bantuan sosial. Belanja-belanja tersebut digunakan untuk operasional pemerintah, penyelenggaraan Pemilu, dukungan proyek strategis nasional, dan bantuan sosial.

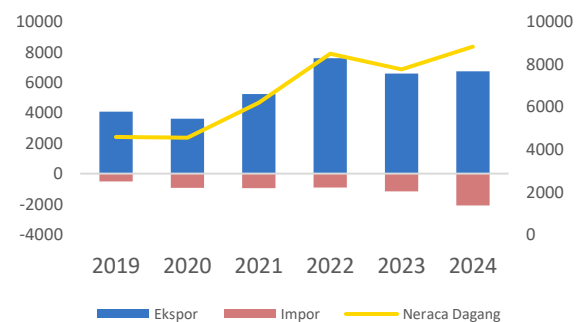
Grafik 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Komponen Pengeluaran (CtC,%)



sumber: BPS Sumsel, 2025

Kegiatan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) wilayah Sumsel tumbuh positif dan berada dalam tren yang meningkat. PMTB Sumsel pada tahun 2024 tumbuh sebesar 4,41% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,47% (ctc). Pertumbuhan PMTB tersebut didorong oleh peningkatan realisasi belanja modal pemerintah, khususnya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Jalan Tol Betung-Tempino, Bendungan Tiga Dihaji, Irigasi Lematang, dan Irigasi Lempuing. Peningkatan kegiatan investasi di Sumsel juga terlihat dari aktivitas impor barang modal yang tumbuh tinggi di 2024.

Grafik 1.3. Neraca Perdagangan Sumsel Sumsel (US\$ Juta)



sumber: BPS Sumsel, 2025

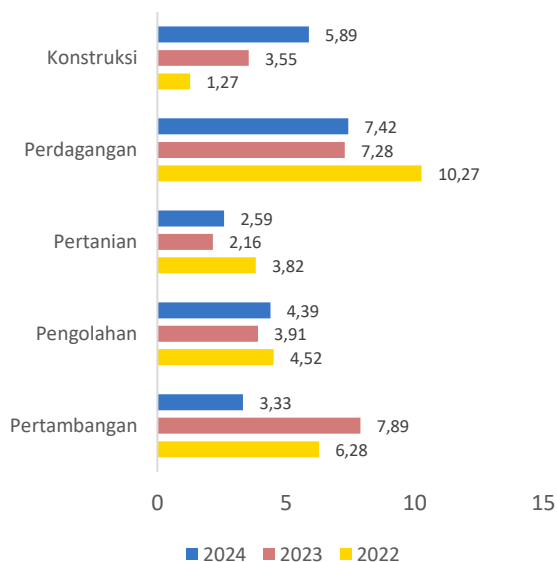
Ekspor Sumsel kembali tumbuh positif setelah mengalami pertumbuhan negatif di tahun sebelumnya. Ekspor Sumsel pada tahun 2024 tumbuh positif sebesar 0,15% (ctc), membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar -4,55% (ctc). Kinerja ekspor Sumsel di tahun 2024 ditopang oleh ekspor Barang Nonmigas yang tumbuh sebesar 2,33% (ctc), terutama pada barang bahan bakar mineral, karet dan barang dari karet, serta pulp dari kayu.

Impor Sumsel tetap dalam tren pertumbuhan yang tinggi. Pada tahun 2024, impor Sumsel tumbuh sebesar 46,90% (ctc), tinggi dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 26,45% (ctc). Kegiatan impor Sumsel pada tahun 2024 didominasi oleh impor barang mesin dan peralatan mekanis dan bagiannya yang dilakukan PT. OKI Pulp & Paper Mills yang melakukan impor barang modal dalam rangka peningkatan kapasitas produksi.

2.1.1.2. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Pada tahun 2024, struktur PDRB Sumsel menurut Lapangan Usaha ditopang oleh 5 (lima) sektor utama, yaitu Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pertanian, Perdagangan, dan Konstruksi. Kelima sektor tersebut menunjukkan kinerja yang positif dan lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan 12 sektor lainnya juga mencatatkan pertumbuhan yang positif.

Grafik 1.4. Pertumbuhan Ekonomi 5 Sektor Utama Sumsel (%)



sumber: BPS Sumsel, 2025

Sektor Pertambangan dan Penggalian tumbuh positif meskipun lebih lambat dari tahun sebelumnya. Kinerja sektor Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2024 tumbuh sebesar 3,33% (ctc) dipengaruhi oleh perkembangan subsektor pertambangan batubara dan lignit yang tetap tumbuh sebesar 6,20% (ctc). Namun, laju pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,89% (ctc) dipengaruhi kinerja subsektor pertambangan minyak, gas, dan panas bumi yang berkontraksi sebesar -0,74% (ctc).

Industri Pengolahan Sumsel tumbuh positif dan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Industri Pengolahan Sumsel di tahun 2024 tumbuh sebesar 4,39% (ctc), lebih tinggi dari periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,91% (ctc). Tumbuhnya sektor industri pengolahan Sumsel tersebut didorong oleh positifnya kinerja subsektor utama yaitu industri pengolahan makanan dan minuman, batubara dan pengilangan migas, dan industri karet, barang dari karet dan plastik.

Kinerja sektor Pertanian Sumsel tumbuh positif dan lebih baik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, sektor pertanian Sumsel tumbuh sebesar 2,59% (ctc), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,16% (ctc). Positifnya kinerja sektor pertanian tersebut didorong oleh kinerja subsektor tanaman perkebunan dan tanaman pangan yang sama-sama tumbuh positif sebesar 4,85% (ctc) dan 0,15% (ctc).

Sektor Perdagangan Sumsel tetap dalam tren pertumbuhan yang tinggi. Aktivitas perdagangan Sumsel pada tahun 2024 tumbuh sebesar 7,42% (ctc), lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 7,28% (ctc). Pertumbuhan sektor

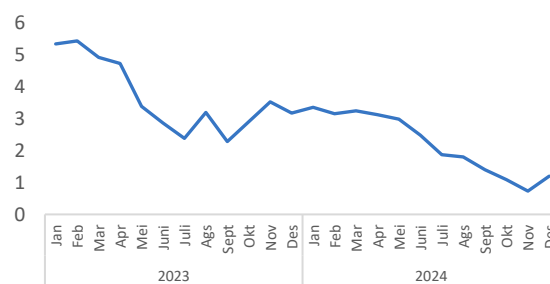
perdagangan Sumsel utamanya dikontibusi oleh subsektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor yang tumbuh sebesar 8,43% (ctc). Selain itu, perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya juga tumbuh positif sebesar 2,42% (ctc)

Sektor Konstruksi tumbuh positif dan lebih tinggi dari periode sebelumnya. Kinerja sektor konstruksi pada tahun 2024 wilayah Sumsel tumbuh sebesar 5,89% (ctc), lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 3,55% (ctc). Pertumbuhan sektor konstruksi tersebut dipengaruhi oleh percepatan penyelesaian PSN pada tahun 2024 terdapat 15 PSN yang sedang dilaksanakan di Sumsel.

2.1.2. Inflasi

Laju inflasi Sumsel pada terkendali namun berada di bawah target. Inflasi Sumsel tahun 2024 berada di angka 1,20% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3,17% (yoy) dan lebih rendah dari inflasi nasional yang sebesar 1,57% (yoy). Beberapa faktor yang mempengaruhi laju inflasi Sumsel di tahun 2024 adalah penyesuaian harga BBM, kenaikan harga emas, kenaikan harga minyak goreng, kenaikan tarif angkutan udara, cuaca ekstrem, dan upaya konsisten pengendalian inflasi oleh pemerintah daerah.

Grafik 1.5. Inflasi Sumsel (%)



sumber: BPS Sumsel, 2025

Berdasarkan kelompok pengeluaran, kelompok yang memberikan andil terbesar adalah Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Kelompok perawatan pribadi dan jasa Lainnya mengalami inflasi sebesar 8,09% (yoy) dengan andil terhadap inflasi umum sebesar 0,58%. Andil inflasi terbesar kedua disumbang oleh kelompok transportasi yang mengalami inflasi sebesar 1,35% (yoy) dan memberikan andil sebesar 0,18%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil terbesar ketiga dengan inflasi sebesar 0,49% (yoy) dan andil terhadap inflasi umum sebesar 0,15%.

Emas perhiasan menjadi komoditas yang memberikan andil terbesar pada inflasi Sumsel. Berdasarkan jenis komoditas, terdapat 5 (lima) komoditas yang menjadi penyumbang utama yaitu emas perhiasan dengan andil 0,62%, daging ayam ras 0,17%, minyak goreng 0,13%, bawang merah 0,11%, dan bawang putih 1,13%.

Cabai merah menjadi komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap deflasi Sumsel. Pada tahun 2024, 5 (lima) komoditas yang menjadi penyumbang utama deflasi Sumsel adalah cabai merah dengan andil -sebesar 0,50% cabai rawit 0,08%, bensin, ikan patin 0,06%, dan pepaya 0,05%.

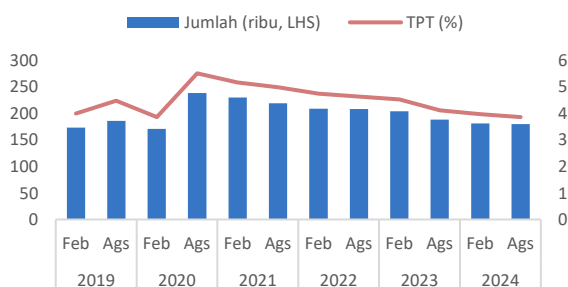
Laju inflasi Sumsel pada tahun tersebut berada di bawah rentang target. Pada tahun 2024, target inflasi Sumsel berada di rentang 2,5% ± 1%. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa ekonomi Sumsel beroperasi di bawah potensi kapasitas yang seharusnya bisa dicapai.

2.2. Perkembangan Indikator Kesejahteraan

2.2.1. Ketenagakerjaan

Perkembangan Kondisi ketenagakerjaan Sumsel berada tren yang terus membaik. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Sumsel per Agustus 2024 berada di angka 3,86% (yoy), turun dari kondisi Agustus 2023 yang sebesar 4,11% (yoy). Berdasarkan jumlah, aktivitas perekonomian Sumsel dalam satu tahun tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 80,44 ribu orang dan pengangguran berkurang sebanyak 8,8 ribu orang.

Grafik 1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka Sumsel (% , yoy)



sumber: BPS Sumsel, 2025

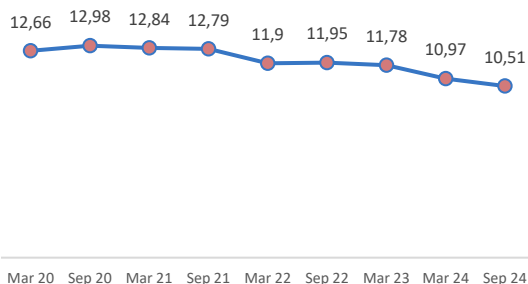
Sektor Pertanian dan perdagangan menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar. Selama periode Agustus 2023 s.d. Agustus 2024, sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebanyak 62 ribu orang, terutama peningkatan pada pekerja keluarga yang didominasi pekerja dengan pendidikan SD ke bawah. Sektor perdagangan menyerap sebanyak 37 ribu orang, dengan peningkatan pada pekerja yang berstatus berusaha sendiri dan didominasi oleh pekerja dengan pendidikan SMA sederajat.

Sektor Pengangkutan dan Pergudangan dan sektor Jasa Profesional dan Perusahaan menjadi sektor yang mengalami penurunan tenaga kerja terbesar. Kedua sektor tersebut secara total mengalami penurunan jumlah tenaga kerja sebanyak 32,10 ribu orang. Penurunan pada sektor Pengangkutan dan Pergudangan didominasi pekerja berstatus buruh dengan mayoritas pekerja berpendidikan SMA derajat

2.2.2. Kemiskinan dan Ketimpangan

Tingkat kemiskinan Sumsel berada dalam tren perbaikan. Per September 2024, tingkat kemiskinan Sumsel berada di angka 10,51%, turun dari Maret 2023 yang sebesar 11,78%. Berdasarkan wilayah, kemiskinan di wilayah Pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Per September 2024, tingkat kemiskinan di Pedesaan tercatat di angka 11,43% dan perkotaan 9,02%.

Grafik 1.7. Tingkat Kemiskinan Sumsel (%)

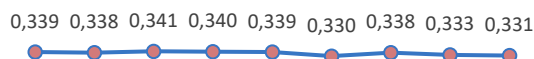


Sumber: BPS Sumsel, 2025

Perbaikan tingkat kemiskinan Sumsel juga terlihat pada perbaikan kondisi tingkat kedalaman (P1) maupun keparahan (P2). Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Sumsel per September 2024 di angka 1,449, turun dari Maret 2023 yang diangka 1,724. Hal tersebut menjelaskan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Sumsel cenderung mendekati dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Sumsel (P2) per September 2024 di angka 0,316, turun dari Maret 2023 yang tercatat 0,393, yang mengindikasikan bahwa ketimpangan antar penduduk miskin di Sumsel menurun.

Komoditas makanan memberikan sumbangan terbesar terhadap Garis Kemiskinan Sumsel. Per September 2024, komoditas makanan berkontribusi sebesar 75,03% dari total garis kemiskinan, dengan beras, rokok kretek filter, daging ayam, telur ayam ras, dan mie instan sebagai komoditas dominan. Sementara itu, komoditas non makanan yang dominan menyumbang garis kemiskinan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Grafik 1.8. Gini Ratio Provinsi Sumsel



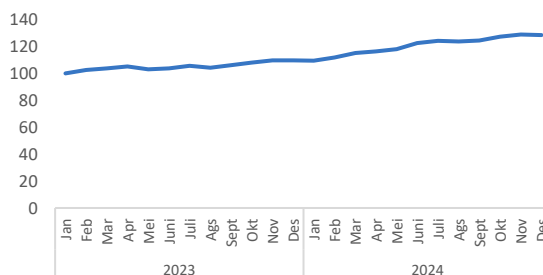
sumber: BPS Sumsel, 2025

Kondisi ketimpangan Sumsel per September 2024 mengalami penurunan. Gini Ratio Sumsel tercatat di angka 0,331, turun dari periode Maret 2023 yang sebesar 0,338. Membaiknya tingkat ketimpangan tersebut tidak terlepas dari program pemerintah yang memberikan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

2.2.3. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) Sumsel menunjukkan tren peningkatan. Per Desember 2024, NTP Sumsel tercatat di angka 128,53, meningkat 17,36% (yoy). Peningkatan NTP tersebut didorong oleh subsektor perkebunan yang mengalami peningkatan *double digit*. Dari 5 (lima) subsektor, 3 (tiga) sektor mengalami surplus yaitu Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan.

Grafik 1.9. Nilai Tukar Petani Sumsel



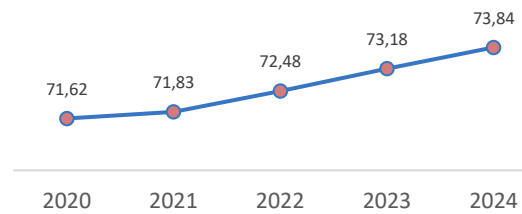
Sumber: BPS Sumsel, 2025

Peningkatan Indeks Terima (It) Petani Sumsel lebih tinggi dari peningkatan Indeks Bayar (Ib). Per Desember 2024, It Sumsel di angka 159,10, naik 19,89% (yoy)). Peningkatan It tersebut ditopang oleh kinerja sektor perkebunan yang per Desember 2024 mencatatkan It di angka 175,26, meningkat 28,52% (yoy). Sementara itu, Ib Sumsel per Desember 2024 berada di angka 123,78, meningkat 2,15% (yoy). Peningkatan Ib terbesar terjadi pada subsektor tanaman pangan sebesar 2,78% (yoy).

2.2.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel terus mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya kinerja perekonomian Sumsel. IPM Sumsel tahun 2024 berada di angka 73,84, meningkat 0,96% dibandingkan tahun 2022. Namun demikian, IPM Sumsel di bawah IPM Nasional yang sebesar 74,29.

Grafik 1.10. Indeks Pembangunan Manusia



Sumber: BPS Sumsel, 2025

Dari dimensi pembentuk IPM, peningkatan terjadi disemua dimensi. Kenaikan tertinggi pada dimensi Pengeluaran Per kapita yang meningkat 3,26% (yoy), diikuti Rata-rata Lama Sekolah 1,55% (yoy), Angka Harapan Hidup 0,38% (yoy), dan Harapan Lama Sekolah meningkat 0,63% (yoy).

Boks 2

Petani Tanaman Pangan di Sumsel Belum Sejahtera

Perkembangan NTP Tanaman Pangan Sumsel

Sumber: BPS Sumsel



Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan Sumsel Perlu Mendapatkan Perhatian. NTP Sektor Tanaman Pangan (NTPP) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir menunjukkan tren yang stagnan dan cenderung berada di area defisit. NTPP berada di area surplus Ketika berada di musim panen yaitu antara bulan September s.d. Oktober. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, NTPP tertinggi hanya menyentuh di angka 103,32 yaitu pada bulan Januari 2020. Sementara level terendah di angka 84,15 pada bulan Juli 2022. Tren NTPP tersebut menjadi indikasi bahwa petani tanaman pangan di Sumsel perlu mendapatkan perhatian,

Perkembangan Indeks Terima dan Indeks Bayar NTPP



Sumber: BPS Sumsel

Indeks Bayar Petani Tanaman Pangan Cenderung Lebih Tinggi Dari Indeks Terima. Gap antara Indeks Yang Diterima dan Yang Dibayar relatif kecil sehingga surplus yang diperoleh juga kecil. Diperlukan sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan petani terutama terkait bagaimana menekan biaya produksi maupun rumah tangga dari para petani. Dari sisi pemerintah pusat, Kementerian Pertanian dapat merespon ini melalui pemberian bantuan penyediaan bibit, pupuk, dan alat pertanian. Selanjutnya, Kementerian sosial dan Kementerian Keuangan dapat memberikan bantuan berupa bansos/bantuan langsung tunai untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, subsidi pupuk untuk menekan biaya produksi. Sementara itu, dari sisi pemerintah daerah, Dinas Pertanian dapat merespon dengan memberikan bantuan penyediaan bibit, pupuk, dan alat pertanian, Dinas Sosial memberikan bantuan sosial sebagai *buffer* kebutuhan sehari-hari petani, serta Pemerintah Provinsi melalui TPID melakukan pengendalian harga-harga kebutuhan pokok.

BAB III

**Analisis
Fiskal
Regional**

3.1. Pelaksanaan APBN Sumsel

APBN merupakan instrumen fiskal pemerintah pusat yang menjalankan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Sejalan dengan tema kebijakan fiskal tahun 2024 “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan mengoptimalkan fungsi distribusi dan stabilisasi, APBN di Sumsel difokuskan pada pengendalian inflasi (stabilisasi harga), penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan prevalensi stunting. Melalui pengoptimalan fungsi alokasi, APBN juga difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (*human capital*), mengakselerasi pembangunan infrastruktur (*physical capital*), serta penguatan reformasi kelembagaan.

Kebijakan fiskal 2024 juga difokuskan untuk melanjutkan reformasi fiskal secara holistik, melalui optimalisasi pendapatan negara yang dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi. Target pendapatan negara pada tahun 2024 di Sumsel meningkat 12,76% (yoy) dibandingkan target tahun sebelumnya, yang ditetapkan sebesar Rp22,45 triliun dengan rincian penerimaan pajak Rp19,74 triliun, PNBP Rp2,38 triliun, serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp331,22 miliar. Penerimaan pajak sebagai kontributor utama, ditargetkan meningkat 12,48% (yoy) di tahun 2024 dengan asumsi semakin baiknya kondisi perekonomian di Sumsel pasca pemulihan ekonomi dan semakin meningkatnya konsumsi domestik di Sumsel, efektivitas implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), dan peningkatan kepatuhan dan integrasi teknologi.

Selain itu, untuk melanjutkan reformasi fiskal secara holistik maka peningkatan kualitas belanja (*spending better*) perlu ditempuh guna mendukung penguatan reformasi struktural dan antisipasi terhadap ketidakpastian global maupun domestik. Alokasi belanja negara pada tahun 2024 di Sumsel meningkat 6,18% (yoy) dibandingkan alokasi tahun sebelumnya, yang ditetapkan sebesar Rp54,63 triliun dengan rincian belanja pemerintah pusat (BPP) Rp21,14 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp33,49 triliun. Alokasi belanja pemerintah pusat meningkat 24,56% (yoy) yang diarahkan semakin berkualitas (*spending better*) melalui belanja yang semakin efektif, efisien, transparan, fokus mendukung prioritas pembangunan, dan akuntabel. Sementara itu, alokasi TKD diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui perbaikan kualitas *output* dan *outcome* layanan publik serta pemerataan kesejahteraan rakyat di Sumsel.

Alokasi belanja pemerintah pusat di Sumsel utamanya digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024, penuntasan proyek strategis nasional (PSN) berupa pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta peruntukan kenaikan gaji pokok ASN serta pembayaran Gaji 13 dan THR. Hal ini terlihat dari pagu belanja barang yang meningkat 31,55% (yoy) yang digunakan utamanya untuk dukungan pelaksanaan pemilu seperti pembentukan badan *ad hoc* (pembayaran honor), pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, pengadaan barang/jasa/logistik pemilu, dan pelaksanaan tahapan penetapan hasil pemilu, serta persiapan Pilkada Serentak di November 2024. Pagu belanja modal juga meningkat 26,74% (yoy) utamanya digunakan untuk penyelesaian PSN di Sumsel seperti pembangunan jalan Tol Betung-Tempino, Bendungan Tiga Dihaji, Daerah Irigasi Lematang, dan Daerah Irigasi Lempuing. Selain itu, pagu belanja pegawai meningkat 13,58% (yoy) yang utamanya digunakan untuk pembayaran kenaikan gaji pokok ASN sesuai Perpres 10/2024 dan pembayaran Gaji 13 dan THR sesuai PP 14/2024 dimana komponen tunjangan

kinerja dibayarkan 100% di 2024, sementara di 2023 dibayarkan 50%. Pagu belanja bantuan sosial juga meningkat 13,45% (yoy) sebagai respon untuk perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan di Sumsel dalam program asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah.

Alokasi TKD 2024 di Sumsel tetap dominan dalam mendukung APBD di wilayah Sumsel untuk mendorong pencapaian program prioritas nasional dan kegiatan produktif dengan *multiplier effect* yang tinggi, meskipun alokasinya sedikit mengalami penurunan. Alokasi TKD menurun 2,86% (yoy) dipengaruhi alokasi DBH, DAK Fisik, dan insentif fiskal yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Alokasi DBH menurun karena penerimaan negara tahun 2023 yang dibagikan menjadi alokasi DBH 2024, lebih rendah dibandingkan penerimaan negara di 2022 yang dibagikan menjadi alokasi DBH 2023. Hal tersebut utamanya didorong oleh mulai ternormalisasinya harga komoditas utama Sumsel (Batubara) di tahun 2023, dimana di tahun 2022 mengalami *windfall* komoditas. Di sisi lain, alokasi DAK Fisik lebih rendah dan cenderung berfluktuasi bergantung dengan arah kebijakan, prioritas nasional, sasaran DAK Fisik, serta rencana kegiatan pemda yang disetujui. Pagu insentif fiskal cenderung lebih rendah disebabkan di 2024 hanya diberikan insentif fiskal tahun berjalan terkait pengendalian inflasi untuk 1 periode, dimana di tahun sebelumnya diberikan dalam 3 periode.

Dengan mencermati alokasi dan arah kebijakan fiskal 2024, kinerja realisasi belanja negara di Sumsel tumbuh positif ditopang oleh terlaksananya agenda pemilu, persiapan pilkada serentak, *progress* penuntasan PSN, dan pembayaran kenaikan gaji ASN, Gaji 13, dan THR, serta penyaluran TKD. Realisasi belanja negara di Sumsel mencapai Rp52,88 triliun atau tumbuh positif 4,53% (yoy) dan mencapai 96,79% dari pagu belanja di 2024. Capaian tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 98,32% dipengaruhi adanya instruksi Presiden dan Menteri Keuangan terkait efisiensi belanja di akhir tahun 2024. Baik dari sisi belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah, semuanya menunjukkan kinerja realisasi yang optimal. Hal ini terlihat dari Belanja pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga) yang terealisasi sebesar Rp19,79 triliun atau tumbuh positif 21,81% (yoy), dan belanja transfer ke daerah di wilayah Sumsel yang terealisasi sebesar Rp33,09 triliun atau tercapai 98,81% dari pagu. Secara keseluruhan, peningkatan realisasi belanja ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Sumsel melalui akselerasi belanja yang lebih cepat dan lebih tepat sasaran.

Tumbuh positifnya belanja negara, mempengaruhi kondisi perekonomian Sumsel di 2024 yang dalam tren positif. Optimalnya realisasi belanja negara di Sumsel khususnya untuk persiapan pemilu dan pilkada serentak, penyelesaian PSN, dan penyaluran TKD berdampak pada ekonomi Sumsel yang tumbuh 5,03% (ctc). Peningkatan aktivitas partai politik dalam rangka persiapan pemilihan presiden dan legislatif, serta pilkada menjadi pendorong tumbuhnya perekonomian Sumsel dari sisi pengeluaran Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) yang tumbuh 15,53% (ctc). Selain itu, peningkatan realisasi anggaran belanja pemerintah menjadi pendorong tumbuhnya pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) mencapai 8,38% (ctc).

Tabel 2.1. Laporan Realisasi APBN di Provinsi Sumatera Selatan 2022-2024

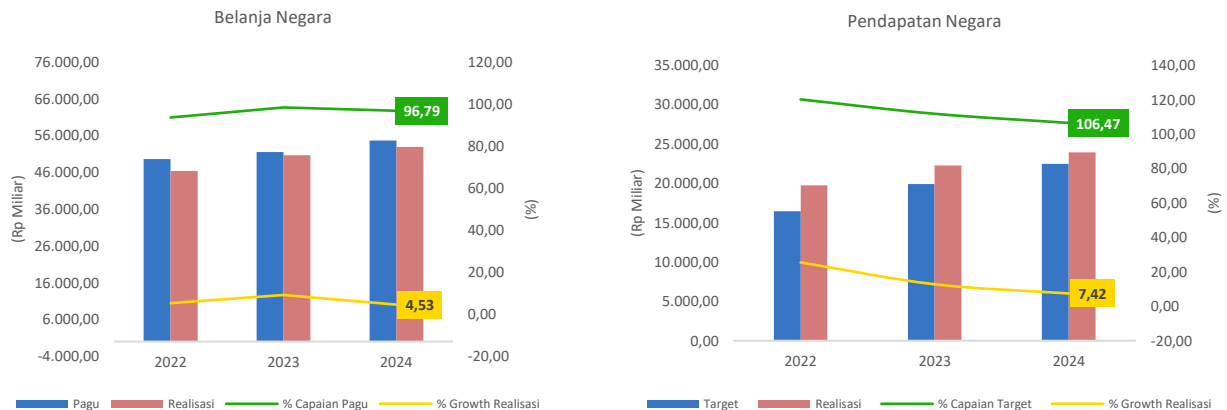
I-Account (dalam Miliar Rupiah)	TA 2022			TA 2023			TA 2024			% Growth 2023- 2024
	Pagu/Target	Realisasi	%	Pagu/Target	Realisasi	%	Pagu/Target	Realisasi	%	
Pendapatan Negara	16.432,27	19.738,02	120,12	19.914,83	22.257,02	111,76	22.455,30	23.909,17	106,47	7,42
Perpajakan	14.529,54	17.323,88	119,23	17.827,38	18.785,53	105,37	20.074,82	20.164,86	100,45	7,34
Penerimaan Pajak	14.066,41	16.727,03	118,91	17.552,61	18.487,79	105,33	19.743,59	19.821,52	100,39	7,21
Kepabeanan dan Cukai	463,13	596,86	128,87	274,76	297,74	108,36	331,22	343,33	103,66	15,31
PNBP	1.902,73	2.414,13	126,88	2.087,45	3.471,49	166,30	2.380,48	3.744,31	157,29	7,86
PNBP Lainnya	486,30	862,55	177,37	496,40	1.686,79	339,81	506,36	1.647,77	325,41	-2,31
Pendapatan BLU	1.416,43	1.551,58	109,54	1.591,05	1.784,70	112,17	1.874,12	2.096,54	111,87	17,47
Belanja Negara	49.569,78	46.368,50	93,54	51.457,06	50.591,29	98,32	54.639,46	52.885,59	96,79	4,53
Belanja Pemerintah Pusat	14.333,35	13.856,51	96,67	16.976,88	16.247,92	95,71	21.146,17	19.791,27	93,59	21,81
Belanja Pegawai	5.303,92	5.226,20	98,53	5.245,76	5.198,32	99,10	5.957,98	6.001,22	100,73	15,45
Belanja Barang	5.502,66	5.300,83	96,33	6.728,89	6.502,23	96,63	8.851,75	8.195,80	92,59	26,05
Belanja Modal	3.506,55	3.309,27	94,37	4.976,91	4.522,12	90,86	6.307,71	5.565,51	88,23	23,07
Belanja Bantuan Sosial	20,21	20,21	100,00	25,32	25,25	99,71	28,73	28,73	100,00	13,78
Transfer ke Daerah	35.236,43	32.512,00	92,27	34.480,18	34.343,36	99,60	33.493,29	33.094,32	98,81	-3,64
Dana Bagi Hasil	14.769,18	12.533,00	84,86	13.544,47	13.540,99	99,97	11.205,62	11.202,49	99,97	-17,27
Dana Alokasi Umum	11.569,80	11.569,80	100,00	12.254,41	12.240,01	99,88	13.648,50	13.353,44	97,84	9,10
DAK Fisik	1.843,26	1.687,76	91,56	1.568,36	1.512,26	96,42	1.430,07	1.400,77	97,95	-7,37
DAK Non Fisik	4.211,15	3.882,87	92,20	4.171,97	4.122,83	98,82	4.246,84	4.184,93	98,54	1,51
Insentif Fiskal	288,19	288,19	100,00	254,87	250,14	98,15	246,51	239,91	97,32	-4,09
Dana Desa	2.554,85	2.550,38	99,82	2.572,42	2.569,30	99,88	2.594,87	2.592,62	99,91	0,91
Hibah ke Daerah	0,00	0,00	-	113,69	107,84	94,85	120,88	120,16	99,40	11,43
Surplus / Defisit	-33.137,51	-26.630,48	80,36	-31.542,23	-28.334,27	89,83	-32.184,17	-28.976,42	90,03	2,27

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel, Kanwil DJP Sumsel dan Babel, dan Kanwil DJBC Sumbagtim, dan Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, Babel (diolah)

Dengan melihat kondisi perekonomian Sumsel yang dalam tren positif, kinerja realisasi pendapatan negara juga terpantau tumbuh positif dengan kinerja penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBP yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan negara di Sumsel mencapai Rp23,90 triliun atau tumbuh positif 7,42% dan diatas target mencapai

106,47%. Capaian tersebut didorong penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBP di 2024 yang mencatatkan kinerja melampaui target. Hal ini dipengaruhi resiliensi kondisi ekonomi di Sumsel, meningkatnya aktivitas ekspor-impor di Sumsel, serta meningkatnya kinerja layanan satker dan badan layanan umum.

Grafik 2.1. Perkembangan Realisasi Belanja dan Pendapatan Negara Wilayah Sumatera Selatan (c-to-c)

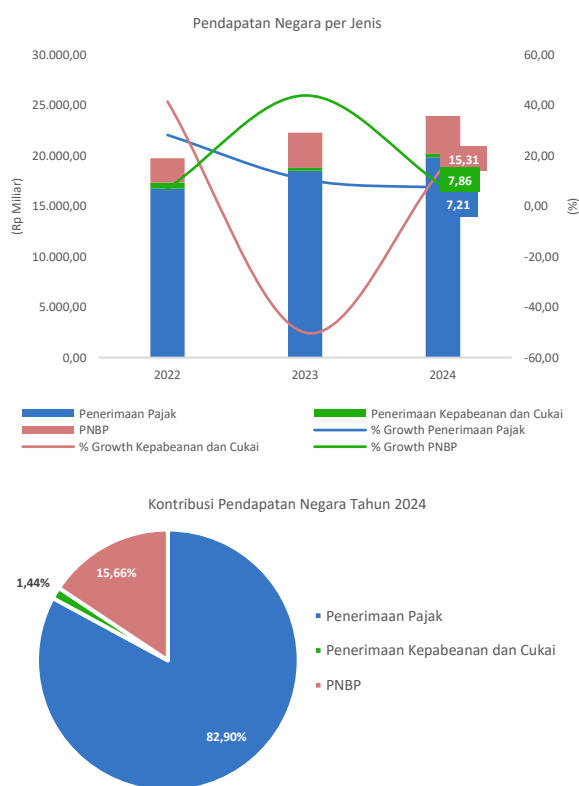


Sumber: Kanwil DJPb Sumsel, Kanwil DJP Sumsel dan Babel, dan Kanwil DJBC Sumbagtim, dan Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, Babel (diolah)

3.1.1. Pendapatan Negara

Pendapatan negara di Sumsel meningkat dan utamanya dipengaruhi seluruh jenis penerimaan tercapai diatas target. Hingga akhir tahun 2024, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp19,82 triliun dan tercapai diatas target (100,39%). Penerimaan pajak masih menjadi kontributor utama penyumbang pendapatan negara di Sumsel dengan *share* mencapai 82,90%. Penerimaan pajak di Sumsel tumbuh positif 7,21% (yoy) ditopang kinerja perekonomian yang resilien dan sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi di Sumsel. Selanjutnya, realisasi PNBP mencatatkan penerimaan sebesar Rp3,74 triliun dan tercapai diatas target (157,29%) didorong peningkatan layanan, perbaikan tata kelola, serta inovasi layanan BLU dan satker. Kinerja PNBP tumbuh positif 7,86% (yoy) didorong oleh peningkatan PNBP Badan Layanan Umum (BLU) dan PNBP Lainnya dari Kementerian/Lembaga. PNBP menjadi kontributor kedua terbesar dengan *share* 15,66%.

Grafik 2.2. Perkembangan dan Kontribusi Realisasi Pendapatan Negara Wilayah Sumatera Selatan (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel, Kanwil DJP Sumsel dan Babel, dan Kanwil DJBC Sumbagtim (diolah)

Penerimaan kepabebean dan cukai tercapai diatas target dan mencatatkan tren positif. Secara kontribusi, penerimaan kepabebean dan cukai hanya menyumbangkan 1,44% dari total pendapatan negara di Sumsel. Penerimaan kepabebean dan cukai terealisasi sebesar Rp343,33 miliar atau tumbuh positif 15,31% (yoy) utamanya dipengaruhi didorong peningkatan kinerja ekspor-impor Sumsel, serta peningkatan harga *Crude Palm Oil* (CPO) di semester II 2024. Selain itu, Meningkatnya aktivitas impor terutama komoditas serealida dan bahan baku karet, serta importasi mesin tanpa menggunakan fasilitas yang menopang kinerja bea masuk.

3.1.1.1. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak Sumsel mencerminkan kondisi ekonomi Sumsel yang dalam tren positif. Hingga akhir tahun 2024, penerimaan pajak mencapai Rp19,82 triliun (100,39% dari target). Kontributor utamanya berasal dari PPh dan PPN yang masing-masing menyumbangkan 44,19% dan 42,04% dari total penerimaan pajak Sumsel. Keduanya tumbuh positif masing-masing 7,58% (yoy) dan 6,70% (yoy) yang mengindikasikan peningkatan tersebut didorong oleh baiknya aktivitas konsumsi dan kondisi ekonomi Sumsel yang tumbuh positif. Selain itu, Penerimaan PBB tumbuh sebesar 9,05% (yoy) dengan capaian sebesar 112,87% karena pembayaran PBB yang sudah memasuki jatuh tempo dan pembayaran ketetapan PBB.

Kelompok pajak penghasilan (PPh) menjadi kontributor utama total penerimaan pajak di Sumatera Selatan. Kelompok PPh mencatatkan penerimaan sebesar Rp8,75 triliun (99,16% dari target). Hal ini dipengaruhi oleh terjaganya pertumbuhan ekonomi di Sumsel yang utamanya ditopang dari aktivitas konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga sebagai sumber pertumbuhan tertinggi memberikan andil sebesar 2,76% dari total pertumbuhan ekonomi Sumsel yang mencapai 5,03% (ctc). Pembayaran belanja pegawai untuk kenaikan gaji ASN, Gaji 13, dan THR mempengaruhi peningkatan level penghasilan pegawai dan berimplikasi pada peningkatan pembayaran PPh pasal 21. Selain itu, peningkatan pengeluaran belanja untuk pelaksanaan konstruksi pada PSN juga berdampak pada peningkatan PPh final sehingga secara keseluruhan berdampak pada tumbuh positifnya kelompok pajak penghasilan di 2024. Aktivitas konsumsi pemerintah yang berlangsung baik, menjadi pendorong meningkatnya realisasi kelompok PPN & PPNBM. Realisasi belanja modal untuk penuntasan proyek strategis nasional (PSN) di Sumsel utamanya yang mendorong capaian PPN & PPNBM yang mencapai Rp8,33 triliun (98,21% dari target) dan tumbuh positif 6,70% (yoy).

Tabel 2.2 Penerimaan Per Kelompok Pajak Tahun 2023-2024 (c-to-c)

Kelompok Pajak (Rp Miliar)	2023			2024			Growth (%)	Share Kelompok Pajak TA 2024 (%)
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Pajak Penghasilan (PPh)	8.058,11	8.140,79	101,03	8.832,22	8.758,21	99,16	7,58	44,19
PPN & PPNBM	7.216,26	7.809,21	108,22	8.484,68	8.332,59	98,21	6,70	42,04
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	2.073,62	2.348,08	113,24	2.268,48	2.560,52	112,87	9,05	12,92
Pendapatan Pajak Lainnya	204,62	189,70	92,71	158,20	170,21	107,59	-10,28	0,86
Total Penerimaan Pajak	17.552,61	18.487,79	105,33	19.743,59	19.821,52	100,39	7,21	100

Sumber: Kanwil DJP Sumsel dan Babel (diolah)

Tabel 2.3. Penerimaan Per Jenis Pajak TA 2023-2024 (c-to-c)

Jenis Pajak (Rp Miliar)	Realisasi		Growth (%)	Share Jenis Pajak TA 2024 (%)
	2023	2024		
PPN Dalam Negeri	7.585,61	8.074,41	6,44	40,74
PPh Pasal 21	3.186,80	3.722,41	16,81	18,78
PBB Pertambangan	1.976,76	2.167,98	9,67	10,94
PPh Pasal 25/29 Badan	2.060,66	1.958,91	-4,94	9,88
PPh Final & FLN	1.090,58	1.226,66	12,48	6,19
PPh Pasal 23	954,89	961,63	0,71	4,85
PPh Pasal 22	472,96	474,43	0,31	2,39
PBB Perkebunan	252,83	290,63	14,95	1,47
Pajak Lainnya	906,70	944,46	4,16	4,76
Total	18.487,79	19.821,52	7,21	100

Sumber: Kanwil DJP Sumsel dan Babel (diolah)

Berdasarkan jenisnya, penerimaan pajak transaksional mayoritas tumbuh positif. PPN dalam negeri menjadi kontributor utama yang berkontribusi 40,74% dari penerimaan negara di Sumsel dan tercatat Rp8,07 triliun dan tumbuh 6,44% (yoy). Hal ini peningkatan setoran masa atas aktivitas sektor perkebunan kelapa sawit dan karet. serta peningkatan setoran pemungut instansi pemerintah APBN dan BUMN atas kegiatan bidang konstruksi dan PSN di Sumsel. Selanjutnya PPh pasal 21 mampu tumbuh *double digits* mencapai 16,81% (yoy) dipengaruhi terjaganya utilitas tenaga kerja dan peningkatan level penghasilan karyawan di wilayah Sumsel. PBB Pertambangan tumbuh 9,67% karena pembayaran PBB tahun 2024 yang sudah memasuki jatuh tempo pelunasan, dengan kontribusi terbesar dari Pertambangan Migas. PPh Final juga tumbuh *double digits* 12,48% karena peningkatan pembayaran dari pelaksanaan jasa konstruksi pada Proyek Strategis Nasional dan penghasilan atas Bunga Deposito / Tabungan. PPh 23 tumbuh 0,71% (yoy) karena adanya penerimaan atas aktivitas jasa pada sektor pertambangan dan penerimaan ketetapan tahun 2024. Selain itu, PPh 22 tumbuh 0,31% (yoy) karena pembayaran masa atas aktivitas pembangkit tenaga listrik dan perdagangan besar bahan bakar. PBB Perkebunan tumbuh 14,95% (yoy) karena pembayaran PBB tahun 2024 yang sudah memasuki jatuh tempo pelunasan, dengan kontribusi terbesar dari perkebunan buah kelapa sawit. Namun demikian, PPh Badan berkontraksi 4,94% (yoy) dipengaruhi penurunan signifikan harga komoditas tahun 2023, yang mengakibatkan penurunan pembayaran PPh Tahunan.

Berdasarkan sektornya, Penerimaan Pajak mayoritas sektor Tumbuh Positif. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh 5,93% (yoy), karena peningkatan setoran masa PPN Dalam Negeri atas aktivitas perkebunan kelapa sawit, dan perkebunan besar kopi serta pembayaran pemungut BUMN atas aktivitas konstruksi. Sektor Pertambangan dan Penggalian tumbuh 2,01% (yoy) karena pembayaran PBB Pertambangan Migas dan Minerba Batubara tahun 2024 yang sudah memasuki jatuh tempo pelunasan serta peningkatan pembayaran PPh 21 atas gaji/bonus karyawan. Sektor Administrasi Pemerintahan tumbuh 14,15% (yoy) karena peningkatan pembayaran PPN DN atas belanja modal APBN dan APBD serta peningkatan pembayaran PPh 21 atas belanja pegawai. Sektor Industri Pengolahan sedikit berkontraksi 0,08% (yoy), dikarenakan peningkatan restitusi tahun 2024 dan penurunan harga komoditas tahun 2023 yang berdampak pada penurunan PPh Tahunan dan angsuran PPh tahunan 2024. Sektor Pertanian, Kehutanan, & Perikanan tumbuh 5,8% karena pembayaran ketetapan PPh Badan tahun 2024 dan pembayaran PBB Perkebunan yang sudah melewati jatuh tempo pelunasan.

Pertumbuhan positif penerimaan pajak suatu sektor selalu dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi sektor yang sama. Tumbuh kuatnya PDRB sektor administrasi pemerintah 9,35% (ctc) mempengaruhi penerimaan pajak pada sektor administrasi pemerintah 14,15% (ctc). Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pembayaran PPN dalam negeri atas belanja modal APBN dan APBD serta peningkatan pembayaran PPh 21 atas belanja pegawai. PDRB pada sektor penyediaan akomodasi makan minum tumbuh positif 9,39% (ctc) yang mempengaruhi pertumbuhan positif penerimaan pajak sektor penyediaan akomodasi makan minum sebesar 1,42% (ctc). Hal yang serupa terjadi pada PDRB sektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh 7,42% (ctc), yang mempengaruhi pertumbuhan positif penerimaan pajak sektor yang sama sebesar 5,93%.

Kontribusi sektor penerimaan pajak memiliki keterkaitan dengan bagaimana struktur ekonomi di Sumsel. Secara kontribusinya, penerimaan pajak hingga akhir tahun 2024 utamanya berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran (20,10%) yang memiliki *share* PDRB 13,85%. Selain itu, penerimaan pajak dari sektor pertambangan dan penggalian juga berperan besar dengan *share* mencapai 19,19%, dimana menyumbangkan 24,60% dari total PDRB Sumsel tahun 2024. Hal yang sama juga dapat terlihat dari sektor industri pengolahan yang menyumbangkan 13,40% memiliki *share* PDRB 18,27%.

Tabel 2.4 Perbandingan PDRB dan Penerimaan Pajak Per Sektor Tahun 2022-2024 (c-to-c)

Sektor / Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB (c-to-c, %)			Share PDRB 2024 (%)	Pertumbuhan Pajak (c-to-c, %)			Share Pajak TA 2024 (%)
	2022	2023	2024		2022	2023	2024	
Pertanian, kehutanan, Perikanan	3,82	2,15	2,59	13,56	26,79	14,14	5,80	8,13
Pertambangan dan Penggalian	6,28	7,89	3,33	24,60	36,66	23,84	2,01	19,19
Industri Pengolahan	4,39	3,69	4,39	18,27	20,62	20,02	-0,08	13,40
Pengadaan Listrik dan Gas	1,46	4,4	8,48	0,13	-22,97	-13,28	37,61	2,63
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,66	0,33	2,66	0,10	10,64	-8,21	35,57	0,31
Konstruksi	1,27	3,55	5,89	10,80	-51,42	33,12	-9,58	2,59
Perdagangan Besar dan Eceran	10,37	7,6	7,42	13,85	14,73	-2,05	5,93	20,10
Transportasi dan Pergudangan	11,63	7,48	3,44	2,50	37,70	14,98	11,13	4,77
Penyediaan Akomodasi Makan Minum	14,67	13,14	9,39	2,01	30,25	18,23	1,42	0,29
Informasi dan Komunikasi	8,12	6,35	8,84	3,00	16,65	-10,07	23,72	0,28

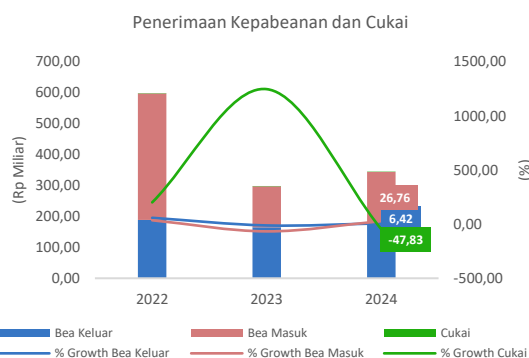
Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,6	4,6	7,09	2,13	17,04	7,13	21,84	5,30
Real Estate	5,23	4,28	8,17	2,94	1,81	-13,99	-1,16	0,51
Jasa Perusahaan	2,9	2,03	5,18	0,11	21,73	34,81	9,79	1,90
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,7	3,73	9,35	2,51	103,03	26,32	14,15	18,15
Jasa Pendidikan	2,24	2,23	6,76	2,15	39,06	-6,36	13,20	0,14
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,15	-0,02	7,34	0,63	60,66	-0,83	-1,29	0,73
Jasa lainnya	2,05	1,95	4,12	0,70	214,01	-64,03	29,48	1,58
PDRB	5,23	5,08	5,03	100	28,33	10,63	7,21	100

Sumber: Kanwil DJP Sumsel dan Babel dan BPS Sumsel (diolah)

3.1.1.2. Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai

Aktivitas ekspor-impor sumsel tumbuh positif, berimplikasi pada penerimaan bea masuk dan keluar yang juga tumbuh positif. Hingga akhir tahun 2024, penerimaan bea keluar mencatatkan realisasi Rp167,72 miliar atau naik 26,76% (yoy), sementara penerimaan bea masuk terealisasi Rp175,19 miliar atau naik 6,42% (yoy) dan menjadi kontributor utama, sementara penerimaan cukai mencapai Rp420,82 juta.

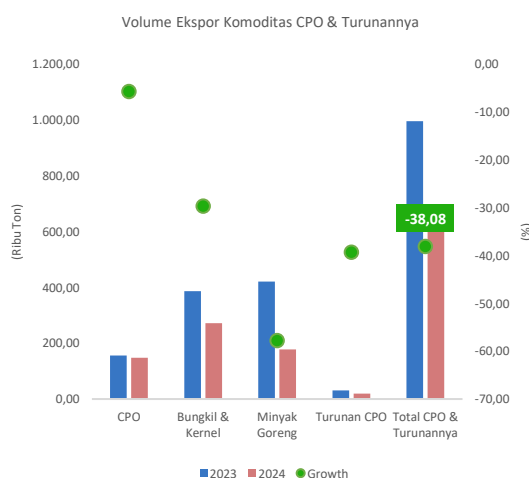
Grafik 2.3. Perkembangan Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai Wilayah Sumatera Selatan (c-to-c)



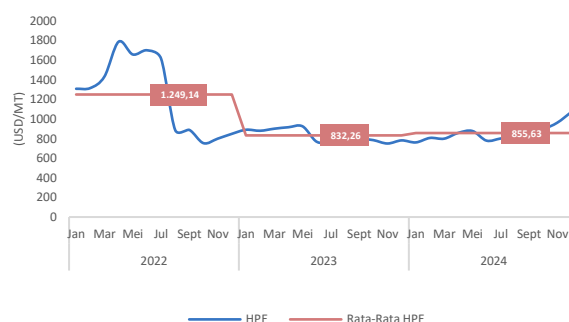
Sumber: Kanwil DJBC Sumbagtim (diolah)

Penerimaan bea keluar tumbuh positif dan tercapai diatas target. Capaian bea keluar hingga akhir tahun 2024 mencapai 105,17% dan tumbuh positif 26,76% (yoy) dipengaruhi oleh peningkatan harga CPO di semester II 2024. Komoditi ekspor yang dikenakan bea keluar s.d. Desember 2024 didominasi Produk CPO, dari beberapa komoditas yang dapat dikenakan bea keluar sesuai PMK 38/2024.

Grafik 2.4. Perkembangan Volume dan Harga Patokan Ekspor CPO & Turunannya



Perkembangan Harga Patokan Ekspor (HPE) CPO & Turunannya



Sumber: Kanwil DJBC Sumbagtim dan Kementerian Perdagangan (diolah)

Meskipun volume ekspor komoditas CPO dan turunannya menurun, meningkatnya harga patokan ekspor mendorong tumbuh positifnya penerimaan bea keluar. Berdasarkan data dari Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur, volume ekspor produk CPO dan turunannya terkontraksi 38,08% (yoy), dari semula 995,47 ribu ton menjadi 616,44 ribu ton. Namun demikian, kenaikan rata-rata Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk produk CPO sebesar 2,81% (yoy) dari USD832,26/MT menjadi USD855,63/MT menjadi faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan positif penerimaan bea keluar di Sumsel. Hal ini pada akhirnya mencatatkan penerimaan bea keluar yang diatas target di akhir tahun 2024.

Tabel 2.5. Realisasi Impor dan Bea Keluar Per Komoditas Tahun 2024

Top 10 Komoditas Impor		Top 10 Komoditas terkena Bea Masuk	
Komoditi	Jumlah (Juta USD)	Komoditi	Jumlah (Rp Miliar)
Mesin	624,46	Serealia	44,68
Reaktor, Turbin, Generator	378,66	Bahan Baku Karet	19,78
Mesin Perkakas	284,68	Mesin	19,39
Pupuk	87,80	Barang Dari Keramik	7,01
Bahan Baku Karet	66,55	Parts Alat Berat	4,87
Serealia	61,51	Parts Mesin	4,49
Mcb, Stop Kontak, Tusuk Kontak	60,25	Baja Lembaran Lapis	4,10
Kayu Kasar	49,81	Produk Olahan Kimia	3,36
Generator	42,25	Alat Elektronik Lainnya	3,29
Tungku Dan Oven	32,89	Kawat	3,10

Sumber: Kanwil DJBC Sumbagtim (diolah)

Aktivitas impor Sumsel yang terus dalam tren pertumbuhan yang tinggi berdampak pada penerimaan bea masuk di Sumsel. Pada akhir tahun 2024, aktivitas impor Sumsel tumbuh 46,90% (yoy) yang berimplikasi pada penerimaan bea masuk yang tumbuh 26,76% (yoy). Penerimaan bea masuk mencapai 102,01% dari target dan menjadi kontributor utama dari total penerimaan kepabeanan dan cukai di wilayah Sumsel di 2024. Impor Sumsel utamanya didorong oleh aktivitas investasi yang dilakukan PT. OKI *Pulp & Paper Mills* yang melakukan impor barang modal berupa mesin untuk peningkatan kapasitas produksi. Hal ini tergambar dari komoditas mesin yang menjadi kontributor utama impor di Sumsel mencapai USD624,46 juta. Meskipun menjadi kontributor utama, impor komoditas mesin di Sumsel mayoritas tidak dikenakan bea masuk. Hal ini terjadi karena sesuai ketentuan pada PMK 188/2015 bahwa impor mesin untuk pengembangan industri dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor.

Penerimaan bea masuk di Sumsel meningkat dikontribusikan dari peningkatan importasi komoditas sereal dan bahan baku karet. Pada tahun 2024, kuota impor beras di Sumsel adalah 105.000 ribu ton (Perum BULOG Sumsel-Babel), yang berkontribusi pada penerimaan bea masuk mencapai Rp44,67 miliar. Selain itu, peningkatan impor bahan baku karet juga turut bersumbangsih pada penerimaan bea masuk mencapai Rp19,77 miliar. Peningkatan impor bahan baku karet disebabkan penurunan produksi karet di Sumsel dan kurangnya bahan baku karet dari lokal yang berkualitas sesuai kebutuhan produksi. Impor bahan baku karet di Sumsel utamanya untuk diolah dan dieskpor kembali sehingga sebagian besar mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).

Penerimaan cukai di Sumsel tidak ditargetkan dan utamanya berasal dari sanksi administrasi cukai (*ultimum remedium*). Hingga akhir tahun 2024, penerimaan cukai mencapai Rp420,82 juta yang berasal dari sanksi administratif penindakan rokok (hasil tembakau) ilegal sebanyak 147.720 batang mencapai Rp 332,7 juta dan denda Minuman Mengandung Etil Alcohol (MMEA) mencapai Rp88,05 juta. Jumlah penerimaan ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp806,69 juta yang mengindikasikan penurunan dalam peredaran rokok (hasil tembakau) dan MMEA ilegal di wilayah Sumsel.

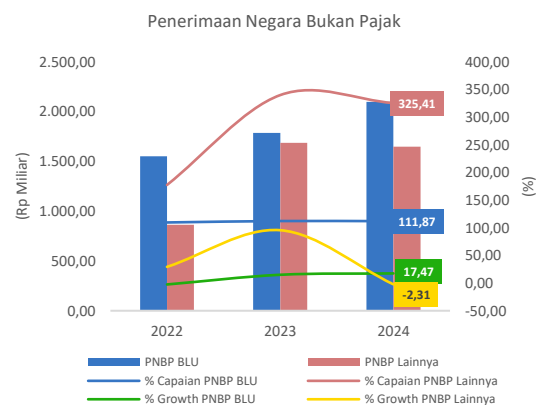
3.1.1.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sumsel tumbuh positif dipengaruhi peningkatan layanan, perbaikan tata kelola, serta inovasi layanan Badan Layanan Umum (BLU) maupun Kementerian/Lembaga (K/L). Hingga akhir tahun 2024, total PNBP di Sumsel terealisasi Rp3,74 triliun (157,29% dari target) atau tumbuh positif 7,86% (yoy). Berdasarkan jenisnya, PNBP BLU mencatatkan realisasi sebesar Rp2,09 triliun (111,87% dari target) dan tumbuh positif 17,47% (yoy). PNBP BLU berkontribusi lebih besar dengan *share* 55,99% dibandingkan PNBP Lainnya yang berkontribusi 44,01% dari total PNBP Sumsel. PNBP Lainnya mencatatkan penerimaan mencapai Rp1,64 triliun (325,41% dari target).

PNBP BLU utamanya dikontribusi dari PNBP jasa pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jasa pelayanan barang dan jasa lainnya. Pada tahun 2024, jasa pelayanan kesehatan mencatatkan realisasi sebesar Rp1,21 triliun atau tumbuh positif 22,22% (yoy) berasal dari semakin meningkatnya kinerja layanan dari BLU Rumah Sakit, utamanya dari RSMH Palembang sebagai rumah sakit rujukan tingkat pusat. PNBP

Jasa Pelayanan Kesehatan RSMH diatas target mencapai Rp1 triliun. Selanjutnya, PNBP jasa pelayanan pendidikan mencatatkan realisasi mencapai Rp706,85 miliar dan tumbuh positif 3,35% (yoy) berasal dari meningkatnya jumlah peserta didik dan kinerja layanan dari BLU Perguruan Tinggi utamanya dari Universitas Sriwijaya yang mencatatkan PNBP jasa layanan pendidikan mencapai Rp419,49 miliar. Selain itu, PNBP jasa pelayanan barang dan jasa lainnya juga mencatatkan realisasi mencapai Rp38,36 miliar dan tumbuh positif 30,73% (yoy) utamanya berasal dari meningkatnya jumlah pengguna layanan khususnya jumlah penumpang LRT Sumsel, yang berdampak pada meningkatnya PNBP jasa lainnya pada BPKARS mencapai Rp29,15 miliar.

Grafik 2.5. Realisasi Per Jenis PNBP Sumsel (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

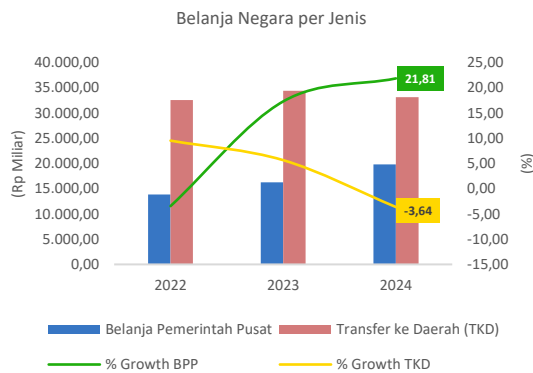
PNBP Lainnya utamanya dikontribusi dari PNBP di lingkungan Kementerian Perhubungan, Kepolisian RI, dan Kementerian Hukum dan HAM. Pada tahun 2024, PNBP pada Kementerian Perhubungan di Sumsel mencatatkan realisasi mencapai Rp210,69 miliar dan tumbuh positif 15,70% (yoy) berasal dari meningkatnya aktivitas bongkar muat di pelabuhan Boom Baru yang berdampak pada peningkatan pendapatan jasa kepelabuhanan pada KSOP Kelas I Palembang. Selanjutnya, PNBP pada kepolisian mencatatkan realisasi Rp117,23 miliar dan tumbuh positif 0,23% (yoy) berasal dari meningkatnya pendapatan BPKB dan STNK dipengaruhi peningkatan jumlah kendaraan bermotor, digitalisasi dan kemudahan layanan, serta efektivitas penegakan hukum dan administrasi. Selain itu, PNBP pada Kementerian Hukum dan HAM juga mencatatkan realisasi Rp43,01 miliar dan tumbuh positif 14,21% (yoy) utamanya berasal dari meningkatnya pendapatan paspor dipengaruhi meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk melakukan perjalanan ke luar negeri baik *travelling* maupun ibadah umroh.

3.1.2. Belanja Negara

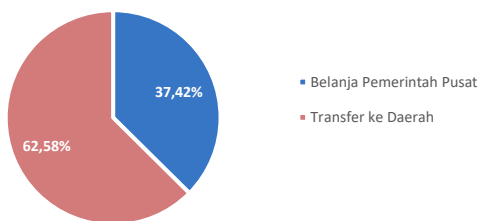
Belanja negara yang tumbuh positif, berdampak pada kondisi pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) yang juga menunjukkan tren peningkatan di Sumsel. Hingga akhir tahun 2024, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp52,88 triliun dengan realisasi pada belanja pemerintah pusat (BPP) Rp19,79 triliun dan TKD Rp33,09 triliun. Dari sisi BPP menunjukkan kinerja yang positif dimana tumbuh 4,53% (yoy), namun dari sisi TKD menunjukkan sedikit kontraksi 3,64% (yoy). Mencermati kondisi belanja negara yang tumbuh positif, BPS mencatatkan bahwa konsumsi pemerintah di wilayah Sumsel tumbuh sebesar 8,38% (ctc) di 2024. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kinerja BPP dan TKD di Sumsel. Selain itu, mengingat utamanya belanja daerah dibiayai dari TKD, maka

belanja negara melalui BPP dan TKD berperan krusial dalam menggerakkan ekonomi Sumsel melalui PKP.

Grafik 2.6. Perkembangan dan Kontribusi Realisasi Belanja Negara Wilayah Sumatera Selatan (c-to-c)



Kontribusi Belanja Negara Tahun 2024



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Belanja negara di Sumsel utamanya dimanfaatkan untuk mendukung APBD melalui penyaluran TKD. Hal ini terlihat dari proporsi realisasi belanja TKD pada tahun 2024 di Sumsel yang memiliki *share* 62,58% dari total belanja negara. Sementara itu, realisasi BPP berkontribusi sebesar 37,42% dari total belanja negara. Baik BPP maupun TKD, keduanya mencatatkan capaian belanja yang optimal di 2024 dengan BPP mencapai 93,59% dari pagu dan TKD mencapai 98,81% dari pagu. Baiknya capaian dan pertumbuhan belanja TKD diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah untuk membiayai belanjanya dan melaksanakan program dan kegiatan di daerah yang dapat memberikan *multiplier effect* yang tinggi bagi perekonomian.

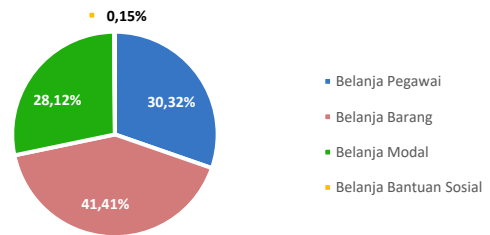
3.1.2.1. Belanja Pemerintah Pusat (BPP)

Mencermati bahwa adanya agenda pemilu, penyelesaian proyek strategis, kenaikan gaji pokok ASN, dan pemberian THR dan Gaji 13 mendorong kinerja seluruh jenis BPP di Sumsel. Hal ini menjadi pendorong utama dari tumbuh positifnya realisasi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal di Sumsel. Sementara, belanja bantuan sosial tumbuh positif dipengaruhi kenaikan penyaluran bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di wilayah Sumsel. Melalui peningkatan belanja pegawai, barang, bantuan sosial, pemerintah pusat di Sumsel berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam pembentukan PKP. Sementara itu, peningkatan belanja modal berdampak terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Sumsel.

Berdasarkan jenisnya, realisasi BPP berkontribusi dari belanja pegawai dan barang. Realisasi belanja pegawai berkontribusi 30,32% dari total BPP Sumsel. Sejalan dengan itu, realisasi belanja barang juga berkontribusi besar bagi total BPP Sumsel dengan *share* 41,41%. Sementara itu, belanja modal yang diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* tinggi cenderung masih relatif rendah yang berkontribusi 28,12% dari total BPP. Meskipun realisasi belanja modal tumbuh tinggi

dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi *progress* penyelesaian PSN namun capaiannya tergolong rendah dimana mencapai 88,23% dari pagu. Di sisi lain, belanja bantuan sosial berkontribusi 0,15% dari total BPP yang dipergunakan dalam rangka perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan di Sumsel.

Grafik 2.7. Kontribusi Belanja Pemerintah Pusat per Jenis



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Belanja pegawai Sumsel tumbuh positif dan berperan krusial mendukung peningkatan produktivitas ASN serta melanjutkan proses reformasi birokrasi. Untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas maka kebijakan belanja pegawai diarahkan untuk meningkatkan kualitasnya dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi ASN melalui pemberian kenaikan gaji pokok, gaji 13, dan THR. Realisasi belanja pegawai di Sumsel mencapai Rp6,00 triliun dan tumbuh positif 15,45% (yoy). Capaian dari belanja pegawai tersebut optimal karena sudah mencapai 100,73% dari pagu. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja pegawai utamanya dipengaruhi pembayaran kenaikan gaji pokok ASN di tahun 2024 sebesar 8% sesuai Perpres 10/2024, pembayaran gaji 13 dan THR ASN sesuai PP 14/2024 (Komponen tunjangan kinerja dibayarkan 100% di tahun 2024, dimana di 2023 dibayarkan 50%), serta meningkatnya pembayaran belanja pegawai PPPK yang dipengaruhi singnifikansi pengangkatan PPPK pada kantor vertikal Kementerian/Lembaga di Sumsel.

Grafik 2.8. Perkembangan Belanja Pegawai

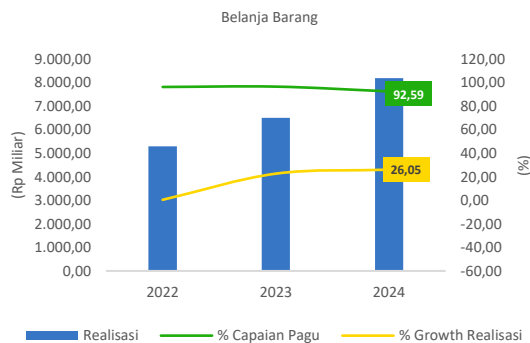


Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Belanja barang Sumsel tumbuh positif dan berperan strategis mendukung kegiatan operasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung program prioritas. Realisasi belanja barang di Sumsel meningkat 26,05% (yoy) dipengaruhi oleh pembayaran penyelenggaraan dan pengawasan pemilu dan pilkada di 2024, pembayaran dukungan layanan satker K/L di Sumsel, dan pelaksanaan program infrastruktur konektivitas. Hingga akhir tahun 2024, realisasi belanja barang mencapai Rp8,19 triliun atau 92,59% dari pagu. Pemanfaatan dari belanja barang utamanya digunakan untuk operasional layanan kesehatan, layanan pendidikan tinggi, pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024, penyelenggaraan layanan kereta api perintis dan operasional perkantoran lainnya. Capaian realisasi yang berada di angka

92,59% salah satunya dipengaruhi adanya *self-blocking* anggaran belanja perjalanan dinas sebesar 50% sesuai instruksi Presiden dan Menteri Keuangan terkait efisiensi belanja akhir tahun 2024.

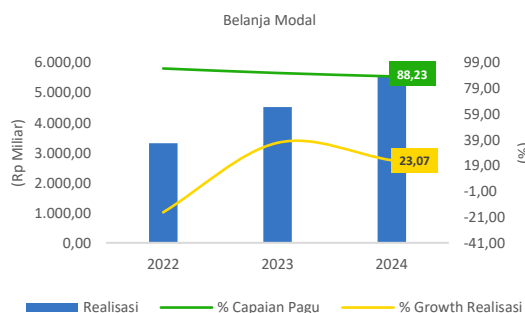
Grafik 2.9. Perkembangan Belanja Barang



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Belanja modal Sumsel tumbuh positif dan dipertajam pemanfaatannya untuk mendukung reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi. Untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan mendukung transformasi ekonomi tersebut, realisasi belanja modal Sumsel meningkat 23,07% (yoy) untuk mendorong peningkatan akses terhadap layanan dasar (infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan) dan konektivitas di Sumsel. Hingga akhir tahun 2024, realisasi belanja modal mencapai Rp5,56 triliun atau 88,23% dari pagu. Peningkatan realisasi belanja modal di Sumsel utamanya dipengaruhi realisasi pengeluaran pemerintah untuk beberapa PSN yang telah selesai seperti pembangunan jalan TOL Betung Tempino, Daerah Irigasi Lematang dan Lempuing. Capaian realisasi belanja modal yang berada di angka 88,23% dipengaruhi adanya blokir anggaran pada proyek-proyek yang bersifat multiyears sehingga di-*carry over* ke 2025 maupun adanya penggunaan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) atas pekerjaan yang belum selesai sehingga realisasi belum tercatat karena masih menunggu pengajuan SPM realisasi hingga Maret 2025.

Grafik 2.10. Perkembangan Belanja Modal

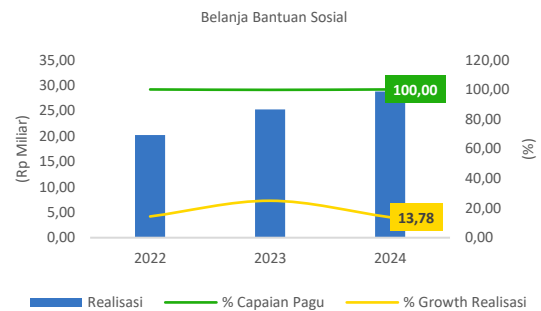


Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Belanja bantuan sosial Sumsel tumbuh positif dan terus dijaga agar tetap optimal dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Hingga akhir tahun 2024, realisasi belanja bantuan sosial mencapai Rp28,73 miliar (100% dari pagu) dan tumbuh positif 13,78% (yoy). Capaian realisasi belanja bantuan sosial telah optimal karena telah mencapai 100% dari pagu. Pertumbuhan belanja bantuan sosial terjadi dipengaruhi meningkatnya jumlah mahasiswa miskin/rentan miskin penerima KIP Kuliah di 2024 yaitu menjadi 2.329 dimana semula di 2023 1.729 penerima.

Capaian realisasi belanja bansos optimal untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan melalui kegiatan ATENSI maupun program KIP Kuliah di Sumsel yang mencapai 100% dari pagu.

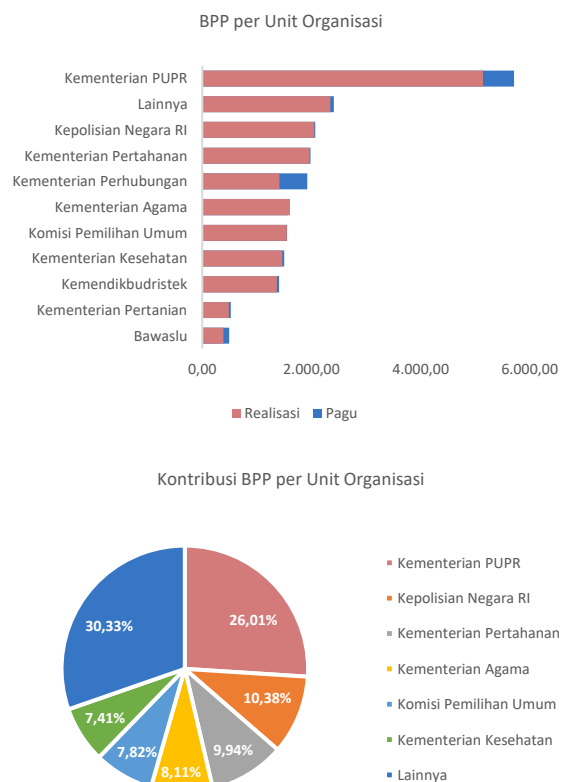
Grafik 2.11. Perkembangan Belanja Bantuan Sosial



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Berdasarkan unit organisasi, BPP di Sumsel utamanya dikontribusi oleh aktivitas belanja pada Kementerian PUPR. Realisasi belanja Kementerian PUPR mencapai Rp5,14 triliun atau menyumbangkan 30,33% dari total BPP Sumsel di 2024. Selain menjadi kontributor utama, capaian belanja Kementerian PUPR juga cukup optimal dengan persentase 90,10% dari pagu dipengaruhi oleh utamanya realisasi belanja pada Kementerian PUPR adalah berupa pekerjaan konstruksi dengan penyelesaian kontrak hingga akhir tahun, sehingga signifikan terealisasi di triwulan IV 2024.

Grafik 2.12. Realisasi dan Kontribusi BPP per Unit Organisasi



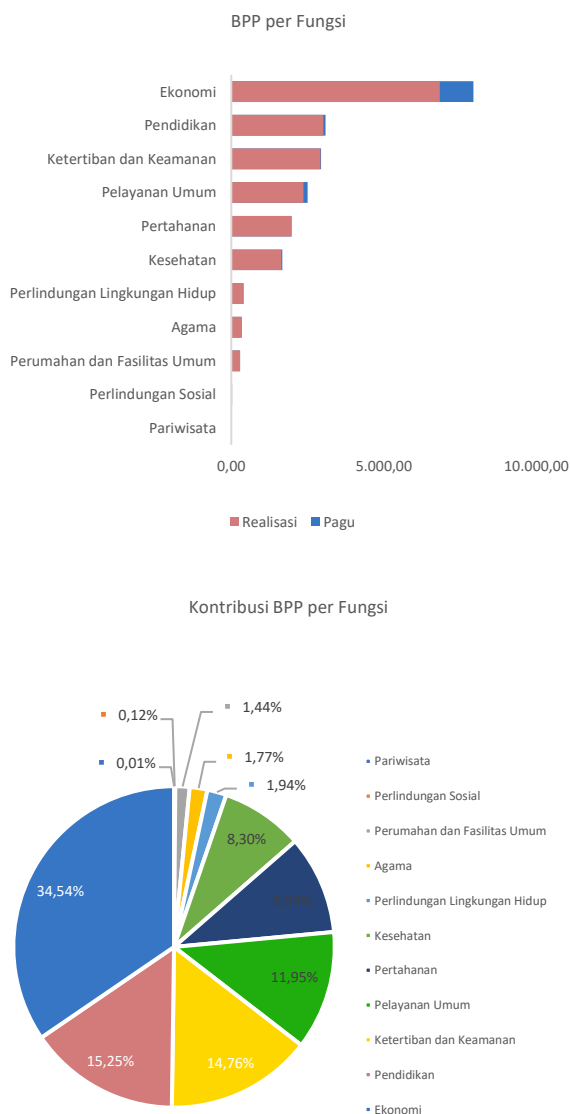
Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Ditinjau dari capaiannya, aktivitas belanja pada Kepolisian Negara RI, Kementerian Pertahanan, dan Komisi Pemilihan Umum menunjukkan kinerja optimal meski mengalami peningkatan pagu atas hibah daerah dalam rangka pilkada 2024 di Sumsel. Belanja pada tiga unit organisasi tersebut

meningkat signifikan di triwulan IV 2024 dimana digunakan untuk dukungan penyelenggaraan pilkada yang diselenggarakan pada 27 November 2024 dalam proses konsolidasi demokrasi di Sumsel.

Berdasarkan fungsi, BPP di Sumsel utamanya berkontribusi dari belanja fungsi ekonomi. Realisasi belanja fungsi ekonomi mencapai Rp6,83 triliun atau menyumbangkan 34,54% dari total BPP Sumsel di 2024. Meskipun menjadi kontributor utama, capaian belanja fungsi ekonomi relatif belum optimal dengan persentase capaian 86,12% dari pagu dipengaruhi serapan pada belanja subfungsi pengairan dan transportasi yang belum optimal. Hal ini disebabkan belanja subfungsi pengairan berkaitan dengan beberapa PSN seperti Bendungan Tiga Dihaji yang realisasinya belum optimal (76,22%) karena adanya 2 paket pekerjaan yang membutuhkan waktu cukup panjang sehingga penyerapan tidak maksimal sehingga memerlukan rekomposisi dan semula akan dilakukan proses revisi DIPA antar Eselon I namun belum mendapat persetujuan DPR RI.

Grafik 2.13. Realisasi dan Kontribusi BPP per Fungsi



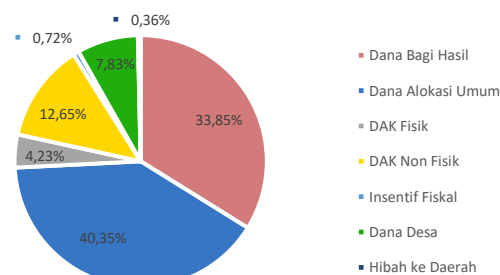
Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Ditinjau dari capaiannya, realisasi belanja hingga akhir tahun 2024 pada fungsi lainnya selain ekonomi menunjukkan kinerja yang optimal karena telah mencapai lebih dari 90% pagu. Belanja pada fungsi agama mencapai Rp350,82 miliar utamanya dilaksanakan untuk dukungan manajemen dalam rangka peningkatan kehidupan beragama, pelayanan keagamaan lainnya, dan litbang. Selanjutnya belanja pada fungsi kesehatan mencapai Rp1,64 triliun utamanya digunakan untuk program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, pelayanan kesehatan dan JKN, pengawasan obat dan makanan, serta pencegahan dan pengendalian penyakit. Dari sisi belanja pada fungsi pelayanan umum, realisasinya mencapai Rp2,36 triliun utamanya digunakan untuk penyelenggaraan dan pengawasan pemilu, penyediaan informasi statistik, pemeriksaan keuangan negara, pengawasan pembangunan, pengelolaan penerimaan negara, perencanaan pembangunan nasional, kebijakan, pembinaan profesi, dan tata kelola ASN, penyiaran publik, pengelolaan perbendaharaan negara, kekayaan negara dan risiko, serta pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa.

3.1.3. Transfer ke Daerah (TKD)

Kinerja realisasi TKD di Sumsel tumbuh positif untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumsel. Hingga akhir tahun 2024, realisasi TKD mencapai Rp33,09 triliun dan sedikit menurun 3,64% (yoy). Dari sisi capaiannya mencatatkan kinerja yang optimal dimana mencapai 98,81% dari pagu dalam mendukung APBD Sumsel. Hal ini utamanya dipengaruhi oleh percepatan pemenuhan syarat salur pemda, pemdes, maupun unit terkait pada penyaluran dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dana desa, dan dana alokasi khusus (DAK) non fisik.

Grafik 2.14. Kontribusi Transfer ke Daerah per Jenis



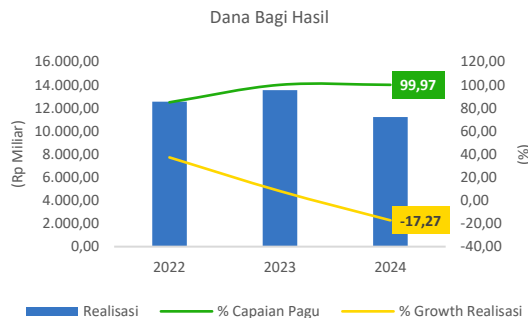
Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Berdasarkan jenisnya, TKD di Sumsel didominasi oleh penyaluran DAU. Realisasi DAU mencapai 40,35% dari total realisasi TKD Sumsel di 2024. Hal ini lumrah terjadi sebab alokasi DAU selalu menjadi yang paling tinggi sejalan dengan kebijakan *hold harmless* sampai 2027 yang mengharuskan alokasi DAU tidak akan berkurang dari tahun sebelumnya. Selain itu, penyaluran DAU *block grant* yang dilakukan setiap bulan sesuai rekomendasi salur sebesar 1/12 dari pagu tahunan, menjadi pendorong realisasi DAU lebih cepat dari jenis TKD lainnya yang lebih dipengaruhi oleh kecepatan pemda/pemdes dalam memenuhi syarat salur sesuai batas waktu.

Penyaluran DBH Sumsel optimal dan berperan penting mengurangi *vertical imbalance*, menanggulangi eksternalitas negatif, serta meningkatkan pemerataan di Sumsel. Hingga akhir tahun 2024, realisasi DBH mencapai Rp11,20 triliun (99,97% dari pagu) dan berkontraksi 17,27% (yoy). Capaian

tersebut menurun dipengaruhi lebih rendahnya alokasi di 2024 karena menurunnya pendapatan pajak pusat di 2023 dipengaruhi moderasi harga komoditas, dibandingkan tahun 2022 yang mengalami *windfall* komoditas.

Grafik 2.15. Perkembangan Dana Bagi Hasil



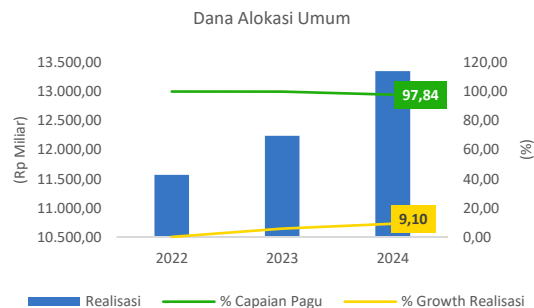
Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Meskipun penyaluran DBH dari segi capaiannya telah optimal, terdapat isu pelaksanaan penyaluran DBH yang terjadi di Sumsel. Pertama, permasalahan keterlambatan penyelesaian rekonsiliasi pajak pusat antara pemda dan kantor vertikal Direktorat Jenderal Pajak di wilayahnya berakibat pada penundaan salur DBH Pajak (PPH Pasal 21, PPh Pasal 25/29 OP, Panas Bumi dan PBB Migas). Beberapa penyebab permasalahan ini yaitu belum optimalnya implementasi kanal 7020 bagi setoran pajak pemda, kurang kooperatifnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses rekonsiliasi, maupun kebijakan kantor pelayanan pajak (KPP) di wilayahnya yang mengharuskan penyelesaian rekonsiliasi pajak secara berurutan. Beberapa pemda yang mengalami permasalahan keterlambatan penyelesaian rekonsiliasi pajak adalah Kota Palembang, Kota Prabumulih, serta Provinsi Sumatera Selatan. Kedua, realisasi DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) rendah bahkan tidak tersalur di beberapa pemda. Hal ini disebabkan alokasinya yang tidak terlalu besar, namun DBH ini termasuk DBH *Earmark* sehingga apabila pemda akan melaksanakan kegiatan peruntukan yang dibiayai dari CHT untuk kesehatan masyarakat, penegakan hukum, dan kesehatan, maka pemda perlu mengalokasikan dana pendamping tambahan dari APBD. Ketiga, kendala teknis pada fitur aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI karena kesalahan input data pajak sehingga berakibat selisih saat rekonsiliasi dengan KPP. Serta, terakhir adalah isu terkait kurangnya pemahaman pemda terkait kebijakan penyaluran DBH Kurang Bayar melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF). Beberapa permasalahan tersebut berpengaruh pada efektivitas penyaluran DBH di Provinsi Sumsel yang digunakan untuk mendukung pendanaan APBD.

Penyaluran DAU Sumsel tumbuh positif dan digunakan untuk menjaga pemerataan keuangan daerah dan memperkuat kebijakan penggunaan yang telah ditentukan untuk memperbaiki kualitas layanan publik dan mendukung penggajian PPPK di Sumsel. Hingga akhir tahun 2024, realisasi DAU mencapai Rp13,35 triliun dan meningkat 9,10% (yoy). Capaian realisasinya pun mencatatkan kinerja yang optimal dimana tercapai 97,84% dari pagu. Pertumbuhan positif realisasi DAU utamanya didorong Capaian tersebut terutama berkontribusi dari kenaikan pagu maupun realisasi DAU *Block Grant* sejalan dengan kebijakan *hold harmless* sampai tahun 2027 yang mengharuskan alokasi DAU tidak akan berkurang dari tahun sebelumnya.

Meskipun penyaluran DAU dari segi capaiannya sudah baik dan dalam tren positif, terdapat isu pelaksanaan penyaluran

Grafik 2.16. Perkembangan Dana Alokasi Umum

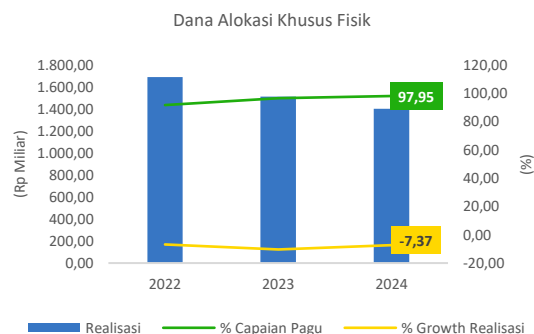


Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

DAU yang terjadi di Sumsel. Terjadinya gagal salur DAU pendanaan kelurahan dipengaruhi kesulitan kantor kelurahan dalam merealisasikan dana tersebut. Hal ini terjadi disebabkan karena masih terbatasnya kapasitas SDM di kelurahan untuk mengelola DAU Pendanaan Kelurahan. Selain itu, adanya ketakutan kantor kelurahan terhadap kemungkinan diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum (APH) menjadi faktor penahan kesulitan merealisasikan dana tersebut, sehingga pada akhirnya terjadi gagal salur DAU Pendanaan Kelurahan di salah satu pemda yaitu Kota Palembang. Selain itu, realisasi DAU penggajian PPPK juga belum optimal di beberapa pemda dipengaruhi keterlambatan pengangkatan pegawai sehingga DAU penggajian PPK tidak dapat disalurkan. Di sisi lain, masih terdapat juga kendala terkait penundaan penyaluran DAU akibat keterlambatan laporan realisasi belanja pegawai di beberapa pemda di Sumsel.

Penyaluran DAK Fisik Sumsel berkontraksi dipengaruhi lebih rendahnya alokasi di tahun 2024 dipengaruhi lebih rendahnya nilai rencana kegiatan pemda yang disetujui K/L teknis. Hingga akhir 2024, realisasi DAK Fisik mencapai Rp1,40 triliun (97,95% dari pagu) dan turun 7,37% (yoy). Terlambatnya terbit peraturan pengelolaan DAK Fisik yang baru berlaku akhir April 2024 juga menjadi faktor penyebab capaian realisasi DAK Fisik kurang optimal dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, faktor-faktor penahan lainnya seperti penyelesaian perekaman dan persetujuan data kontrak yang mendekati batas akhir, penyaluran DAK Fisik bidang pendidikan dan kesehatan KB yang sebagian besar menggunakan mekanisme sekaligus rekomendasi, penyampaian syarat salur mendekati syarat salur, belum adanya norma waktu *reviu* dokumen oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta koordinasi internal pemda dan peran BPKAD yang kurang optimal menjadi penghambat realisasi penyaluran DAK Fisik di 2024.

Grafik 2.17. Perkembangan Dana Alokasi Khusus Fisik

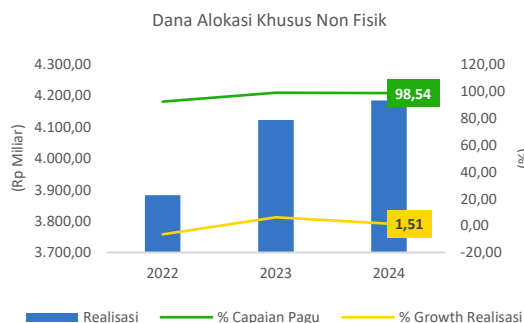


Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Penyaluran DAK Non Fisik Sumsel tumbuh positif dan digunakan untuk bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) dan tunjangan guru, serta peningkatan pelayanan kesehatan pada Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) primer.

Hingga akhir 2024, realisasi DAK Non Fisik mencapai Rp4,18 triliun (98,54% dari pagu) dan tumbuh positif 1,51% (yoy). Capaian tersebut dikontribusikan dari meningkatnya penyaluran dana BOSP, BOK Puskesmas, serta DAK Non Fisik lainnya seperti BOK Dinas, TPG, Tamsil, dan TKG ASN Guru Daerah. Adanya retur dana BOSP dikarenakan rekening inaktif/dormant, khususnya rekening satuan pendidikan pada BPD Sumsel Babel juga menjadi penahan dalam penyaluran DAK Non Fisik di Sumsel.

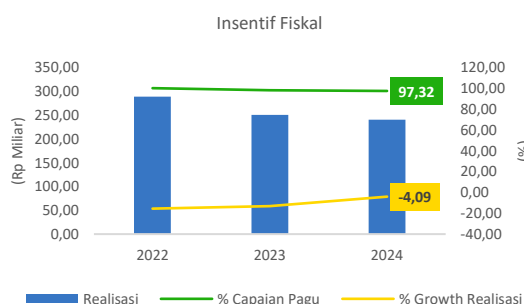
Grafik 2.18. Perkembangan Dana Alokasi Khusus Non Fisik



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Penyaluran Insentif Fiskal tercapai optimal di tahun 2024. Hingga akhir 2024, realisasi insentif fiskal mencapai Rp239,91 miliar (233,91% dari pagu) dan tumbuh negatif 4,09% (yoy). Realisasi insentif fiskal menurun disebabkan di 2024 hanya diberikan insentif fiskal tahun berjalan terkait pengendalian inflasi untuk 1 periode, dimana di tahun sebelumnya diberikan dalam 3 periode. Atas kinerja tahun anggaran berjalan, terdapat 3 pemda di Sumsel yang memperoleh insentif fiskal atas kinerja dalam pengendalian inflasi tahap I yaitu Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawas, dan Kab. Banyuasin. Total sebesar Rp18,20 miliar adalah pagu insentif fiskal atas kinerja pengendalian fiskal, dan seluruhnya telah tersalur pada di 2024 2024. Selain kinerja atas pengendalian inflasi, terdapat juga insentif fiskal atas kinerja kesejahteraan masyarakat yang diberikan kepada 14 pemda di Sumsel dengan total sebesar Rp154,83 miliar dan seluruhnya telah tersalur kecuali pada pemda pemerintah kota Lubuk Linggau yang tidak tersalur insentif fiskal tahap II karena keterlambatan penyampaian laporan penggunaan tahap I yang melebihi tanggal ketentuan batas pemenuhan syarat salur.

Grafik 2.19. Perkembangan Insentif Fiskal

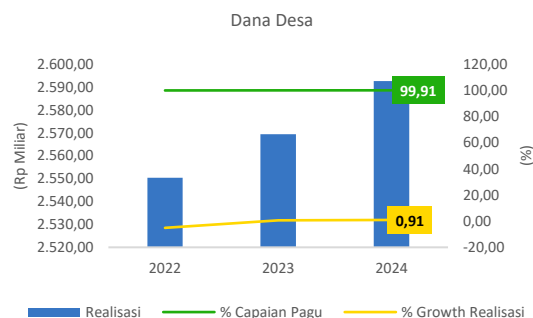


Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Penyaluran Dana Desa Sumsel tumbuh positif dan optimal 2024. Hingga akhir 2024, realisasi dana desa mencapai Rp2,59 triliun (99,91% dari pagu) dan tumbuh positif 0,91% (yoy). Hal ini didorong oleh perubahan kebijakan penyaluran dana desa di 2024 yang disalurkan dalam 2 tahap, dimana di tahun sebelumnya disalurkan dalam 3 tahap. Selain itu, faktor utamanya juga didorong oleh desa-desa di Sumsel lebih cepat menyampaikan syarat salur sejak awal tahun 2024. Penyaluran

dana desa berjalan secara optimal di setiap tahapan mulai dari tahap I, II, hingga tambahan dana desa di Sumsel. Dari 2.855 desa yang mendapatkan dana desa, sebanyak 566 desa berkinerja baik dan memperoleh insentif/ tambahan dana desa dengan total mencapai Rp73,49 miliar.

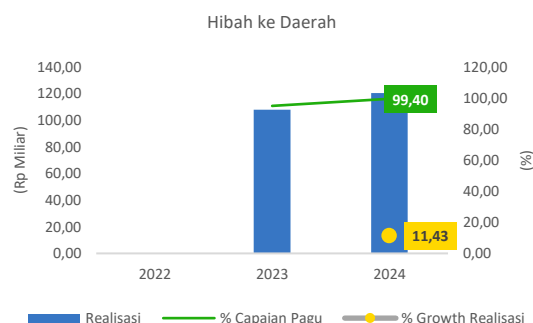
Grafik 2.20. Perkembangan Dana Desa



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Meskipun penyaluran dana desa dari segi capaiannya sudah baik dan dalam tren positif, terdapat isu pelaksanaan penyaluran dana desa yang terjadi di Sumsel. Keterjadian gagal salur dana desa terjadi di Sumsel dalam 5 tahun terakhir dengan faktor yang didominasi oleh kasus hukum penyalahgunaan dana desa. Pada tahun 2024, terdapat satu desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang gagal salur dana desa karena kasus hukum (penyalahgunaan dana desa). Selain itu, beberapa desa lainnya juga gagal salur karena permasalahan sengketa dengan Badan Permusyawaratan Desa, sedang dalam pemeriksaan audit inspektorat daerah, maupun kepala desa yang menghilang sehingga tidak dapat memenuhi syarat salur tahap II. Keterlambatan penyusunan Peraturan Desa mengenai APBDesa juga ditemui kendala disebabkan desa menunggu alokasi definitif dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD ditetapkan kepala daerah. Keraguan desa menggunakan pagu ADD proyeksi, mengakibatkan penyusunan APBDesa terlambat dan menjadi penghambat akselerasi penyaluran dana desa pada desa-desa tersebut. Selain itu, beberapa desa juga mengalami retur diakibatkan oleh perubahan rekening kas desa yang tidak dilaporkan ke KPPN.

Grafik 2.21. Perkembangan Hibah ke Daerah



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

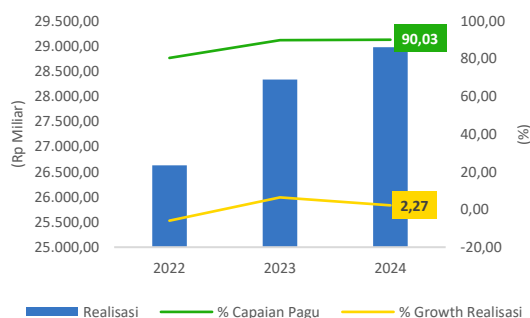
Hibah ke Daerah Sumsel mendukung pembangunan fisik dan layanan publik untuk peningkatan layanan infrastruktur dasar. Hingga akhir 2024, realisasi hibah ke daerah mencapai Rp120,16 miliar (99,40% dari pagu) dan tumbuh 11,43% (yoy). Hibah ke daerah tahun 2024 di Sumsel digunakan untuk membiayai program instalasi pengolahan air limbah untuk kota Palembang/ *Palembang City Sewerage Project (PCSP)* yang dibiayai dari hibah luar negeri dari pemerintah Australia dan hibah sanitasi untuk air limbah setempat dan terpusat yang berasal dari penerimaan dalam negeri (Rupiah Murni).

Selain itu, hibah juga digunakan untuk pembangunan sanitasi untuk air limbah setempat dan terpusat yang berasal dari penerimaan dalam negeri (Rupiah Murni). Secara prosedur, hibah ke daerah bersifat *reimbursement* sehingga pemerintah daerah melaksanakan kegiatan terlebih dahulu dengan dana APBD (*prefinancing*), kemudian setelah kegiatan selesai dan diverifikasi teknis oleh K/L barulah dapat diajukan *reimbursement* oleh daerah kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk).

3.1.4. Surplus/Defisit

Defisit APBN Sumsel tumbuh positif dan diarahkan untuk mendukung kelanjutan konsolidasi fiskal dan akselerasi transformasi ekonomi. Pada tahun 2024, defisit APBN Sumsel tercatat mencapai Rp28,97 triliun (90,03% dari target) atau tumbuh 2,27% (yoy). Pertumbuhan tersebut terjadi sebagai dampak dari kebijakan fiskal yang ekspansif dimana kinerja realisasi belanja pemerintah pusat dan TKD lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan terus diakselerasi untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan masyarakat, dan akselerasi transformasi ekonomi di Sumsel.

Grafik 2.22. Perkembangan Defisit APBN Sumsel



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

3.1.5. Pengelolaan BLU Pusat

Berdasarkan PMK Nomor 202/PMK.05/2022, Badan Layanan Umum (BLU) beroperasi sebagai unit kerja Kementerian/Lembaga untuk tujuan memberikan layanan umum, dengan demikian BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Kementerian Negara/Lembaga. Layanan BLU juga dapat diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang mendukung stabilisasi ekonomi dan fiskal. Pada tahun 2024 tidak terdapat penambahan satker BLU, sampai dengan akhir tahun 2024 terdapat 12 BLU yang terdiri dari 5 BLU rumpun kesehatan, 6 BLU rumpun pendidikan, dan 1 BLU rumpun lainnya. Realisasi pendapatan BLU pada tahun 2024 mencapai 111,21% dari target PNBPN yang telah ditetapkan sebagaimana dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 2.6. Realisasi PNBPN BLU 2024 (Rp Miliar)

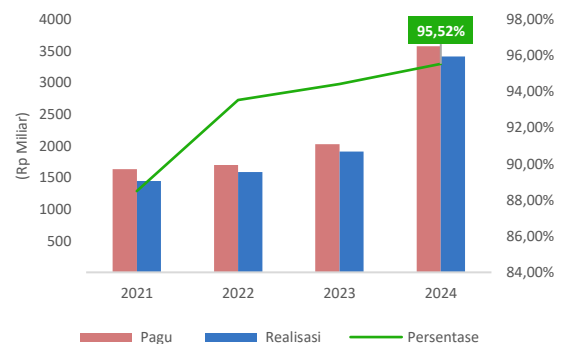
Nama Satker	Target PNBPN	Realisasi	%
RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang	940,00	1.030,04	110%
RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang	31,20	34,22	110%
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang	19,80	26,06	132%
Rumkit Tk.II Dr Ak Gani Kesdam Ii/Swj	83,00	81,14	98%
Rumkit Bhayangkara Palembang	55,70	73,92	133%
Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	28,34	27,70	98%
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	118,34	124,50	105%

Nama Satker	Target PNBPN	Realisasi	%
Universitas Sriwijaya	409,53	502,57	123%
Politeknik Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan Palembang	24,93	27,57	111%
Politeknik Penerbangan Palembang	15,30	16,54	109%
Politeknik Kesehatan Palembang	42,23	47,34	112%
Politeknik Negeri Sriwijaya	105,76	110,11	104%
Total	1.874,12	2.101,71	112%

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Dari total alokasi APBN 2024 pada DIPA satker BLU tersebut, 59,76% dibiayai dari pendapatan BLU, yang berarti secara total hanya 38,96% yang bersumber dari rupiah murni. Realisasi belanja tahun 2024 dengan sumber dana BLU mencapai 96,49% dari pagu. Adapun tren pagu dan realisasi belanja dengan sumber dana BLU dapat dilihat pada tabel/grafik berikut

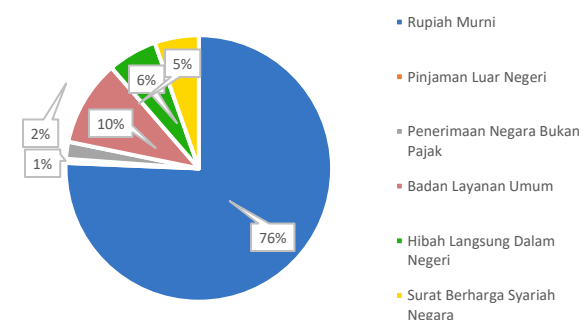
Grafik 2.23. Tren Realisasi Belanja Satker BLU di Sumsel



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Kontribusi dari realisasi belanja BLU terhadap total belanja pemerintah pusat tahun 2024 merupakan yang terbesar kedua setelah rupiah murni sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini.

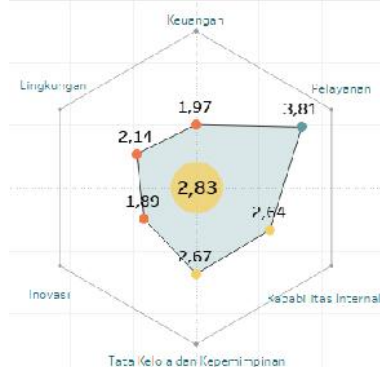
Grafik 2.24. Proporsi Sumber Dana Belanja 2024



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Pendapatan BLU yang bertransmisi ke belanja BLU tersebut turut berkontribusi mendorong bergerakaknya sektor riil di Sumatera Selatan dan pada akhirnya turut mendorong pertumbuhan ekonomi Sumsel ke angka 5,03%. Selanjutnya terkait tingkat kematangan BLU, berdasarkan data pada aplikasi BLU Integrated Online System (BIOS), secara rata-rata terdapat peningkatan nilai *maturity rating* (matrat) dari tahun 2022 ke tahun 2023 yang menggambarkan peningkatan nilai maturitas/kematangan BLU di Sumatera Selatan.

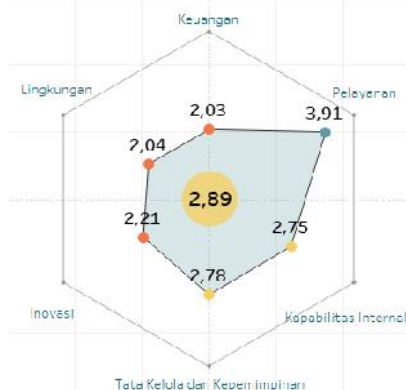
Grafik 2.25. Nilai Maturity Rating Satker BLU Tahun 2022



Sumber: Dit. PPKBLU, DJPb (diolah)

Apabila melihat nilai rata-rata setiap aspek matrat Tahun 2022 dan 2023, terdapat peningkatan nilai rata-rata pada aspek Pelayanan, Keuangan, Inovasi, Tata Kelola, dan kapabilitas internal, namun terjadi penurunan nilai rata-rata pada Aspek Lingkungan, Tingkat Kemandirian yang merupakan salah satu indikator dalam aspek lingkungan pada penilaian matrat ini dilihat dari Persentase Penggunaan Sumber Daya. Dari 10 BLU yang sudah mendapat penetapan nilai matrat tahun 2023 didapatkan nilai rata-rata 2,6 untuk *Environmental Footprint Management* yang berarti BLU di Sumsel beum memiliki standar dan/atau prosedur yang mengatur sistem atau metode pengelolaan *environmental footprint* secara terjadwal. Sedangkan untuk Penggunaan Sumber Daya yang merupakan salah satu indikator pada aspek lingkungan mendapatkan nilai rata-rata 1,7 yang menunjukkan bahwa BLU di Sumsel belum melakukan efisiensi penggunaan sumber daya dengan baik. Dengan Pelaksanaan Efisiensi penggunaan sumber daya yang baik dapat mendorong kinerja keuangan dari BLU sehingga pada akhirnya BLU dapat terus meningkatkan kontribusinya terhadap APBN.

Grafik 2.26. Nilai Maturity Rating Satker BLU Tahun 2023



Sumber: Dit. PPKBLU, DJPb (diolah)

3.1.6. Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat

Kantor Wilayah DJPb Sumatera Selatan melaksanakan pembinaan dan monitoring atas Pinjaman dan Kredit Program. Pelaksanaan pembinaan dan monitoring atas Pinjaman dan Kredit Program oleh Kanwil DJPb Sumatera Selatan bertujuan untuk:

- Mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan pinjaman dan Kredit Program.
- Meningkatkan koordinasi dan kecepatan penyampaian data kewajiban kepada debitur; dan
- Tercapainya pemberian Pinjaman dan subsidi secara tepat sasaran.

3.1.6.1. Penerusan Pinjaman

Penerusan Pinjaman, merupakan Pinjaman Luar Negeri atau Pinjaman Dalam Negeri yang diterima oleh Pemerintah Pusat yang diteruskan kepada Pemerintah Daerah atau BUMN yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. Kantor Wilayah DJPb Sumatera Selatan melaksanakan pembinaan dan monitoring atas pemberian Pinjaman Pemerintah yang bersumber dari Penerusan Pinjaman kepada Pemda/BUMD yang terdiri dari kegiatan:

- Monitoring atas pemberian Pinjaman Pemerintah yang bersumber dari Penerusan Pinjaman pada masa penyelesaian piutang negara.
- Monitoring atas pemberian Pinjaman Pemerintah yang bersumber dari Penerusan Pinjaman kepada Pemda pasca penyelesaian piutang negara.
- Rekonsiliasi kewajiban atas pemberian Pinjaman Pemerintah yang bersumber dari Penerusan Pinjaman.
- Pelaksanaan penagihan kewajiban jatuh tempo debitur, yang meliputi: pelaksanaan penagihan kewajiban debitur dan monitoring pembayaran kewajiban jatuh tempo debitur.

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Sistem Manajemen Investasi Nomor ND-1383/PB.4/2024 tanggal 30 Desember 2024, Kanwil DJPb Sumatera Selatan melaksanakan Rekonsiliasi Outstanding Pinjaman Pemda dan BUMD. Rekonsiliasi ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Bagian Anggaran BUN 999.04 Penerusan Pinjaman periode Semester II Tahun 2024.

Pelaksanaan pembinaan dan monitoring dalam format rekonsiliasi outstanding pinjaman dilaksanakan terhadap 2 Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Kegiatan pembinaan dan monitoring dilakukan atas penerusan pinjaman berdasarkan 12 Perjanjian Pinjaman, yang terdiri dari: 11 Perjanjian Pinjaman (11 Loan ID) atas penerusan pinjaman kepada Pemerintah Kota Palembang, dan 1 Perjanjian Pinjaman (1 Loan ID) atas penerusan pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Pembinaan dan monitoring penerusan pinjaman terhadap Pemerintah Kota Palembang dilaksanakan atas Perjanjian dengan Loan ID dan data Outstanding pinjaman sebagai berikut:

Tabel 2.7. Penerusan Pinjaman Pemerintah Kota Palembang

No	Loan ID	No. Perjanjian
1	2114491	SLA-039/DDI/1982
2	2114501	SLA-682/DP3/1992
3	2114701	PRJ-055/MD.4/1987
4	2114801	RDA-013/DDI/1988
5	2114901	RDA-76/DDI/1992
6	9114401	AMA-439/SLA-039/2012
7	9114501	AMA-440/SLA-682/2012
8	9114601	AMA-132/SLA-055/2012
9	9114701	AMA-130/SLA-055/2012
10	9114801	AMA-129/RDA-13/DSMI
11	9114901	AMA-131/RDA-13/DSMI

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Tidak ditemukan perbedaan data antara data Status Pinjaman dan Hak Tagih Pemerintah dari Aplikasi SLIM dengan Data Pemkot Palembang. Dalam pelaksanaan rekonsiliasi tidak ditemukan perbedaan nilai Hak Tagih Pemerintah (HTP) dan nilai Pembayaran karena jumlah outstanding dari Pemkot Palembang sudah bernilai Rp0.

Outstanding piutang pemerintah pada Pemerintah Kota Palembang tersebut sampai dengan 31 Desember 2024 bernilai Rp0 sehubungan dengan telah dilakukannya proses **debt swap** oleh Pemerintah Kota Palembang. Implementasi *Debt Swap* telah diverifikasi oleh BPKP dengan diterbitkannya Laporan Hasil Verifikasi Debt Swap pada Pemerintah Kota Palembang nomor LHV-035/D4.01/2015 dan LEV-310/PW07/3/2018. Piutang atas penerusan pinjaman pada Pemerintah Kota Palembang telah ditetapkan menjadi Piutang Pemberian Pinjaman yang telah dihapuskan bersyarat sesuai dengan Surat Direktur Sistem Manajemen Investasi Nomor S-102/PB.4/2020 hal Penyampaian Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKBUN Tahun 2019 BA 999.04 Pengelolaan Pemberian Pinjaman.

Penyelesaian administrasi terkait penutupan pinjaman Pemkot Palembang ini memerlukan perhatian khusus, dan perlu segera diselesaikan, karena telah berlarut-larut hingga periode rekonsiliasi outstanding pinjaman 3 tahun terakhir, dan hingga 31 Desember 2024 belum dilakukan penutupan pinjaman. Pihak Pemkot sudah melakukan konfirmasi ke Direktorat SMI terkait penerbitan Surat Penutupan Pinjaman tetapi hingga pada saat rekonsiliasi dilaksanakan belum diterbitkan.

Permasalahan penutupan pinjamam tidak menjadi pertanyaan saat pemeriksaan BPK dan hanya menjadi catatan di Laporan Keuangan. Namun penerbitan surat penutupan pinjaman memerlukan kejelasan serta tindak lanjut agar tidak berlarut-larut. Untuk itu, Kanwil DJPb merekomendasikan Pemkot Palembang bersurat Direktur SMI DJPb agar memperoleh kejelasan secara resmi.

Pembinaan dan monitoring penerusan pinjaman terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim dilaksanakan atas Perjanjian dan Loan ID 2192001 No.Perjanjian SLA-1225/DSMI/2009 dengan data nilai outstanding pinjaman per 31 Desember 2024 sebesar Rp56.338.297.981,24. Pemkab Muara Enim telah melakukan Pembayaran Hak Tagih Pemerintah sesuai dengan jumlah tagihan pemerintah. Dalam pelaksanaan rekonsiliasi terdapat penjelasan dari Tim BPKAD bahwa nilai pinjaman di aplikasi SLIM sudah sama, dan sesuai dengan kewajiban pembayaran tagihan, namun terdapat selisih lebih antara jumlah HTP yang seharusnya dibayarkan dengan nilai SP2D Pembayaran Tagihan yang diterbitkan.

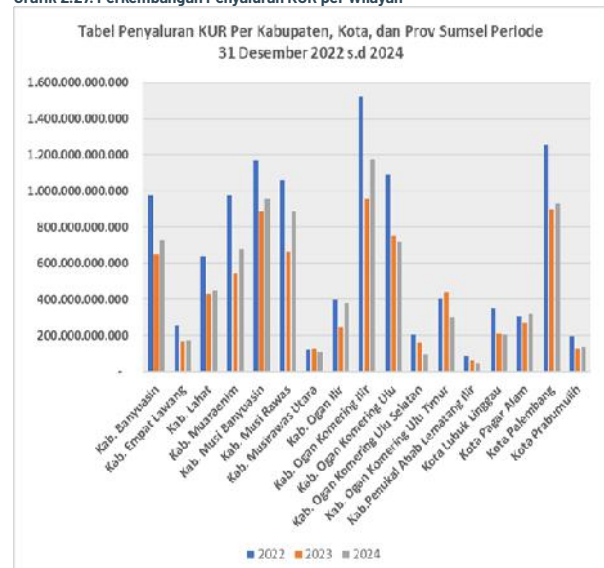
Permasalahan selisih lebih sebagaimana dimaksud disebabkan karena untuk kepentingan pembayaran melalui proses penerbitan SPP, SPM dan SP2D dengan Aplikasi SIPD, nilai pembayaran berdasarkan HTP dibulatkan keatas karena Aplikasi SIPD tidak dapat mengakomodasi bilangan pecahan (2 angka dibelakang koma). Pembulatan ke atas sebagaimana dimaksud menyebabkan selisih lebih pembayaran SP2D dan dikhawatirkan menjadi masalah pada saat pemeriksaan BPK. Tim Bidang PPA II kanwil DJPb Sumatera Selatan menyarankan Tim BPKAD Kabupaten Muara Enim untuk berkoordinasi dengan pengembang Aplikasi SIPD agar dapat mengakomodasi permasalahan tersebut.

3.1.6.2. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan /atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunuan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 1 Tahun 2021, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 1 Tahun 2023.

Total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama periode sampai dengan Desember 2024 di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar Rp 8.384.263.725.411,00 kepada 123.335 debitur. Nilai penyaluran tersebut tumbuh 10,40% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan jumlah debitur tumbuh 8,44% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi penyaluran KUR terbesar dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan nilai total realisasi penyaluran sebesar Rp1.184.012.761.608 kepada 18.051 debitur. Jumlah debitur di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Nilai realisasi penyaluran KUR di kabupaten ini tumbuh 23,27% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan jumlah debitur 30,49% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada periode ini Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) masih menjadi Wilayah di Sumatera Selatan dengan realisasi penyaluran KUR terkecil senilai Rp42.513.700.000,00 yang disalurkan kepada 617 debitur. Nilai realisasi penyaluran di kabupaten ini tumbuh negatif-32,34% dan jumlah debitur penerima penyaluran tumbuh negatif -39,98% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

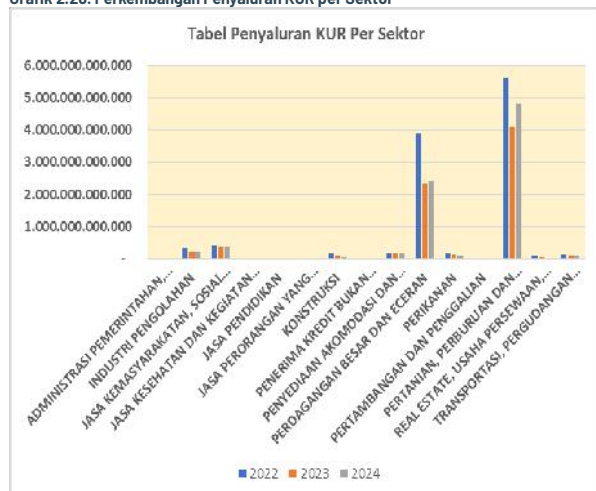
Grafik 2.27. Perkembangan Penyaluran KUR per Wilayah



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan masih menjadi sektor yang paling banyak menerima penyaluran KUR pada sampai dengan Semester II Tahun 2024 dengan nilai penyaluran Rp4.849.626.663.810 kepada 78.251 debitur. Nilai penyaluran pada sektor ini tumbuh 18,05% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya dengan pertumbuhan jumlah debitur 14,32%. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

Grafik 2.28. Perkembangan Penyaluran KUR per Sektor



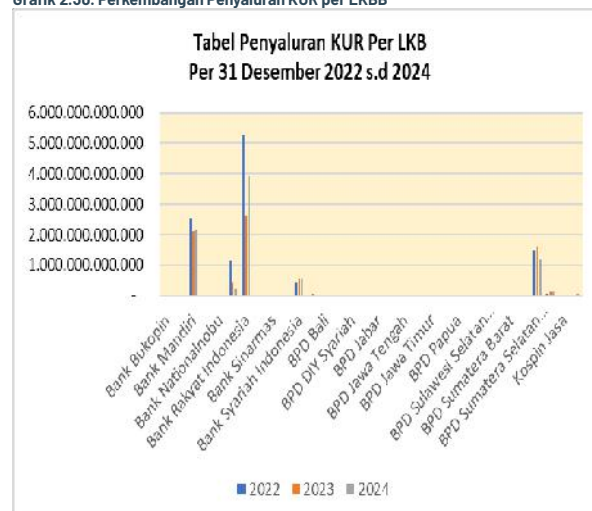
Berdasarkan jenis skema penyaluran, Sampai dengan Desember tahun 2024 KUR Mikro merupakan jenis penyaluran KUR dengan nilai realisasi tertinggi dengan nilai total Rp5.834.633.352.608 yang disalurkan kepada 110.934 debitur. Nilai realisasi KUR jenis ini tumbuh 30,80% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan jumlah debitur 25,25% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi penyaluran terbesar kedua pada periode ini adalah KUR Kecil dengan nilai penyaluran Rp2.537.805.572.803 menurun sebesar -15,91% dari periode sebelumnya yang disalurkan kepada 11.137 debitur. Jumlah debitur jenis KUR Kecil menurun sebesar -10,73% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan data nilai pertumbuhan realisasi penyaluran jenis KUR Mikro dari sisi nilai realisasi dan jumlah debitur yang tumbuh signifikan, sementara di sisi lain terjadi penurunan nilai realisasi penyaluran jenis KUR Kecil pada dari sisi nilai dan jumlah debitur dengan pertumbuhan negatif yang signifikan, hal ini kemungkinan disebabkan oleh peralihan debitur jenis KUR Kecil menjadi Debitur KUR Mikro.

Grafik 2.29. Perkembangan Penyaluran KUR per Skema



Bank Rakyat Indonesia merupakan Lembaga Keuangan Bank yang menyalurkan KUR tertinggi selama tahun 2024 sebesar Rp3.922.112.250.008 nilai penyaluran ini tumbuh 50,31% dibanding penyaluran tahun 2023. Bank Mandiri merupakan Lembaga Keuangan Bank dengan nilai penyaluran tertinggi kedua dengan nilai penyaluran pada tahun 2024 sebesar Rp2.141.437.558.002 tumbuh 2,01% dari tahun 2023. Urutan ketiga adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan nilai penyaluran pada 2024 sebesar Rp1.173.606.300.000 tumbuh negatif /mengalami penurunan-27,53 % dari tahun 2023.

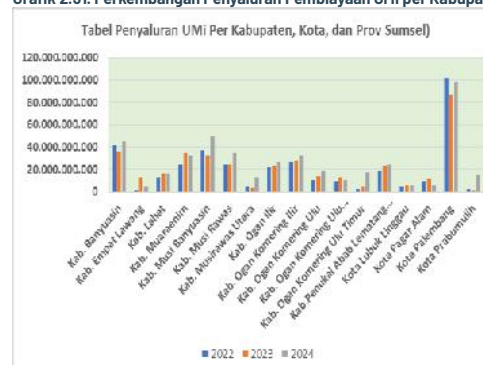
Grafik 2.30. Perkembangan Penyaluran KUR per LKBB



3.1.6.3. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan pembiayaan yang didesain khusus untuk pelaku usaha ultra mikro. Karena kontribusi mereka terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga termasuk signifikan. Namun, mereka umumnya belum mampu mengakses pembiayaan perbankan atau belum bankable. Pemerintah meluncurkan Pembiayaan UMi agar usaha ultra mikro bisa tumbuh berkembang, naik kelas menjadi bankable, dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Indonesia.

Grafik 2.31. Perkembangan Penyaluran Pembiayaan UMI per Kabupaten

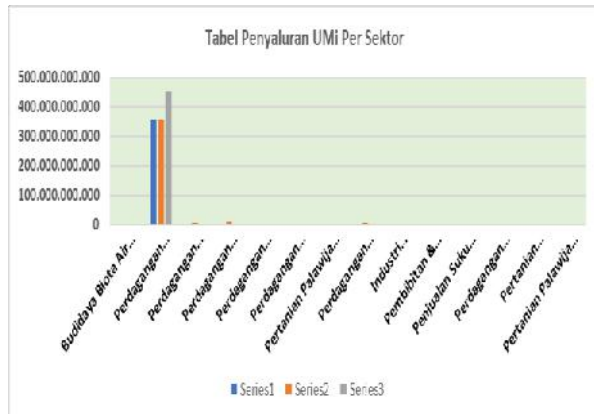


Total realisasi penyaluran Kredit Usaha Ultra Mikro (UMi) sampai dengan 31 Desember 2024 di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar Rp453.188.735.514 yang disalurkan kepada 80.480 debitur. Kinerja realisasi UMi pada periode ini tumbuh sebesar 19,18% dan dari sisi jumlah debitur juga tumbuh 2,63% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah realisasi penyaluran UMi terbesar

dilaksanakan di Kota Palembang sebesar Rp97.725.530.503,00 yang disalurkan kepada 17.904 debitur sedangkan Kabupaten/Kota dengan realisasi penyaluran UMi terkecil adalah Kabupaten Empat Lawang, dengan realisasi penyaluran Rp4.351.075.224,00 yang disalurkan kepada 771 debitur dan mengalami pertumbuhan negatif sebesar -65,67%.

Pada periode sampai dengan 31 Desember 2024, sebesar 99,98% dari total nilai realisasi Kredit UMi disalurkan pada Grup Sektor Perdagangan Beras dan Eceran senilai Rp453.119.163.514 yang disalurkan kepada 80.475 debitur. Sisanya disalurkan masing-masing di Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar Rp29.572.000,00 dan Grup Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp40.000.000,00.

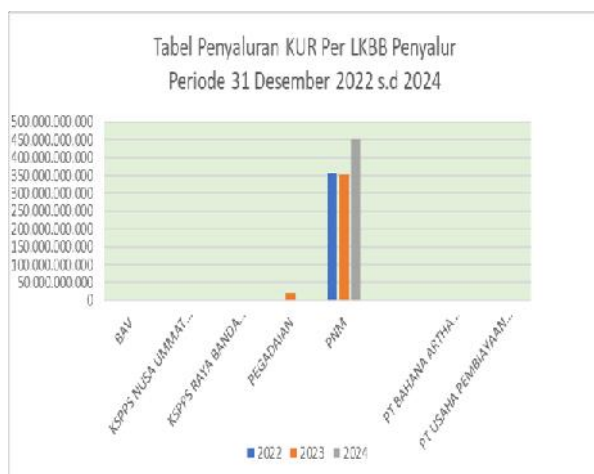
Grafik 2.32. Perkembangan Penyaluran Pembiayaan UMi per Sektor



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Berdasarkan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Penyalur, PT. Permodalan Nasional Madani merupakan LKBB yang menyalurkan 99,35% dari total nilai realisasi Kredit UMi disalurkan yang disalurkan di Provinsi Sumatera Selatan pada periode ini. PT. Permodalan Nasional Madani hingga 31 Desember 2024 telah menyalurkan UMi senilai Rp450.248.974.514 yang disalurkan kepada 80.125 debitur, nilai realisasi ini tumbuh 25,16% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Kemudian sisanya disalurkan oleh PT Pegadaian sebesar Rp2.811.870.000,00, oleh PT REFI sebesar Rp58.931.000, oleh BAV sebesar Rp2.000.000, oleh PT Bahana Artha Ventura sebesar Rp27.500.000, dan KPPS Nusa Ummat Sejahtera sebesar Rp40.000.000,00.

Grafik 2.33. Perkembangan Penyaluran Pembiayaan UMi per LKBB



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

3.1.7. Isu Strategis Pelaksanaan APBN di Daerah

Pelaksanaan APBN di Sumatera Selatan tahun 2024 menghadapi berbagai tantangan yang perlu menjadi perhatian untuk memastikan efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun kinerja pendapatan negara secara keseluruhan tumbuh positif, struktur penerimaan pajak masih bertumpu pada sektor tertentu, khususnya perdagangan besar dan eceran (20,10%) serta pertambangan dan penggalian (19,19%). Ketergantungan yang tinggi pada sektor-sektor ini meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi dan harga komoditas, yang terbukti dengan kontraksi penerimaan pajak industri pengolahan sebesar -0,08% akibat restitusi pajak dan normalisasi harga batubara. Selain itu, dana bagi hasil (DBH) mengalami penurunan signifikan sebesar 17,27%, dipicu oleh moderasi harga komoditas utama Sumsel pada tahun sebelumnya. Dampaknya dirasakan oleh pemerintah daerah yang mengandalkan DBH untuk membiayai APBD, terutama dalam mendukung belanja infrastruktur dan layanan publik. Tak hanya itu, proses rekonsiliasi pajak antara pemda dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang belum optimal menyebabkan keterlambatan penyaluran DBH di beberapa daerah, seperti Kota Palembang dan Prabumulih.

Di sisi belanja negara, meskipun realisasi belanja pemerintah pusat meningkat, efisiensi dan kualitas belanja masih menjadi perhatian utama. Kenaikan belanja pegawai sebesar 15,45% akibat kebijakan kenaikan gaji ASN dan pembayaran Gaji 13 dan THR perlu dievaluasi dalam kaitannya dengan dampaknya terhadap peningkatan produktivitas birokrasi dan layanan publik. Selain itu, belanja barang yang hanya terealisasi 92,59% dari pagu sebagai akibat dari kebijakan efisiensi anggaran di akhir tahun, termasuk *self-blocking* anggaran perjalanan dinas juga menghadapi tantangan terkait keberlangsungan layanan pada satker-satker di wilayah Sumsel. Selanjutnya, belanja modal yang diharapkan memberikan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi juga hanya mencapai 88,23% dari pagu, dengan beberapa proyek strategis nasional (PSN) yang mengalami kendala teknis dan blokir anggaran yang membutuhkan proses yang persetujuan dan eksekusi yang panjang. Salah satu proyek ini (Bendungan Tiga Dihaji) bahkan harus di-*carry over* ke tahun 2025, yang berpotensi menunda manfaat pembangunan bagi masyarakat Sumsel.

Tantangan lain muncul dari penyaluran transfer ke daerah (TKD), yang pada tahun 2024 yang mengalami penurunan sebesar 2,86% akibat berkurangnya alokasi DBH, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan insentif fiskal. Pengurangan jumlah periode insentif fiskal dari tiga periode di tahun sebelumnya menjadi hanya satu periode pada tahun ini berimplikasi pada terbatasnya fleksibilitas fiskal bagi daerah dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, keterlambatan rekonsiliasi pajak menghambat penyaluran DBH, sementara beberapa daerah mengalami gagal salur Dana Alokasi Umum (DAU) pendanaan kelurahan akibat rendahnya kapasitas SDM dalam mengelola anggaran. Tidak hanya itu, terjadi juga kasus gagal salur dana desa di beberapa desa akibat penyalahgunaan dana dan permasalahan administratif, yang semakin memperkuat urgensi perbaikan tata kelola fiskal di tingkat daerah.

Dengan berbagai tantangan tersebut, langkah strategis yang dapat diambil antara lain meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak melalui ekstensifikasi dan digitalisasi layanan pajak, mempercepat penyaluran TKD dan DBH dengan memperbaiki koordinasi antara pemda dan DJP, serta meningkatkan efektivitas belanja pemerintah pusat agar lebih

tepat sasaran. Selain itu, strategi pengendalian defisit perlu diprioritaskan dengan mendorong efisiensi anggaran dan penguatan koordinasi fiskal antara pusat dan daerah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaksanaan APBN di Sumatera Selatan dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3.2. Pelaksanaan APBD Sumsel

APBD Sumsel 2024 s.d akhir tahun ditutup dengan kinerja yang positif. Kinerja APBD Sumsel s.d triwulan IV tahun 2024 mengalami pertumbuhan dari sisi pendapatan dan belanja daerah. Kinerja Pendapatan Daerah mengalami pertumbuhan sebesar 21,07% (yoy), pertumbuhan positif tersebut terlihat pada semua pos pendapatan daerah. Pada sisi belanja daerah turut menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 16,38% (yoy), semua jenis belanja.

Kinerja APBD di Sumsel dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Kinerja APBD yang baik dapat memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui beberapa mekanisme. Peningkatan belanja daerah yang efektif dan efisien dapat meningkatkan investasi publik, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan layanan publik yang berkualitas memberikan nilai tambah maksimal bagi masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui perencanaan yang matang, alokasi anggaran yang tepat sasaran, dan pengawasan yang ketat. Selain kinerja APBD, event kepariwisataan yang dilaksanakan di Sumsel juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan ini dapat memperkuat APBD dan mendukung pembangunan daerah. Peningkatan kinerja belanja operasi juga merupakan

faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja operasi yang efisien dan efektif dapat meningkatkan kualitas layanan publik seperti kemudahan perizinan dan akses layanan yang lebih baik. Hal ini dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan menarik investasi, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penggunaan belanja tidak terduga di Sumsel untuk penanggulangan bencana alam banjir menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi kegiatan ekonomi masyarakat. Bencana alam dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan menyebabkan kerugian yang signifikan. Dengan penanggulangan yang cepat dan tepat, pemerintah daerah dapat meminimalkan dampak negatif bencana alam terhadap perekonomian daerah.

Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak serta Pembangunan Infrastruktur memberikan dorongan positif terhadap APBD di Sumsel. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak mendorong peningkatan belanja daerah di Sumsel, terutama pada pos Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu. Pembangunan infrastruktur di Sumsel, seperti jalan, irigasi, jaringan, dan bangunan air, turut menyumbang pada kinerja belanja daerah. Hal ini terlihat dari tumbuhnya kinerja belanja modal, khususnya pada belanja-belanja tersebut. Pembangunan infrastruktur juga memberikan dampak positif pada pendapatan daerah. Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terjadi pertumbuhan karena adanya peningkatan realisasi pada pajak daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas ekonomi dan nilai properti akibat pembangunan infrastruktur.

Tabel 2.8. Laporan Realisasi APBD Konsolidasian di Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan IV 2023-2024 (c-to-c)

I-Account (dalam Miliar Rupiah)	TA 2023			TA 2024			% Growth 2023-2024
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
Pendapatan Daerah	40,968.55	40,657.89	99.24%	52,546.78	49,470.79	94.15%	21.68%
Pendapatan Asli Daerah	9,701.62	8,057.40	83.05%	10,760.29	9,540.30	88.66%	18.40%
Pajak daerah	6,527.93	5,967.18	91.41%	6,955.89	7,031.84	101.09%	17.84%
Retribusi daerah	227.56	109.62	48.17%	453.10	185.69	40.98%	69.39%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	370.40	448.27	121.02%	425.77	356.70	83.78%	-20.43%
Lain-lain PAD yang sah	2,575.73	1,532.33	59.49%	2,925.53	1,966.07	67.20%	28.31%
Pendapatan Transfer	30,522.34	32,097.85	105.16%	41,282.48	39,410.20	95.46%	22.78%
Transfer Pemerintah Pusat	28,631.67	30,009.08	104.81%	36,391.65	37,007.21	101.69%	23.32%
Transfer Antar Daerah	1,890.67	2,088.76	110.48%	4,890.84	2,403.00	49.13%	15.04%
Lain-lain Pendapatan yang sah	744.58	502.64	67.51%	504.00	520.28	103.23%	3.51%
Pendapatan Hibah	84.74	74.43	87.84%	75.50	118.20	156.54%	58.80%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	659.85	428.21	64.90%	428.50	402.09	93.84%	-6.10%
Belanja Daerah	41,491.35	41,648.10	100.38%	54,821.00	48,471.69	88.42%	16.38%
Belanja Operasi	26,824.06	24,962.28	93.06%	32,611.96	28,881.91	88.56%	15.70%
Belanja Pegawai	14,401.81	12,347.92	85.74%	15,934.23	14,187.01	89.03%	14.89%
Belanja Barang dan Jasa	11,272.76	11,110.82	98.56%	14,228.18	12,465.40	87.61%	12.19%
Belanja Bunga	80.33	54.47	67.81%	34.09	31.85	93.43%	-41.53%
Belanja Subsidi	14.58	13.72	94.07%	20.13	19.07	94.75%	39.06%
Belanja Hibah	1,019.58	1,399.66	137.28%	2,300.65	2,113.96	91.89%	51.03%
Belanja Bantuan sosial	35.01	35.69	101.95%	94.68	64.61	68.24%	81.03%
Belanja Modal	6,863.53	9,402.55	136.99%	12,978.98	10,845.01	83.56%	15.34%
Belanja Tidak Terduga	123.08	6.56	5.33%	320.21	12.52	3.91%	90.92%
Belanja Transfer	7,680.67	7,276.71	94.74%	8,909.85	8,732.25	98.01%	20.00%
Belanja Bagi Hasil	2,034.24	2,232.90	109.77%	2,359.79	2,457.41	104.14%	10.05%
Belanja Bantuan Keuangan	5,646.43	5,043.81	89.33%	6,550.06	6,274.85	95.80%	24.41%
Surplus/Defisit	-522.79	-990.21	189.41%	-2,274.22	999.10	-43.93%	-200.90%
Pembiayaan	522.79	2,531.68	484.26%	2,407.91	2,026.40	84.16%	-19.96%
Penerimaan Pembiayaan	1,412.68	3,118.38	220.74%	2,744.62	2,345.39	85.45%	-24.79%
Pengeluaran Pembiayaan	889.88	586.70	65.93%	336.71	318.99	94.74%	-45.63%

I-Account (dalam Miliar Rupiah)	TA 2023			TA 2024			% Growth 2023-2024
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		1,541.47			3,025.50		96.27%

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

3.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Sumsel tumbuh positif didorong realisasi pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Sampai dengan triwulan IV 2024, realisasi pendapatan daerah Sumsel sebesar Rp49,47 triliun atau telah mencapai 94,15% dari target APBD 2024. Capaian tersebut lebih tinggi Rp7,78 triliun dari periode yang sama tahun lalu dengan kontributor utamanya adalah pendapatan transfer pemerintah pusat (79,66%) dan Pendapatan Asli Daerah (19,28%).

Grifik 2.34. Pertumbuhan dan Kontribusi Realisasi Per Jenis Pendapatan Daerah



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Dari sisi pertumbuhannya, realisasi pendapatan daerah tumbuh sebesar 21,68% (yoy), dimana dipengaruhi oleh akselerasi pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah sejak awal tahun, selain itu pertumbuhan ekonomi di Sumsel turut mempunyai andil dalam hal ini.

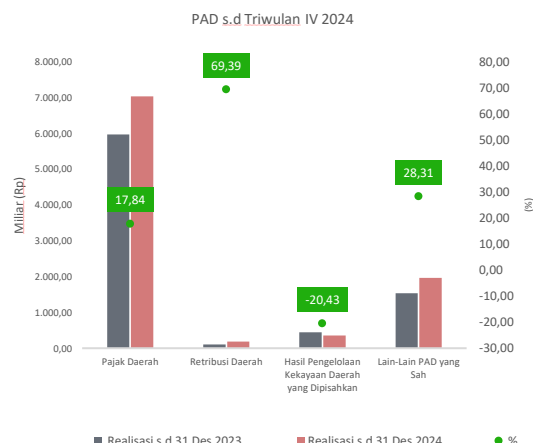
Pendapatan Asli Daerah tumbuh positif dampak dari pergerakan ekonomi masyarakat yang tumbuh. Realisasi PAD tercatat Rp9,54 triliun atau 59,22% dari target. Capaian tersebut berkontribusi sebesar 19,28% dari total realisasi pendapatan daerah hingga triwulan IV 2024. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi PAD tumbuh 18,40% (yoy) yang dipengaruhi pajak daerah sebagai kontributor utama PAD.

Pajak daerah terealisasi Rp7,03 triliun dan mengalami pertumbuhan sebesar 17,84% (yoy), hal tersebut didorong oleh meningkatnya penerimaan yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikarenakan adanya **pembangunan yang meningkatkan perekonomian di wilayah Sumatera Selatan** khususnya di kota Palembang. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan dorongan kepada peningkatan PAD di wilayah Sumatera Selatan karena kebijakan pemutihan pajak yang diberlakukan oleh Pj. Gubernur Sumatera Selatan mulai tanggal 14 Agustus 2024 lalu. Kinerja pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) s.d triwulan IV 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 17,75% (yoy). Selain itu, Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor turut memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 8,60% (yoy). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mengalami pertumbuhan sebesar 11,68% (yoy). Pertumbuhan jenis pajak daerah tersebut dapat menggambarkan bahwa aktivitas perekonomian di Sumsel mengalami peningkatan.

Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serta event kepariwisataan turut mendorong PBJT. Hal tersebut mendorong konsumsi masyarakat di Sumsel, terlihat dari pertumbuhan pada pajak hotel sebesar 17,01% (yoy), pajak restoran sebesar 18,54%

(y.o.y), pajak hiburan sebesar 5,84% (yoy) dan pajak reklame sebesar 22,66% (yoy).

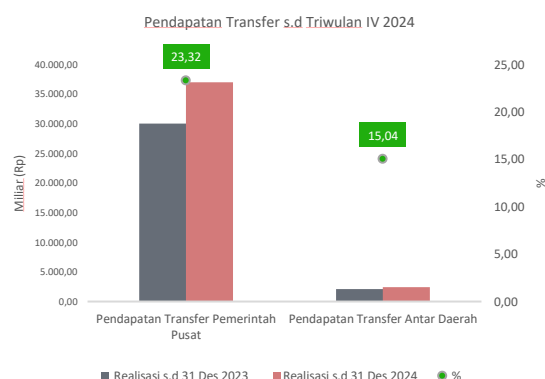
Grifik 2.35. Pertumbuhan Realisasi Per Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah mengalami pertumbuhan positif, sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kontraksi. Realisasi retribusi daerah sebesar Rp165,69 miliar atau tumbuh 69,39% (yoy) yang utamanya dipengaruhi pertumbuhan pada retribusi jasa umum yaitu retribusi layanan kesehatan dan retribusi izin mendirikan bangunan. Realisasi lain-lain pendapatan yang sah tercatat Rp1,19 triliun atau tumbuh 28,31% (yoy) yang dipengaruhi pertumbuhan pada pendapatan BLUD. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp356,70 miliar atau terkontraksi (-20,43%) (yoy) dipengaruhi oleh menurunnya Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda atas Penyertaan Modal kepada BUMD.

Grifik 2.36. Pertumbuhan Realisasi Per Jenis Pendapatan dari Dana Transfer



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Pendapatan dari dana transfer tetap terakselerasi dan bekerja optimal sejak awal tahun hingga triwulan IV 2024. Realisasi pendapatan dari Dana Transfer sebesar Rp39,41 triliun atau 95,46% dari target. Capaian tersebut berkontribusi sebesar 77,52% dari total realisasi pendapatan daerah hingga triwulan IV 2024. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi pendapatan dari dana transfer tumbuh positif 22,78% (yoy) yang utamanya dipengaruhi peningkatan realisasi pendapatan transfer

pemerintah pusat dan juga pendapatan transfer antar daerah dibandingkan tahun sebelumnya.

Pendapatan transfer pemerintah pusat tumbuh dikarenakan peningkatan alokasi dana transfer dan pencairan dana *Treasury Depocito Facility* (TDF). Pendapatan transfer pemerintah pusat realisasi sebesar Rp37,00 triliun atau tumbuh positif 23,32% (yoy). Hal tersebut didorong salah satunya oleh pencairan saldo dana *Treasury Depocito Facility* (TDF) atas dana bagi hasil tahun sebelumnya. Selain itu pertumbuhan juga terjadi pada pendapatan transfer antar daerah yang telah terealisasi sebesar Rp2,40 triliun atau tumbuh 15,04% (yoy). Pertumbuhan positif juga terjadi pada pendapatan bagi hasil pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi yang lebih besar jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tabel 2.9. Kondisi Kemandirian Fiskal Pemda di Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2024

Pemerintah Daerah	IKF	Kategori
Prov. Sumatera Selatan	0.48	Menuju Kemandirian
Kab. Musi Banyuasin	0.10	Belum Mandiri
Kab. OKU	0.09	Belum Mandiri
Kab. Muara Enim	0.10	Belum Mandiri
Kab. Lahat	0.06	Belum Mandiri
Kab. Musi Rawas	0.07	Belum Mandiri
Kab. Ogan Komering Ilir	0.10	Belum Mandiri
Kab. Banyuasin	0.10	Belum Mandiri
Kab. OKU Timur	0.05	Belum Mandiri
Kab. OKU Selatan	0.03	Belum Mandiri
Kab. Ogan Ilir	0.08	Belum Mandiri
Kab. Empat Lawang	0.04	Belum Mandiri
Kab. PALI	0.04	Belum Mandiri
Kab. Musi Rawas Utara	0.07	Belum Mandiri
Kota Palembang	0.34	Menuju Kemandirian
Kota Prabumulih	0.11	Belum Mandiri
Kota Pagar Alam	0.10	Belum Mandiri
Kota Lubuk Linggau	0.12	Belum Mandiri

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Seluruh pendapatan daerah pada Pemerintah Daerah di Sumsel masih didominasi oleh pendapatan dari dana transfer, yang menunjukkan kemandirian yang masih rendah. Sampai dengan bulan September 2024, dari 18 pemerintah daerah di Sumsel terdapat 16 pemda yang indeks kemandirian fiskal dalam kategori “Belum Mandiri” dan hanya 2 pemda yang masuk dalam kategori “Menuju Kemandirian”. Pemda yang masuk dalam kategori “Menuju Kemandirian” adalah Pemerintah Kota Palembang memiliki nilai sebesar 0,34 dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai sebesar 0,43.

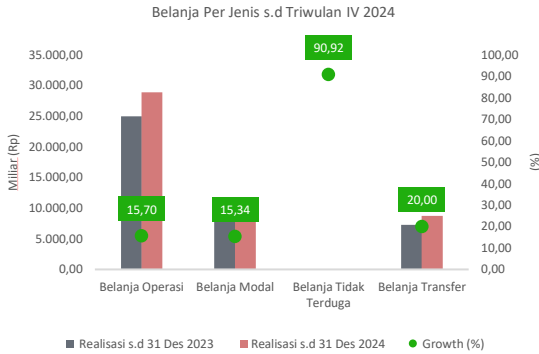
Lain-lain pendapatan daerah mengalami pertumbuhan di akhir tahun 2024. Realisasi lain-lain pendapatan sebesar Rp520,28 miliar atau 103,23% dari target. Capaian tersebut berkontribusi sebesar 1,05% dari total realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun 2024. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi lain-lain pendapatan daerah tumbuh positif sebesar 3,51% (yoy) yang utamanya dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan hibah dari tahun sebelumnya.

3.2.2. Belanja Daerah

Belanja daerah Sumsel tumbuh positif didorong kinerja realisasi semua jenis belanja dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga bulan Desember 2024, realisasi belanja daerah Sumsel terealisasi sebesar Rp48,47 triliun atau telah mencapai 88,42% dari target APBD 2024. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja daerah tumbuh positif 16,38% (yoy), dipengaruhi oleh

pertumbuhan dari sisi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

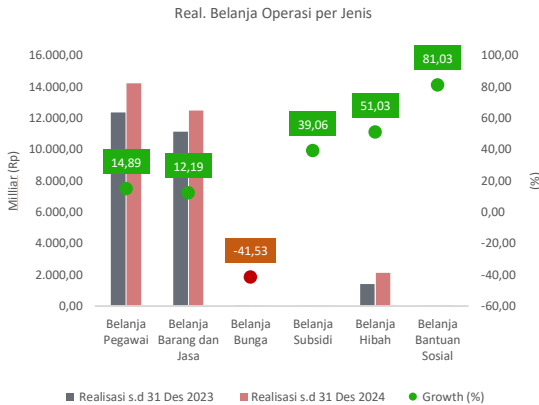
Grafik 2.37. Pertumbuhan Realisasi Per Jenis Belanja Daerah



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Kinerja Belanja Operasi tumbuh positif di hampir semua jenis belanja kecuali belanja bunga. Realisasi belanja operasi sebesar Rp28,88 triliun atau 55,48% dari target. Capaian tersebut berkontribusi sebesar 88,56% dari total realisasi belanja daerah tahun 2024. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja operasi tumbuh 15,70 (yoy) yang dipengaruhi realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial tumbuh dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik 2.38. Pertumbuhan Realisasi Per Jenis Belanja Operasi



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Dilihat secara lebih rinci per jenis belanja operasi, realisasi belanja pegawai mencatatkan tren yang positif. Sampai dengan akhir tahun 2024, belanja pegawai terealisasi sebesar Rp14,18 triliun atau 89,03% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja pegawai tumbuh positif 14,89% (yoy) dipengaruhi oleh peningkatan belanja gaji dan tunjangan PNS Daerah, anggota dan Pimpinan DPRD, dan tambahan penghasilan PNS Daerah.

Belanja barang dan jasa turut tumbuh positif di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp12,46 triliun atau 87,61% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja barang dan jasa tumbuh 12,19% (yoy) dipengaruhi oleh pertumbuhan pada belanja barang habis pakai, belanja jasa kantor, belanja sewa Gedung dan peralatan, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan ,

belanja barang dan jasa BLUD dan belanja barang dan jasa dana BOS.

Belanja bunga juga mengalami kontraksi di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi belanja bunga sebesar Rp31,85 miliar atau 93,43% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja bunga turun -41,53% (yoy) dipengaruhi oleh penurunan pengeluaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan perbankan dan bukan bank dibandingkan tahun sebelumnya.

Belanja subsidi tumbuh positif di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi belanja subsidi sebesar Rp19,07 miliar atau 94,75% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja subsidi tumbuh 39,06 % (yoy) dipengaruhi oleh realisasi belanja subsidi pada tahun 2024 yang lebih tinggi pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Subsidi yang dilakukan untuk merealisasikan belanja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

Belanja Hibah hingga akhir tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi belanja hibah sebesar Rp2,11 triliun atau 91,89% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja hibah tumbuh positif 51,03% (yoy) dipengaruhi oleh peningkatan belanja hibah kepada pemerintah pusat dan belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagai dampak dari penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 pada Februari dan persiapan pilkada serentak yang telah dilaksanakan pada bulan November 2024. Juga adanya pencatatan terhadap Belanja Hibah dari dana BOS untuk pendidikan dasar.

Belanja bantuan sosial mencatatkan tren yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi belanja bantuan sosial tercatat Rp31,59 miliar atau 42,78% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja bantuan sosial tumbuh 51,03% (yoy) dipengaruhi oleh meningkatnya realisasi belanja bantuan sosial kepada masyarakat dan belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan.

Belanja modal masih tumbuh positif di tahun 2024. Realisasi belanja modal sebesar Rp10,84 triliun atau 83,56% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja modal tumbuh positif 15,34% (yoy) dikonstruksikan oleh meningkatnya realisasi belanja modal untuk jalan, irigasi, dan jaringan seperti jalan dan jembatan serta belanja modal bangunan air dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja realisasi tersebut selaras dengan beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pada beberapa wilayah di Sumsel.

Pertumbuhan realisasi belanja tidak terduga dalam merespon berbagai bencana banjir yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Realisasi belanja tidak terduga terealisasi sebesar Rp12,52 miliar atau 3,91% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja tidak terduga tumbuh positif 90,92% (yoy) sebagai respon untuk pengeluaran tidak terduga dalam penanganan kejadian banjir di wilayah Sumsel seperti Kab. Musi Rawas, Kab. OKU Selatan, Kab. Lahat, Kab. OKU dan Kab. Musi Banyuasin. Selain itu BTT dipergunakan untuk penyelesaian kelebihan potongan temuan BPK RI oleh Kab.OKU Timur.

Belanja transfer tumbuh positif di tahun 2024. Realisasi belanja transfer sebesar Rp8,73 triliun atau 98,01% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja transfer tumbuh positif 20,00% (yoy) dipengaruhi oleh peningkatan bantuan

keuangan atas bagi hasil pajak daerah oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota di Sumsel dan bantuan keuangan yang diberikan oleh Kabupaten kepada desa.

3.2.3. Surplus/Defisit APBD

Sampai dengan triwulan IV 2024, APBD Sumsel mencatatkan defisit. Realisasi APBD Sumsel tercatat surplus sebesar Rp 0,99 triliun atau kontraksi -200,90% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja APBD di Sumsel menunjukkan kinerja fiskal belanja yang ekspansif. Belanja Daerah dipergunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumsel.

3.2.4. Pembiayaan Daerah

Realisasi pembiayaan daerah mengalami kontraksi di tahun 2024. Realisasi pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp2,02 triliun atau 84,16% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi pembiayaan daerah kontraksi negatif sebesar -19,96% (yoy) dikonstruksikan dari penurunan penerimaan pembiayaan dan penurunan. Penerimaan pembiayaan terealisasi Rp2,34 triliun atau terkontraksi -24,79% yang utamanya dikonstruksikan dari penggunaan SILPA tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan tercatat Rp202,18 miliar atau turun -53,91% (yoy) yang dipengaruhi oleh penurunan penyertaan modal/investasi pemda dan penurunan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri.

3.2.5. Perkembangan BLU Daerah

Tabel 2.10. Profil BLUD Lingkup Sumatera Selatan TA 2024

Pemda	Rumpun					Total
	Kesehatan		Pendidikan		UPTD	
	RSUD	Puskesmas	SMK	Balai Diklat/Pembangan SDM		
Kab Banyuasin	3	33				36
Kab Empat Lawang	1					1
Kab Lahat	1					1
Kab Muara Enim	4	22				26
Kab Musi Banyuasin	3	29				32
Kab Musi Rawas	1	20			1	22
Kab Musi Rawas Utara	1	8				9
Kab Ogan Ilir	1	25				26
Kab Ogan Komering Ilir	2	33				35
Kab Ogan Komering Ulu	1					1
Kab OKU Selatan	1					1
Kab OKU Timur	2					2
Kab Pagar Alam	1					1
Kab Pali	1					1
Kota Lubuk Linggau	1	10	1			12
Kota Palembang	2	41				43
Kota Prabumulih	1	9				10
Provinsi Sumatera Selatan	5		4	2	5	16
Total	32	230	5	2	6	275

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Sumsel, Biro Ekonomi Setda Prov. Sumsel, dan Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel (diolah)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan institusi pemerintah daerah yang dibentuk untuk menyediakan layanan publik tanpa mengutamakan/mencari keuntungan. Dengan prinsip efisiensi dan efektivitas, BLUD diharapkan dapat berkontribusi untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Prov. Sumsel, Biro Ekonomi Setda Prov. Sumsel, dan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, di Sumatera Selatan memiliki 275 unit pelaksana teknis/unit organisasi bersifat khusus yang berstatus BLUD. Dari jumlah tersebut, 262 BLUD berada pada rumpun kesehatan, 7 BLUD rumpun pendidikan, dan 6 BLUD rumpun lainnya. Jika dilihat secara kelembagaan, mayoritas BLUD berada pada rumpun Kesehatan yang terdiri dari 32 RSUD dan 230 Puskesmas. Data sebaran BLUD di wilayah Sumsel dapat dilihat pada tabel 2.8.

Berdasarkan hasil asistensi dan survei yang dilakukan selama TA 2024 terdapat manfaat yang telah dicapai dari kegiatan asistensi dan pembinaan BLUD Bidang PPA II Kanwil DJPb Sumsel pada Tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

- Kanwil DJPb Sumsel berhasil memetakan kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan oleh BLUD lingkup Provinsi Sumsel untuk TA 2024 dimana aspek Perencanaan dan Penganggaran mendapat perhatian tertinggi dari 93 responden (76,9%), diikuti oleh akuntansi dan pelaporan BLUD yang dianggap penting oleh 68 responden (56,2%). Sedangkan kebijakan PBJ pada BLUD disorot oleh 49 responden (40,5%), hal ini dapat memberikan gambaran kepada Kanwil DJPb Sumsel untuk memprioritaskan pelatihan seperti apa yang dibutuhkan BLUD di wilayah Provinsi Sumsel.
- Kanwil DJPb Sumsel berhasil meningkatkan kolaborasi dan Sinergi Kemenkeu Satu dan menjalin kerja sama yang baik dengan melibatkan PKN STAN dalam kegiatan asistensi dan pembinaan BLUD di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
- Kanwil DJPb Sumsel berhasil meningkatkan kemampuan SDM BLUD Bidang Kesehatan di wilayah Provinsi Sumsel

dengan menyelenggarakan FGD Konsepsi dan Tata Kelola BLUD Bidang Kesehatan Lingkup Provinsi Sumatera Selatan, dan FGD Perencanaan dan Penganggaran pada BLUD Provinsi Sumsel TA 2024.

- Kanwil DJPb Sumsel berhasil melakukan Analisis Kinerja Keuangan BLUD dan Reviu Maturity Rating pada RSUD Ogan Ilir dan RSUD Kayu Agung dimana Analisis Kinerja Keuangan BLUD tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan melihat tren belanja BLUD dalam periode waktu tertentu sehingga pengelolaan anggaran dapat lebih efisien.

Berdasarkan hasil asistensi dan survei yang dilakukan selama TA 2024 terdapat kendala dan tantangan yang dihadapi dari kegiatan asistensi dan pembinaan BLUD Bidang PPA II Kanwil DJPb Sumsel pada Tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

- BLUD daerah membutuhkan support pemerintah daerah, umumnya pemda masih beranggapan jika entitas sudah menjadi BLUD maka tidak diberi lagi alokasi anggaran daerah sehingga dibutuhkan diskusi untuk menyamakan persepsi terkait tata kelola BLUD dengan Pemerintah Daerah setempat, dimana kewenangan BLUD ada sepenuhnya di Pemda, berbeda dengan BLU yang sepenuhnya dapat diasistensi oleh Kemenkeu.
- Dibutuhkan dana yang cukup pada DIPA Kanwil DJPb Sumsel bidang PPA II terkait pelatihan dan peningkatan tata kelola BLUD, namun karena adanya keterbatasan dana sehingga perlu dipilih materi apa yang lebih dibutuhkan dan BLUD mana yang akan dijadikan prioritas subjek pelatihan.
- BLUD diberi kewenangan flexibel dalam pengelolaan keuangan di daerah tetapi masih perlu kemampuan birokrasi untuk penyamaan persepsi pejabat di pemda lingkup wilayahnya. Dalam proses aturan ini, adanya dinamika politik yang bisa mempengaruhi perkembangan BLUD.
- Pembentukan BLUD masih belum memiliki

pemahaman yang sama di lingkup Pemda, Pembentukan BLUD dianggap bukan hal penting, karena masih bisa dikelola dengan UPT sehingga ada hambatan pada saat unit mengajukan menjadi BLUD (adanya anggapan akan berkurangnya potensi pendapatan Pemda).

- e. Adanya pemahaman yang keliru pada Pemda yaitu ketika UPT menjadi BLUD maka dianggap tidak berhak lagi untuk mendapatkan alokasi APBD dari Pemda.
- f. BLUD masih kesulitan dalam menetapkan tarif lingkup layanan BLUD diwilayahnya.
- g. Untuk BLUD rumpun kesehatan, permasalahan terkait perhitungan klaim PBI BPJS yang secara besaran tarif layanan pada beberapa jasa pelayanan masih sangat rendah dan merugikan RSUD dan Puskesmas.
- h. Pendapatan BLUD kesehatan sangat bergantung pada alokasi TKD dan Klaim jaspel BPJS sehingga tingkat kemandirian BLUD masih relatif rendah.
- i. Belum adanya SOP pengelolaan aset menyebabkan pengelolaan aset menjadi tidak optimal.
- j. Terdapat permasalahan implementasi antara lain Sistem informasi pengelolaan dan pelaporan keuangan masih sulit karena belum memiliki aplikasi yang optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas yang seharusnya mendapatkan support aplikasi dari Kemendagri (pengelolaan keuangan BLUD belum masuk didalam sistem SIPD RI yang dikembangkan oleh kemendagri)

Evaluasi yang membutuhkan perbaikan terkait kegiatan asistensi pembinaan BLUD Bidang PPA II Kanwil DJPb Sumsel pada Tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

- a. Akan diagendakan komunikasi dengan BPKAD selaku pembina BLUD di daerah untuk kegiatan asistensi dan pembinaan BLUD di wilayah Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya.
- b. Dari hasil survey yang telah dilakukan Kanwil DJPb Sumsel, akan dipilih prioritas mana yang lebih dahulu dilaksanakan, baik terkait materi maupun BLUD yang akan dilakukan asistensi yang akan dilaksanakan bersama PKN STAN dan Kanwil DJPb Sumsel.
- c. Diusulkan kepada pembina teknis BLUD dan Pemda setempat untuk membuat range tarif lingkup layanan BLUD sehingga dapat dijadikan dasar untuk penetapan tarif sesuai dengan daerah kerja masing-masing.
- d. BLUD dalam menetapkan besaran tarif dapat

membentuk tim, keanggotaannya dari pembina teknis, pembina keuangan, unsur perguruan tinggi, dan lembaga profesi.

- e. BLUD dapat menyusun tarif layanan dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif.
- f. Kanwil DJPb Provinsi Sumsel akan berkoordinasi dengan PKN STAN serta Dinas terkait pembina teknis BLUD di daerah, terkait pelatihan apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan mengelola dan mengembangkan BLUD didaerahnya.
- g. Dibutuhkan komitmen dari pengelola BLUD, pembina teknis BLUD, dan pembina keuangan BLUD untuk bersinergi dan berkolaborasi membangun BLUD yang lebih baik.
- h. Terdapat beberapa BLUD di wilayah provinsi Sumsel yang mempunyai tata kelola baik, antara lain RS Siti Fatimah Sekayu, sehingga bisa dijadikan rujukan pembelajaran untuk BLUD yang lain di wilayah Sumatera Selatan.

Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan berharap dengan terselenggaranya kegiatan asistensi pembinaan BLUD di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dapat meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan pada BLUD di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah atau pengelola BLUD dimana dari asistensi pembinaan BLUD yang disusun secara kolaborasi antara Kanwil DJPb Sumsel PKN STAN diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan pengelolaan BLUD sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat.

Peningkatan pemanfaatan sumber daya dan sinergi bersama antara Kanwil DJPb Provinsi Sumsel, PKN STAN, Pemda dan BLUD adalah langkah penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pelayanan, dan akuntabilitas pelayanan publik. Diharapkan dengan adanya perencanaan dan manajemen yang baik, serta dukungan dari semua pemangku kepentingan BLUD dapat berhasil dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan yang diinginkan diwilayah Provinsi Sumatera Selatan, dimana dibutuhkan komitmen bersama dari pengelola BLUD, pembina teknis BLUD, dan pembina keuangan BLUD untuk bersinergi membangun BLUD yang lebih baik di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2.11 Rangkaian Kegiatan Asistensi Pembinaan BLUD Tahun 2024

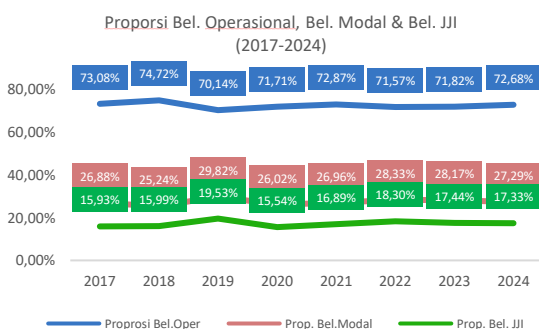
No	Kegiatan	Peserta/Pihak Yang Terlibat	Waktu	Pelaksanaan Kegiatan
1	Rapat Pendahuluan Koordinas Kemenkeu Satu Antara Kanwil DJPb dan PKN STAN	1. Tim Kanwil DJPb Sumsel Bidang PPA II. 2. Tim dari PKN STAN	8 Maret 2024	Membahas kolaborasi dan rencana kerja asistensi Pembinaan BLUD di wilayah Provinsi Sumsel
2	Rapat Koordinasi Kemenkeu Satu Antara Kanwil DJPb Sumsel dan PKN STAN	1. Tim Kanwil DJPb Sumsel Bidang PPA II 2. Tim dari PKN STAN	20 Mei 2024	Membahas bagaimana rencana tindak lanjut dan Metode asistensi pembinaan BLUD secara bersama antara Kanwil DJPb Sumsel dan PKN STAN
3.	FGD Konsepsi dan Tata Kelola BLUD Bidang Kesehatan	1. Tim dari PKN STAN. 2. BPKAD Prov/kab/kota, Dinas	31 Mei 2024	Membahas hal-hal terkait Tata kelola BLUD Bidang kesehatan, diantaranya

No	Kegiatan	Peserta/Pihak Yang Terlibat	Waktu	Pelaksanaan Kegiatan
	Lingkup Provinsi Sumatera Selatan	Kesehatan prov/kab/kota, RSUD dan Puskesmas, Bapenda, Biro Perekonomian Setda Prov. Sumsel di Wilayah Sumsel. 3. Pejabat/pegawai Kanwil DJPb dan KPPN di wilayah Sumsel.		dibutuhkan pelatihan terkait peningkatan tata kelola BLUD, tarif lingkup layanan BLUD, dan Potensi BLUD di wilayah Provinsi Sumsel
4.	Rapat Koordinasi Kemenkeu Satu Antara Kanwil DJPb Dan PKN STAN	1. Tim Kanwil DJPb Sumsel Bidang PPA II. 2. Tim dari PKN STAN	11 Juni 2024	Membahas dan Menganalisis Data hasil survey FGD, dimana aspek Perencanaan dan penganggaran mendapat perhatian tertinggi dari 93 responden (76,9%), diikuti oleh akuntansi dan pelaporan BLUD yang dianggap penting oleh 68 responden (56,2%) sedangkan kebijakan PBJ pada BLUD disorot oleh 49 responden (40,5%).
5.	Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan dan Penganggaran Pada BLUD Provinsi Sumsel TA 2024	1. Kepala Kanwil, Tim PPA II, KPPN di lingkup Kanwil DJPb Prov Sumsel 2. Tim dari PKN STAN 3. Sekretaris Dinas Kesehatan, Kepala Biro Perekonomian, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPKAD, Kepala Biro/Bidang Perekonomian, Kepala, Kepala Puskesmas di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	16 Agustus 2024	Melakukan bimbingan terkait Perencanaan dan Penganggaran pada BLUD, melalui kegiatan ini diharapkan kualitas SDM Pengelola Perencanaan dan Penganggaran pada BLUD di Provinsi Sumsel semakin meningkat dalam menyusun perencanaan dan penganggaran pada BLUD sehingga dapat mempercepat proses perencanaan dan penganggaran pada masing BLUD.
6.	Kegiatan Audiensi, Profiling Serta Sharing Knowledge Pengelolaan Keuangan dan Kinerja BLUD pada RSUD Kab. Ogan Ilir TA 2024	1. Tim Kanwil DJPb Sumsel Bidang PPA II. 2. Tim Bagian Keuangan RSUD Kab Ogan Ilir	6 Sep 2024	Melakukan Profiling dan Analisis Kinerja Keuangan BLUD dan Reviu Maturity Rating. Analisis Kinerja Keuangan BLUD yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan melihat tren belanja BLUD dalam periode waktu tertentu, sehingga pengelolaan anggaran dapat lebih efisien.
7.	Kegiatan Audiensi, Profiling Serta Sharing Knowledge Pengelolaan Keuangan dan Kinerja BLUD pada RSUD Kayu Agung TA 2024	1. Tim Kanwil DJPb Sumsel Bidang PPA II. 2. Tim Bagian Keuangan RSUD Kayu Agung	17 Sep 2024	Melakukan Profiling dan Analisis Kinerja Keuangan BLUD dan Reviu Maturity Rating. Analisis Kinerja Keuangan BLUD yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan melihat tren belanja BLUD dalam periode waktu tertentu, sehingga pengelolaan anggaran dapat lebih efisien.

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

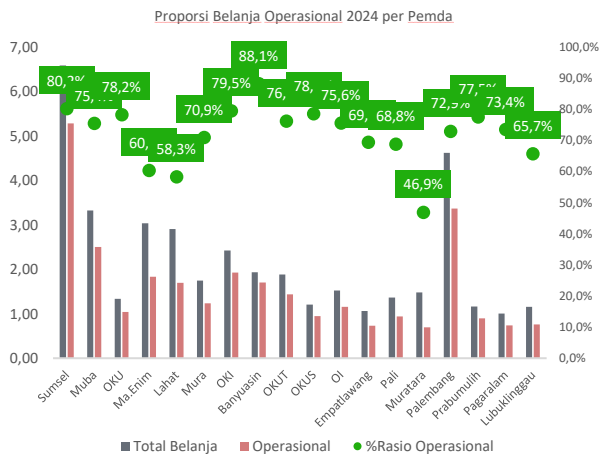
3.2.6. Isu Strategis Pelaksanaan APBD

Belanja daerah di Sumsel masih didominasi oleh belanja operasional. Secara rata-rata proporsi belanja operasional APBD 2024 di Sumsel sebesar 72,68%. Belanja operasional dipergunakan untuk membiayai kebutuhan operasional pemda dalam menjalankan pemerintahan dan layanan kepada masyarakat.

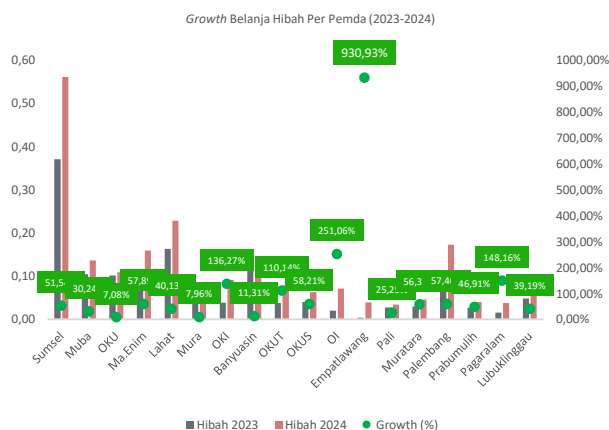


Terlihat dari grafik diatas bahwa proporsi belanja daerah (dikurangi belanja transfer) yang dipergunakan untuk operasional cukup besar (diatas 70%) dan hal tersebut terlihat sejak tahun 2017. Belanja modal yang diharapkan akan memberikan dampak jangka Panjang terhadap perekonomian daerah dan menjadi potensi peningkatan PAD di masa yang akan datang hanya mendapatkan bagian rata-rata sebesar 27,34%, khusus untuk belanja modal yang dipergunakan untuk jalan, irigasi dan jaringan rata-rata sebesar 17,12%.

Pemda yang memiliki proporsi belanja operasional yang paling besar terdapat pada Pemda Banyuasin sebesar 88,1% sedangkan Pemda yang memiliki proporsi belanja operasional terkecil terdapat pada Pemda Muratara sebesar 46,9%. Belanja operasional Pemda Banyuasin dipengaruhi adanya pembayaran belanja bunga dan belanja hibah.



Dalam masa pemilu dan pilkada di tahun 2024 terjadi peningkatan pada alokasi belanja Hibah. Pertumbuhan tertinggi belanja hibah terdapat pada Pemda Empat Lawang sebesar 930,93% (yoy). Untuk realisasi belanja terbesar terdapat pada Pemprov Sumsel sebesar Rp0,56 triliun. Pos peningkatan hibah terbesar terdapat pada hibah kepada pemerintah pusat dan hibah kepada kelompok dan organisasi kemasyarakatan.



Penerapan SIPD RI tahun 2024 sebagai sistem keuangan pemerintah daerah menjadi tantangan pengelolaan keuangan daerah. Di tahun 2024 penggunaan aplikasi SIPD RI sebagai sistem informasi pengelolaan keuangan daerah mempengaruhi proses bisnis di pemerintah daerah. Kendala yang sering ditemui oleh Pemda sebagai berikut :

- Belum tersedianya banyak fitur di aplikasi SIPD khususnya untuk pengesahan transaksi yang berasal dari BLUD;
- Aplikasi sering error saat digunakan (*force logout*), hal tersebut menyebabkan pemda memakan waktu lama dalam menyelesaikan pekerjaan;
- Sering muncul *double jurnal* pada buku besar;
- Pada fitur input saldo awal, masih terdapat beberapa akun yang belum tersedia sehingga berdampak kepada angka neraca;
- Angka yang dikeluarkan dari SIPD masih membutuhkan penyesuaian sehingga Pemda membuat pengawasan secara terpisah dari aplikasi (bahkan dibuat secara manual).

- Layanan helpdesk dari Pusdatin Kemendagri sangat lama sehingga Pemda harus berkoordinasi langsung ke Kemendagri jika ada kendala.

Proporsi alokasi belanja modal di Sumatera Selatan mayoritas dibawah 40%. Upaya peningkatan belanja daerah yang berkualitas telah diatur dalam UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan transfer. Belanja infrastruktur pelayanan publik yang dimaksud merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi Daerah. Belanja infrastruktur dimaksud berkorelasi erat dengan belanja modal khususnya belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Berdasarkan data alokasi pagu APBD 2024 pada Pemda lingkup Sumsel proporsi alokasi belanja dimaksud belum sebesar 40% atau melampaui. Secara rata-rata, pemerintah daerah di Sumsel mengalokasikan sebesar 18,35%. Angka tersebut masih jauh untuk memenuhi alokasi minimal 40% yang telah ditetapkan dalam UU. Pemda yang mengalokasikan tertinggi terdapat pada Pemda Musi Rawas Utara (Muratara) sebesar 38,49% sedangkan alokasi terendah terdapat pada Pemprov Sumsel sebesar 10,64%.



Penerapan alokasi minimal berdasarkan UU HKPD diterapkan paling lambat 5 tahun sejak diundangkan, maka pemda di Sumsel masih memiliki waktu s.d tahun 2027 untuk melakukan pengaturan proporsi belanja sesuai ketentuan dimaksud.

3.3. Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Konsolidasian mencakup konsolidasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan baik untuk LRA Pemerintah Pusat maupun untuk LRA Pemerintah Daerah. LRA Pemerintah Konsolidasian ini mencakup konsolidasi terhadap angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dilakukan eliminasi akun-akun resipokal. Dalam hal ini eliminasi dilakukan terhadap belanja tranfer ke daerah dari sisi LRA pemerintah pusat di eliminasi dengan pendapatan transfer dari sisi LRA pemerintah daerah.

3.3.1. Pendapatan Konsolidasian

Pendapatan konsolidasian wilayah Sumsel sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 mencapai Rp34,44 triliun dimana capaian ini tumbuh 15,66% (yoy). Pendapatan tersebut mayoritas lebih disumbang oleh peran pendapatan pemerintah pusat sebesar Rp22,12 triliun atau 64,23% dari total pendapatan konsolidasian. Pada aspek pendapatan yang bersumber dari perpajakan, Pemerintah Pusat masih mendominasi dengan porsi 72,33%, namun pada periode ini, capaian PNBP pada Tingkat konsolidasian Pemda lebih mendominasi dengan porsi 57,98% dari total PNBP. Angka PNBP pada pemerintah daerah dan Belanja Transfer pada pemerintah pusat merupakan angka setelah dilakukan eliminasi akun resprokal antara pendapatan transfer pemda dan belanja transfer pempus sebesar Rp32,85 triliun. Hal ini mengindikasikan peran dana transfer sangat mendominasi sebagai sumber pendapatan daerah di Sumsel. Pendapatan hibah konsolidasi menunjukkan kontraksi sebesar -28,08% (yoy).

3.3.2. Belanja Konsolidasian

Belanja konsolidasian wilayah Sumsel hingga Triwulan IV tahun 2024 sebesar 64,33 triliun dan tumbuh positif 6,36% (yoy). Dari sisi belanja, kontribusi dari belanja pemerintah daerah lebih dominan dibandingkan pemerintah pusat hingga periode triwulan IV 2024. Pemerintah pusat berkontribusi sebesar 33,52%, sementara pemerintah daerah berkontribusi sebesar

66,57%. Dari sisi belanja pemerintah dan transfer, peran pemerintah daerah mampu memberikan kontribusi sebesar 66,57% dan 96,15% dalam menggerakkan aktivitas perekonomian melalui kebijakan fiskal di Sumsel. Beberapa kegiatan pemilu dan pilkada serentak serta pembangunan infrastruktur di Sumsel memberikan kontribusi besar terhadap belanja konsolidasi.

3.3.3. Surplus/Defisit

Hingga triwulan IV tahun 2024, defisit konsolidasian sebesar Rp1,96 triliun terkontraksi -2,66% (yoy). Defisit didominasi oleh kontribusi pemerintah daerah yang mencapai 106,5%. Hal tersebut didorong oleh tingginya belanja pemerintah baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah s.d triwulan IV 2024.

3.3.4. Pembiayaan Konsolidasian

Pembiayaan konsolidasian di wilayah Sumsel sebesar Rp2,66 triliun, terkontraksi -26,70% (yoy). Realisasi penerimaan pembiayaan Rp2,34 triliun atau terkontraksi sebesar -35,55% (yoy) dan pengeluaran pembiayaan Rp0,31 triliun atau terkontraksi sebesar -63,53% (yoy). Pembiayaan konsolidasian didominasi oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari penggunaan SilPA di sisi penerimaan dan pembayaran pokok utang di sisi pengeluaran.

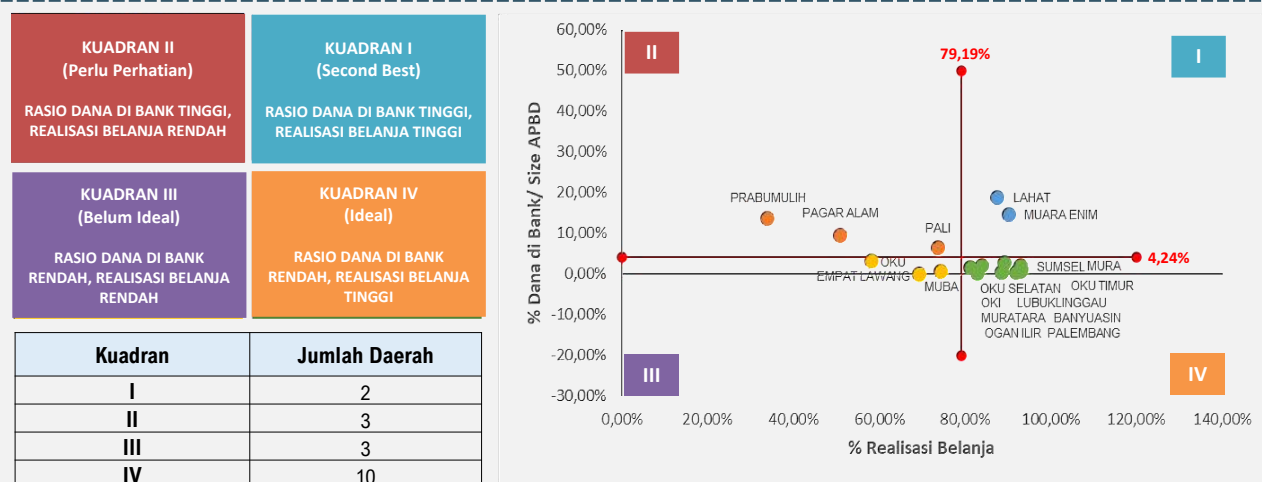
Tabel 2.12. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Sumsel s.d. Triwulan IV 2023-2024 (c-to-c)

I-Account (dalam Miliar Rupiah)	2023 Konsolidasian	2024					Growth 2023-2024
		Konsolidasian	Pusat	Daerah	Kontribusi		
					Pusat	Daerah	
A. PENDAPATAN	29,775.70	34,439.40	22,121.90	12,317.51	64.23%	35.77%	15.66%
I. Perpajakan	23,495.13	25,409.42	18,377.58	7,031.84	72.33%	27.67%	8.15%
II. PNBP	6,116.22	8,911.78	3,744.31	5,167.47	42.02%	57.98%	45.71%
III. Hibah	164.35	118.20	0.00	118.20	0%	100.00%	-28.08%
B. BELANJA	60,487.24	64,333.92	20,158.63	44,175.29	31.33%	68.67%	6.36%
I. Belanja Pemerintah	53,180.53	59,780.79	20,041.35	39,797.42	33.52%	66.57%	12.41%
II. Transfer	7,306.71	4,553.13	117.28	4,377.87	2.58%	96.15%	-37.69%
C. SURPLUS/DEFISIT	-30,711.54	-29,894.52	1,963.26	-31,857.78	-6.57%	106.57%	-2.66%
D. PEMBIAYAAN	2,764.70	2,026.40	0.00	2,664.39	0%	100.00%	-26.70%
I. Penerimaan	3,639.37	2,345.39	0.00	2,345.39	0%	100.00%	-35.55%
II. Pengeluaran	874.67	318.99	0.00	318.99	0%	100.00%	-63.53%
E. SILPA (SIKPA)	-27,946.84	-27,868.12	1,963.26	-29,831.38	-7.04%	107.04%	-0.28%

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Boks 3

Mayoritas Kinerja Belanja Daerah dan Rasio Dana di Bank Milik Pemerintah Daerah di Sumsel Optimal



Sumber: SIKRI (realisasi APBD) dan Direktorat PKN (Saldo RKUD), diolah

Untuk melihat kinerja pengelolaan anggaran pemerintah daerah, digunakan analisis kuadran berdasarkan dua indikator utama, yaitu rasio dana di bank dan realisasi belanja. Rasio dana di bank mencerminkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, di mana rasio yang terlalu tinggi menunjukkan dana yang belum dimanfaatkan secara optimal. Sementara itu, realisasi belanja mengukur seberapa besar anggaran telah digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan daerah dibandingkan dengan total pagu.

Berdasarkan kedua indikator ini, daerah dikelompokkan ke dalam empat kuadran. Kuadran I (*Second Best*) mencakup daerah dengan rasio dana di bank rendah dan realisasi belanja tinggi, menunjukkan pengelolaan anggaran yang mendekati optimal. Kuadran II (Perlu Perhatian) mencakup daerah dengan rasio dana di bank rendah tetapi realisasi belanja juga rendah, mengindikasikan lambatnya penyerapan anggaran meskipun dana sudah tersedia. Selanjutnya, Kuadran III (Belum Ideal) mencakup daerah dengan rasio dana di bank tinggi dan realisasi belanja rendah, menandakan stagnasi anggaran karena banyaknya dana yang mengendap di bank tanpa digunakan untuk kegiatan produktif. Terakhir, Kuadran IV (Ideal) mencakup daerah dengan rasio dana di bank tinggi dan realisasi belanja tinggi, yang mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang sangat baik dengan belanja produktif yang optimal dan cadangan dana yang sehat.

Hasil analisis kuadran menunjukkan bahwa mayoritas pemda sumsel memiliki rasio dana dan kinerja belanja yang optimal pada akhir tahun 2024. Hal ini diindikasikan dari terdapat 10 pemda yang memiliki rasio dana di bank rendah dan realisasi belanja daerah tinggi (kuadran IV) mencerminkan pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif. Selain itu, terdapat 2 pemda yang memiliki rasio dana di bank tinggi dan realisasi belanja tinggi (kuadran I).

Namun demikian, beberapa pemda masih perlu perhatian karena realisasi belanjanya rendah, dan saldo di RKUD masih tinggi mengindikasikan dana APBD belum dioptimalkan dalam memberikan dampak bagi pembangunan dan masyarakat. Terdapat 3 pemda di Kuadran II (Perlu Perhatian). Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi stagnasi penggunaan anggaran yang dapat menghambat pembangunan. Selain itu, terdapat 3 pemda berada di Kuadran III (Belum Ideal), yaitu daerah dengan rasio dana di bank rendah dan realisasi belanja rendah. Hal ini menunjukkan potensi ketidakefisienan dalam alokasi dan penyerapan anggaran.

Pentingnya peningkatan efisiensi pengelolaan dana dan belanja daerah, terutama bagi pemda di Kuadran II dan III, agar dapat mendukung pembangunan daerah secara optimal. Pemerintah daerah perlu berfokus pada strategi untuk mempercepat penyerapan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan belanja.

BAB IV

Pengembangan Ekonomi Daerah

4.1. Pendahuluan

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) menjadi inisiatif strategis yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya untuk memperkuat kualitas kebijakan desentralisasi fiskal yang telah berjalan lebih dari 18 tahun. Dalam UU HKPD tersebut, salah satu pilar utama adalah tentang Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah. Pilar tersebut berfokus untuk menyelaraskan antara kebijakan fiskal daerah dengan pemerintah pusat sehingga tercipta sinergi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara, yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Selanjutnya, sebagai wujud dari upaya pemerintah dalam mengharmonisasikan belanja pemerintah pusat dan daerah, pada tahun 2023, Menteri Keuangan menetapkan *Standar Operating Prosedure* (SOP) Link nomor 70 tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD. SOP tersebut memuat mekanisme Monev yang dilakukan oleh 3 (tiga) *Unit in Charge* (UIC) Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Anggaran (DJA) dan Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPB) pada sisi perencanaan dan penganggaran, Ditjen Perbendaharaan (DJPb) c.q. Kanwil DJPb dari sisi pelaksanaan anggaran.

Secara khusus, dalam pelaksanaan SOP Link 70 Tahun 2023, Kanwil DJPb mendapatkan peran untuk mengawal pelaksanaan Belanja K/L yang mendukung Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik melalui aktivitas sebagai berikut:

1. **reviu kinerja realisasi anggaran dan capaian output harmonis;**
2. **analisis permasalahan harmonisasi belanja pemerintah pusat yang mendukung DAK Fisik di masing-masing wilayah;**
3. **identifikasi upaya harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah.**

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, pada Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahun 2024, Kanwil DJPb Provinsi Sumsel akan menyajikan data dan menjelaskan terkait gambaran kinerja, kendala dan tantangan, serta upaya harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik di wilayah Sumsel.

4.2. Kebijakan Penggunaan DAK Fisik 2024

Nasional

Dalam RKP tahun 2024, Pemerintah telah menetapkan 4 (empat) prioritas dari penggunaan DAK Fisik, yaitu

1. **pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem**, yang terdiri dari 2 (dua) tematik, yaitu
 - a. **pengentasan pemukiman kumuh terpadu** (bidang air minum, sanitasi, dan perumahan pemukiman);
 - b. **penguatan kawasan sentra produksi pangan pertanian, perikanan, dan hewani** (bidang pertanian, irigasi, kelautan dan perikanan, dan jalan).
2. **penguatan daya saing usaha**, yang terdiri dari 2 (dua) tematik, yaitu
 - a. **penguatan destinasi pariwisata prioritas** (bidang pariwisata, industri kecil dan menengah, UMKM, perdagangan, lingkungan hidup, dan jalan);
 - b. **pengembangan *food estate*** (bidang pertanian, irigasi, kehutanan, dan jalan).

3. **peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (termasuk penurunan *stunting*) dan Pendidikan**, yang terdiri dari 4 (empat) bidang, yaitu Pendidikan, kesehatan, air minum, dan sanitasi;
4. **percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pembangunan daerah rendah karbon dan transisi energi**, yang terdiri dari 1 (satu) tematik dan 1 (satu) non tematik, yaitu:
 - a. **peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah Afirmasi** (transportasi pedesaan, transportasi perairan, jalan, dan infrastruktur energi terbarukan);
 - b. **bidang jalan.**

Regional Sumatera Selatan

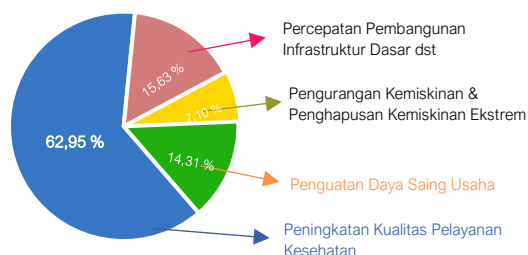
Sejalan dengan arah kebijakan nasional, rencana penggunaan DAK Fisik di wilayah Sumsel juga terdiri dari 4 (empat) prioritas yaitu

1. **pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem**, dengan tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan pertanian, perikanan, dan hewani (bidang pertanian, irigasi, kelautan dan perikanan, dan jalan);
2. **penguatan daya saing usaha**, yang terdiri dari 2 (dua) tematik, yaitu
 - a. **penguatan destinasi pariwisata prioritas** (bidang jalan);
 - b. **pengembangan *food estate*** (bidang pertanian, irigasi, kehutanan, dan jalan);
3. **peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (termasuk penurunan *stunting*) dan Pendidikan**, yang terdiri dari bidang Pendidikan, kesehatan, dan sanitasi;
4. **percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pembangunan daerah rendah karbon dan transisi energi**, dengan tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah Afirmasi (transportasi pedesaan, transportasi perairan, jalan, dan infrastruktur energi terbarukan) dan non tematik bidang jalan.

4.3. Alokasi DAK Fisik Wilayah Sumsel

Pada tahun 2024, total pagu penyaluran anggaran DAK Fisik di wilayah Sumsel sebesar Rp1,43 triliun, turun 8,92% atau 1,57 triliun dibandingkan pagu anggaran tahun 2023. Namun, dari rencana kegiatan yang disusun oleh Pemerintah Daerah Sumsel, alokasi anggaran DAK Fisik Tahun 2024 yang disepakati sebesar Rp1,42 triliun

Grafik 3.1. Penggunaan Prioritas DAK Fisik Sumsel



sumber: Aplikasi OM SPAN TKD, 2024

Dilihat dari prioritas penggunaan, sebagian besar DAK Fisik Sumsel T.A. 2024 digunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan yaitu mencapai Rp896,58 miliar atau 62,95% dari total alokasi anggaran. Paling rendah digunakan untuk pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp101,18 miliar atau 7,10% dari total alokasi anggaran.

Tabel 3.1. Penggunaan DAK Fisik Sumsel T.A. 2024 Berdasarkan Bidang

Bidang	Alokasi (Rp Miliar)	Share
Pendidikan	566,01	39,74%
Jalan	422,18	29,64%
Kesehatan dan KB	329,52	23,14%
Pertanian	50,62	3,55%
Kelautan dan Perikanan	22,83	1,60%
Irigasi	18,92	1,33%
Transportasi Perdesaan	9,11	0,64%
Transportasi Perairan	2,65	0,19%
Pariwisata	1,30	0,09%
Sanitasi	1,05	0,07%
Kehutanan	0,10	0,01%

sumber: Aplikasi OM SPAN TKD, 2024

Berdasarkan bidang, alokasi DAK Fisik wilayah Sumsel T.A. 2024 terbesar pada bidang Pendidikan, Jalan, dan Kesehatan yaitu masing-masing Rp566,01 miliar (39,74%), Rp422,18 miliar (29,64%), dan Rp329,62 miliar (23,14%).

Tabel 3.2. Penggunaan DAK Fisik Sumsel T.A. 2024 Berdasarkan Tematik

Tematik	Alokasi (Rp Miliar)	Share
Pengembangan <i>food estate</i>	187,35 M	13,15%
Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	101,18 M	7,10%
Peningkatan Konektivitas & Elektrifikasi di Daerah Afirmasi	53,74 M	3,77%
Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	16,53 M	1,16%

sumber: Aplikasi OM SPAN TKD, 2024

Selanjutnya, jika dilihat dari prioritas penggunaan berdasarkan tematik, alokasi terbesar berada pada tema pengembangan *food estate* yaitu sebesar Rp187,35 miliar atau memiliki *share* 13,15% dari total alokasi DAK Fisik T.A. 2024.

4.4. Alokasi Belanja K/L RO Harmonis Wilayah Sumsel yang Mendukung DAK Fisik pada 6 Bidang

Alokasi Belanja K/L RO Harmonis yang mendukung DAK Fisik di wilayah Sumsel T.A. 2024 mencapai Rp2,75 triliun. Alokasi tersebut terbagi dalam 6 bidang dan 1 (satu) tematik, yang terdapat pada 4 (empat) K/L, 20 Satuan Kerja, dan 111 Rincian Output (RO). Secara keseluruhan, alokasi Belanja K/L (RO) Harmonis tersebut porsinya mencapai 13,00% dari total alokasi belanja K/L di wilayah Sumsel.

Secara keseluruhan, alokasi terbesar pada Kementerian PUPR sebesar 2,61 triliun atau 94,90% dari total Belanja K/L (RO) Harmonis yang mendukung DAK Fisik. Selanjutnya, pada Kementerian Pendidikan sebesar Rp113,48 miliar (porsi 4,12%), Kementerian Pertanian Rp22,07 miliar (porsi 0,80%), dan Kementerian Kesehatan Rp3,75 miliar (porsi 0,13%).

Bidang Pendidikan

Alokasi Belanja K/L RO Harmonis Bidang Pendidikan di wilayah Sumsel T.A. 2024 sebesar Rp158,20 miliar, atau 5,75% dari total alokasi. Alokasi tersebut terdapat pada 2 (dua) Kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kementerian PUPR.

Pada Kementerian Pendidikan, alokasi Belanja K/L RO Harmonis tahun 2024 mencapai Rp113,48 miliar atau 71,73% dari total alokasi di bidang pendidikan. Alokasi tersebut tersebar pada 3 (tiga) Satuan kerja dan memiliki 7 RO. Satuan Kerja yang dimaksud, yaitu

1. Balai Bahasa Sumsel (Rp738,57 juta);
2. Balai Guru Penggerak Prov. Sumsel (Rp98,78 miliar);
3. Balai Penjamin Mutu Pendidikan Prov. Sumsel (Rp13,96 miliar)

Pada Kementerian PUPR, alokasi Belanja K/L RO Harmonis tahun 2024 sebesar Rp44,71 miliar atau 28,27% dari total alokasi di bidang pendidikan. Alokasi tersebut terdapat pada 1 (satu) Satuan Kerja yaitu Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Prov. Sumsel dengan 1 (satu) RO Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah.

Bidang Kesehatan dan KB

Alokasi Belanja K/L RO Harmonis Bidang Kesehatan dan KB di wilayah Sumsel T.A. 2024 sebesar Rp3,75 miliar, atau 0,13% dari total alokasi. Alokasi tersebut terdapat pada Kementerian Kesehatan yang tersebar pada 2 (dua) Satuan Kerja dan memiliki 23 RO. Satuan Kerja tersebut adalah

1. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang (Rp1,47 miliar);
2. Dinas Kesehatan Sumsel (Rp2,28 miliar)

Bidang Jalan

Mayoritas alokasi Belanja K/L RO Harmonis terdapat pada Bidang Jalan yang memiliki alokasi pada T.A. 2024 sebesar Rp2,43 triliun atau memiliki porsi 88,36% dari total alokasi. Semua alokasi tersebut terdapat pada Kementerian PUPR yang terbagi pada 6 (enam) satuan kerja dan 47 rincian output. Satuan Kerja yang dimaksud adalah

1. Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Prov. Sumsel (Rp1,30 triliun);
2. Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Prov. Sumsel (Rp419,14 miliar);
3. Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Sumsel (Rp293,44 miliar);
4. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumsel (Rp222,12 miliar);
5. Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov. Sumsel (Rp187,05 miliar);
6. Dinas PU Bina Marga Prov. Sumsel (Rp7,86 miliar)

Tabel 3.3. Alokasi Belanja K/L (RO) Harmonis Yang Mendukung DAK Fisik Wilayah Sumsel T.A. 2024

No	Bidang	K/L	Pagu (Rp miliar)	Jumlah Satker	Jumlah RO
1	Pendidikan	Kementerian PUPR	44,71	1	1
		Kementerian Pendidikan	113,48	3	7
2	Kesehatan dan KB	Kementerian Kesehatan	3,75	2	23
3	Jalan	Kementerian PUPR	2.435,22	6	47
4	Pertanian	Kementerian Pertanian	22,07	4	21
5	Air Minum	Kementerian PUPR	58,20	5	8
6	Sanitasi	Kementerian PUPR	73,56	2	4
Total			2.751.02	23	111

Sumber: SINTESA DJPb, 2024

Bidang Pertanian

Alokasi Belanja K/L RO Harmonis Bidang Pertanian di wilayah Sumsel T.A. 2024 sebesar Rp22,07 miliar, atau 0,80% dari total alokasi. Alokasi tersebut terdapat pada Kementerian Pertanian yang tersebar pada 4 (empat) Satuan Kerja yang memiliki 21 RO. Satuan Kerja tersebut adalah

1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumsel (Rp11,97 miliar);
2. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa (Rp4,98 miliar);
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel (Rp3,34 miliar);
4. Dinas Perkebunan Prov. Sumsel (Rp1,76 miliar)

Bidang Air Minum

Alokasi Belanja K/L RO Harmonis Bidang Air Minum di wilayah Sumsel T.A. 2024 sebesar Rp58,20 miliar, atau 2,11% dari total alokasi. Alokasi tersebut terdapat pada Kementerian PUPR yang tersebar pada 5 (lima) Satuan Kerja yang memiliki 8 (delapan) RO. Satuan Kerja dimaksud adalah

1. Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII (Rp2,22 miliar);
2. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumsel (Rp1,56 miliar);
3. Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sumatera VIII (Rp2,18 miliar);
4. Pelaksanaan Prasarana Permukiman Prov. Sumsel (18,67 miliar);
5. SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VIII Prov. Sumsel (Rp33,55 miliar).

Bidang Sanitasi

Alokasi Belanja K/L RO Harmonis Bidang Sanitasi di wilayah Sumsel T.A. 2024 sebesar Rp73,56 miliar, atau 2,67% dari total alokasi. Alokasi tersebut tersebar 2 (dua) Satuan Kerja dan memiliki 4 RO. Satuan Kerja tersebut adalah

1. Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumsel (Rp3,65 miliar);
2. Pelaksanaan Prasarana Permukiman Prov. Sumsel (Rp69,91 miliar).

4.5. Kinerja Realisasi Belanja K/L RO Harmonis Yang Mendukung DAK Fisik Wilayah Sumsel

Secara total, sampai dengan akhir Desember 2024, Belanja K/L RO Harmonis Yang Mendukung DAK Fisik Wilayah Sumsel telah terealisasi sebesar Rp2,56 triliun atau 93,39% dari total alokasi. Sementara anggaran DAK Fisik wilayah Sumsel telah terealisasi sebesar Rp1,40 triliun atau 97,95% dari total alokasi DAK Fisik T.A. 2024.

Tabel 3.4. Realisasi Belanja K/L RO Harmonis Per Bidang

Bidang	Alokasi	Realisasi	%
Air Minum	58,20	55,97	96,17
Jalan	2.435,23	2.336,92	95,96
Kesehatan	3,75	3,31	88,23
Pendidikan	158,21	146,81	92,80
Pertanian	22,07	21,33	96,64
Sanitasi	73,57	4,79	6,51
Total	2.751,03	2.569,14	93,39

sumber: Sintesa DJPb, 2024

Secara nominal, realisasi Belanja K/L (RO) Harmonis terbesar disumbang oleh bidang Jalan yang terealisasi sebesar Rp2,33 triliun. Sementara yang terendah adalah bidang Sanitasi yang sebesar Rp4,79 miliar. Namun demikian, alokasi pada salah satu RO di bidang Sanitasi untuk Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan untuk pembangunan TPST Sementul mengalami revisi dari Kemeterian PUPR dan batal dilaksanakan pada tahun 2024 karena akses jalan yang belum siap sehingga dialihkan di tahun 2025. Oleh karena itu, dari Rp73,57 miliar alokasi yang dilaksanakan di tahun 2024 dengan adanya pembatalan RO tersebut yang dialokasikan sebesar Rp68,74 miliar, maka alokasi riil pada tahun 2024 untuk bidang sanitasi adalah sebesar Rp4,81 miliar. Dengan demikian, capaian belanja bidang sanitasi juga telah tercapai optimal dengan capaian 99,31%.

4.6. Capaian RO Utama pada Belanja K/L RO Harmonis Yang Mendukung DAK Fisik

Bidang Pendidikan

Pagu tertinggi pada Belanja K/L RO Harmonis Yang Mendukung DAK Fisik Bidang Pendidikan wilayah Sumsel tahun 2024 adalah RO Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru pada Satuan

Kerja BGP Prov. Sumsel dengan alokasi anggaran sebesar **Rp79,36 miliar**. Sampai dengan akhir Desember 2024, anggaran RO tersebut tercatat telah terealisasi sebesar Rp71,06 miliar atau 89,54% dari alokasi. Meskipun realisasi anggaran tidak mencapai 100%, Capaian Output RO tersebut telah terealisasi sebesar 100%. Dari target 4.235 guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru, sebanyak 4.235 guru telah terealisasi mengikuti program tersebut melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan BGP Prov. Sumsel seperti Pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Kinerja, Bimbingan Teknis Guru SD dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling, Konsorsium Pendidikan Daerah, Simposium Guru 2024, Pleno Kelulusan Diseminasi PKG PJOK, Internalisasi Model Kompetensi JF Pamong Belajar, Lokakarya 7 PGP angkatan 11, dan Persiapan Kelulusan PGP angkatan 11. Hal ini menunjukkan bahwa meski capaian serapan tidak mencapai 100%, namun capaian output Satuan Kerja BGP Prov. Sumsel efisien dalam pelaksanaan RO tersebut.

Pagu tertinggi kedua yaitu RO Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Prov. Sumsel dengan total alokasi tahun 2024 sebesar **Rp44,71 miliar**. Hingga akhir Desember 2024, realisasi anggaran pada RO tersebut mencapai Rp44,59 miliar atau 99,74% dari alokasi. Selain itu, Capaian Output pada RO tersebut juga telah terealisasi sebesar 100%. Dari target 20 unit sekolah dasar dan menengah yang direhabilitasi dan direnovasi, semuanya telah dilaksanakan di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Prov. Sumsel telah *on track* dalam melaksanakan RO tersebut.

Pagu tertinggi ketiga adalah RO Guru dan Tenaga Kependidikan yang Mendapat Pendampingan Pembelajaran pada Satuan Kerja BGP Prov. Sumsel dengan alokasi sebesar **Rp14,85 miliar**. Sampai dengan akhir Desember 2024, anggaran RO tersebut telah terealisasi sebesar Rp13,62 miliar atau 91,68% dari alokasi. Capaian Output pada RO tersebut juga telah terealisasi dengan baik yaitu sebesar 100%. Dari target 1.988 orang yang mendapat pendampingan pembelajaran, telah didampingi sejumlah yang sama pada tahun 2024 melalui kegiatan Pelaksanaan Studi Tiru dan Refleksi PSP.

Bidang Kesehatan

Pagu tertinggi pada Belanja K/L RO Harmonis yang Mendukung DAK Fisik Bidang Kesehatan wilayah Sumsel tahun 2024 adalah RO Tenaga Kesehatan yang dilatih Terkait Manajemen dan Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Satuan Kerja Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang, dengan total alokasi sebesar **Rp1,47 miliar**. Sampai dengan akhir Desember 2024, realisasi anggaran pada RO tersebut sebesar Rp1,17 miliar atau mencapai 80,05% dari alokasi. Selain itu, Capaian Output RO tersebut mencapai 85,16%. Dari target 310 orang yang dilatih terkait manajemen dan penyelenggaraan Laboratorium, sebanyak 264 orang yang telah dilatih. Hal ini terjadi dipengaruhi, ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan hal ini dikarenakan anggaran bersumber PNPB sedangkan penerimaan PNPB sampai akhir Desember sebesar 63,88% sehingga hal ini mempengaruhi penggunaan untuk pelaksanaan kegiatan.

Pagu tertinggi kedua dan ketiga terdapat pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan, yaitu RO Tenaga Kesehatan yang

Ditingkatkan Kapasitasnya terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dengan total alokasi sebesar **Rp453,52 juta**, dan RO Pemerintah Daerah yang Dilakukan Pembinaan Revitalisasi Posyandu dengan total alokasi sebesar **Rp235,74 juta**. Hingga akhir Desember 2024, capaian realisasi anggaran pada RO tersebut masing-masing mencapai 97,89% dan 93,78% dari alokasi dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran di akhir tahun. Dari sisi Capaian Output, keduanya menunjukkan capaian yang optimal mencapai 100% meskipun dilakukan efisiensi anggaran. Dari target 52 orang tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait upaya perbaikan status gizi, sejumlah yang sama telah terlaksana di tahun 2024. Selain itu, dari target 17 pemda yang dilakukan pembinaan revitalisasi posyandu, sejumlah yang sama telah selesai dilaksanakan sesuai target meskipun dengan kondisi adanya efisiensi anggaran.

Bidang Jalan

Pagu tertinggi pada Belanja K/L RO Harmonis Yang Mendukung DAK Fisik Bidang Jalan wilayah Sumsel tahun 2024 adalah RO Pembangunan Jalan Bebas Hambatan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Prov. Sumsel, dengan total alokasi sebesar **Rp1,30 triliun**. Sampai dengan akhir Desember 2024, realisasi anggaran RO tersebut sebesar Rp1,30 triliun atau 100% dari alokasi. Capaian Output RO tersebut juga telah menapai target yaitu membangun 8 KM jalan bebas hambatan Betung-Tempino di 2024.

Pagu tertinggi kedua adalah RO Pembiayaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU-AP) Jalintim Sumsel pada Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumsel, dengan alokasi sebesar **Rp222,12 miliar**. Hingga akhir Desember 2024, realisasi anggaran RO tersebut sebesar Rp222,12 miliar atau 100% dari alokasi serta Capaian Output RO yang juga tercapai 100%.

Pagu tertinggi ketiga adalah RO Jalan Strategis (ProPN) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Sumsel, dengan alokasi sebesar **Rp198,44 miliar**. Hingga akhir Desember 2024, realisasi anggaran RO tersebut sebesar Rp198,32 miliar atau 99,94% dari alokasi. Capaian Output RO tersebut juga menunjukkan capaian yang optimal mencapai 100% (Jalan Strategis (ProPN) mencapai 44 Km dan 991 m di tahun 2024.

Bidang Air Minum

Pagu tertinggi pada Belanja K/L RO Harmonis Yang Mendukung DAK Fisik Bidang Air Minum wilayah Sumsel tahun 2024 adalah RO Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Prov. Sumsel, dengan alokasi sebesar **Rp18,67 miliar**. Sampai dengan Desember 2024, realisasi anggaran RO sebesar Rp18,67 miliar atau 99,99% dari total alokasi. Capaian Output RO ini juga telah terealisasi optimal mencapai 100% dengan telah tersambungunya 6.720 Sambungan Rumah Air Minum Berbasis Masyarakat di tahun 2024.

Pagu tertinggi kedua adalah RO Jaringan Air Baku yang Direhabilitasi pada Satuan kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VIII Prov. Sumsel, dengan total alokasi sebesar **Rp16,06 miliar**. Hingga akhir Desember 2024, realisasi anggaran RO sebesar

Rp14,94 miliar atau baru 93,04% dari alokasi. Capaian Output RO ini telah terealisasi optimal mencapai 100% dengan jaringan air baku yang telah terealisasi sesuai target yaitu 0,77 Km. Capaian realisasi anggaran yang belum mencapai 100% dipengaruhi oleh paket fisik dan supervisi masuk RPATA karena pekerjaan selesai di 31 des 2024, sehingga realisasi baru akan tercatat saat satker telah mengajukan SPM Nihil RPATA di tahun 2025.

Pagu tertinggi ketiga adalah RO Intake dan Jaringan Transmisi Air Baku Embung Universitas Sriwijaya yang Dibangun pada Satuan Kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VIII Prov. Sumsel, dengan total alokasi sebesar Rp8,90 miliar. Sampai dengan akhir Desember 2024, realisasi anggaran RO sebesar Rp8,09 miliar atau 90,91% dari alokasi. Capaian Output RO telah mencapai 90,91% juga dari target volume pembangunan intake dan jaringan transmisi air baku embung dengan volume 1 Km.

Bidang Sanitasi

Belanja K/L RO Harmonis yang mendukung DAK Fisik Bidang Sanitasi wilayah Sumsel tahun 2024 pada awalnya memiliki 3 (tiga) RO yaitu Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota, dan Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi. Namun demikian, alokasi pada RO Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan untuk pembangunan TPST Sementul mengalami revisi dari Kemeterian PUPR dan batal dilaksanakan pada tahun 2024 karena akses jalan yang belum siap sehingga dialihkan di tahun 2025. Oleh karena itu, hanya terdapat 2 RO yang dilaksanakan di tahun 2024.

RO Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota mendapatkan alokasi sebesar Rp3,46 miliar. Sementara itu, RO Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi mendapatkan alokasi sebesar Rp1,35 miliar. Dari kedua RO tersebut, sampai dengan akhir Desember 2024, capaian kedua RO tersebut tercapai optimal dengan masing-masing mencapai 99,99% dan 97,58%. Dari sisi capaian output, kedua RO tersebut tercapai 100% target dengan tersambunganya sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota ke 20 KK, serta dilakukannya pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi ke 17 pemda di wilayah Sumsel.

Bidang Pertanian

Pagu tertinggi pada Belanja K/L RO Harmonis yang mendukung DAK Fisik Bidang Pertanian wilayah Sumsel tahun 2024 adalah RO Area Penyaluran Benih Padi pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumsel dengan alokasi sebesar Rp4,67 miliar. Hingga akhir Desember 2024, realisasi anggaran RO sebesar Rp4,66 miliar atau mencapai 99,86% dari alokasi. Capaian output telah tercapai 100% dengan area penyaluran benih padi seluas 13.000 hektar di Sumsel.

Pagu tertinggi kedua adalah RO Area Penyaluran Benih Jagung yang juga pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Prov. Sumsel dengan alokasi sebesar Rp4,50 miliar. Hingga akhir Desember 2024, realisasi anggaran sebesar Rp4,49 miliar atau mencapai 99,81% dari alokasi.

Capaian ouput tercapai optimal mencapai 100% sesuai target, dengan area penyaluran benih jagung seluas 5.000 hektas di wilayah Sumsel.

Pagu tertinggi ketiga adalah RO Bibit Ternak Unggul pada Satuan Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Semabawa dengan alokasi sebesar Rp3,43 miliar. Sampai dengan akhir Desember 2024, realisasi anggaran RO sebesar Rp3,38 miliar atau telah mencapai 98,60% dari alokasi. Realisasi capaian ouput juga telah melampaui target 100% dimana dihasilkan lebih dari 29.745 bibit ternak unggul yaitu 37.458 ekor penetasan DOC dan 26 ekor kelahiran ternak sapi.

4.7. Kendala dan Tantangan

Dalam pelaksanaan Belanja K/L RO Harmonis yang mendukung DAK Fisik di wilayah Sumsel tahun 2024, terdapat beberapa kendala dan/atau tantangan yang dihadapi, yaitu

1. Adanya blokir anggaran yang menyebabkan Satuan Kerja belum dapat melaksanakan kegiatan sesegera mungkin;
2. Faktor eksternal seperti lokasi yang sulit untuk diakses sehingga menyebabkan pengangkutan material harus dilakukan secara konvensional, banjir yang berdampak pada perubahan rencana dan anggaran pekerjaan;
3. Proses pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama;
4. Untuk pembangunan infrastruktur, terdapat tantangan dalam pembebasan lahan yang menyebabkan pelaksanaan pembangunan fisik tertunda;
5. Terdapat kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu regulasi dari pusat.

Sementara itu, dalam pelaksanaan DAK Fisik di wilayah Sumsel tahun 2024, terdapat beberapa kendala dan/atau tantangan yang dihadapi, yaitu

1. Terlambatnya terbit peraturan pengelolaan DAK Fisik yang baru berlaku akhir April 2024 sehingga menjadi faktor penahan dalam penyaluran DAK Fisik.
2. Penyelesaian perekaman dan persetujuan data kontrak yang mendekati batas akhir.
3. Beberapa OPD teridentifikasi terlambat melakukan proses pengadaan yang disebabkan adanya faktor belum menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan adanya proses pergeseran APBD akibat penerapan Kebijakan DAU yang ditentukan penggunaannya.
4. Pemahaman Pemda terkait ketentuan teknis penyampaian dokumen masih belum komprehensif.

4.8. Upaya Sinkronisasi Satuan Kerja dan Pemda

Untuk memastikan program dan kegiatan Belanja K/L dengan DAK Fisik dapat berjalan secara harmonis, Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan beberapa hal:

1. Tahap perencanaan, Satuan Kerja Pemerintah Pusat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur, Satker Kementerian PUPR berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah dalam penentuan lokasi atau lokus pembangunan infrastruktur

2. Tahap Pelaksanaan, Satuan Kerja Pemerintah Pusat, dalam hal upaya peningkatan kapasitas Guru, Satuan Kerja Kementerian Pendidikan berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah terkait penentuan peserta guru yang akan ditugaskan.
3. Koordinasi dan Sinergi Program: Mengadakan forum komunikasi antara Satuan Kerja K/L dan Pemda guna

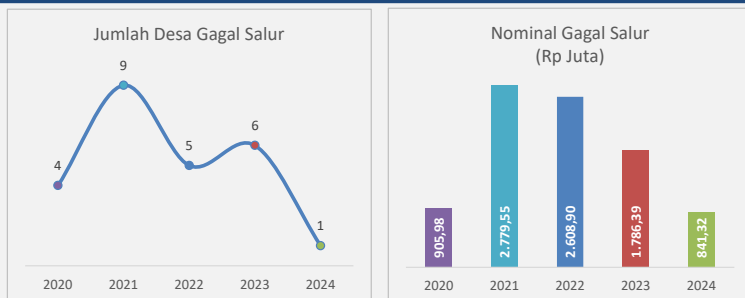
menyelaraskan program kerja dan menghindari tumpang tindih alokasi anggaran.

4. Evaluasi Berkala: Melakukan revidi berkala terhadap realisasi anggaran dan output yang telah dicapai serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan program.

Boks 4

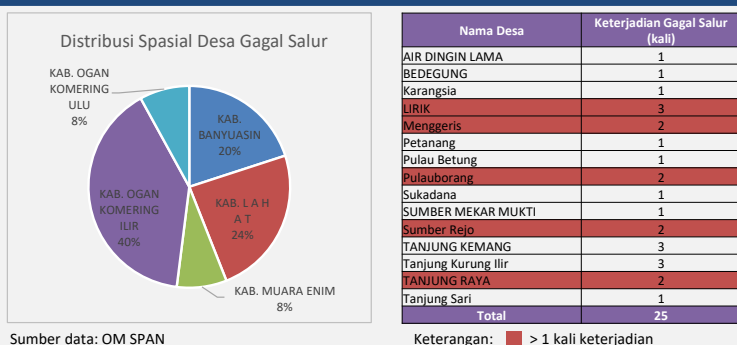
Keterjadian Gagal Salur Dana Desa di Sumsel

Jumlah dan Nominal Gagal Salur Dana Desa di Provinsi Sumsel, 2020-2024



Sumber data: OM SPAN

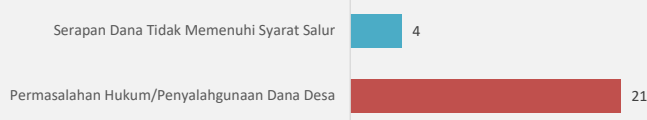
Distribusi dan Keterjadian Gagal Salur Dana Desa di Provinsi Sumsel, 2020-2024



Sumber data: OM SPAN

Keterangan: ■ > 1 kali keterjadian

Penyebab Gagal Salur



Dalam 5 tahun terakhir, terjadi 25 kejadian gagal salur dana desa di Provinsi Sumatera Selatan dengan kejadian tertinggi pada tahun 2021 dimana terdapat 9 desa yang mengalami gagal salur. Secara nominal, meskipun dalam tren yang menurun namun total gagal salur dana desa dalam 5 tahun mencapai Rp8,9 miliar yang menyebabkan turunnya efektivitas penyaluran dan gagalnya rencana pembangunan pada desa terkait. Secara spasial, keterjadian gagal salur paling banyak terjadi di Kabupaten OKI dimana mencapai 40% dari total keterjadian dalam 5 tahun terakhir.

Terdapat beberapa desa yang mengalami keterjadian gagal salur berulang (> 1 kali) dalam beberapa tahun mengindikasikan perlunya perhatian khusus pada desa-desa terkait. Kejadian gagal salur dana desa disebabkan diantaranya permasalahan hukum / penyalahgunaan dana desa, keterlambatan penyampaian laporan desa, tidak tercapainya serapan, maupun kendala pemenuhan syarat salur. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa perlunya perhatian untuk memitigasi potensi gagal salur dana desa karena berdampak pada tidak berjalannya pembangunan di desa dan menurunnya efektivitas penyaluran dana desa di Sumsel.

Peningkatan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan dana desa perlu dilakukan melalui pembentukan tim pengawas independen dari lapisan masyarakat, kolaborasi dengan aparat penegak hukum dalam deteksi penyalahgunaan, serta sosialisasi dan internalisasi nilai integritas kepada aparat desa dalam upaya pencegahan.

Komisi Pemberantasan Korupsi perlu menyiapkan program internalisasi nilai integritas kepada aparat desa, serta merekrut lapisan masyarakat desa untuk menjadi penyuluh anti korupsi sebagai cikal bakal pembentukan tim pengawas independen desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan inspektorat daerah dan aparat hukum untuk melakukan peningkatan pengawasan terhadap penggunaan dana desa melalui monitoring dan evaluasi berkala dan deteksi dini indikasi penyalahgunaan dana desa.

BAB V

Analisis Tematik



5.1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Ketahanan Pangan Nomor 18 tahun 2012, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Definisi tersebut bermakna bahwa pencapaian ketahanan pangan dapat diwujudkan melalui kedaulatan pangan (food sovereignty) dengan kemandirian pangan (food resilience) serta keamanan pangan (food safety)

Isu ketahanan pangan menjadi mega tren di masa yang akan datang dan menjadi fundamental dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Gangguan terhadap ketahanan pangan dapat menimbulkan gejala sosial dan politik yang membahayakan stabilitas nasional. Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama Pemerintahan Presiden Prabowo dengan komitmen Indonesia menuju swasembada pangan dan energi sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global yang makin kompleks. Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi sangat vital bagi Indonesia karena jumlah penduduknya sangat besar dengan wilayah yang luas dan tersebar.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Terdapat tiga aspek pengukuran ketahanan pangan dalam IKP, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan kemanfaatan pangan. Konsep dan penyusunan IKP mengadopsi pengukuran indeks global (Global Food Security Index - GFSI) dengan berbagai penyesuaian metodologi sesuai dengan ketersediaan data dan informasi di tingkat wilayah kabupaten/kota dan provinsi (Bapanas, 2022).

Indikator ini memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKP dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi, serta memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota dan provinsi lainnya. IKP yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran (Bapanas, 2022).

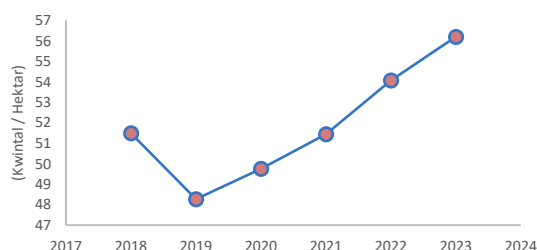
5.2. Analisis Tematik

5.2.1. Perkembangan Kondisi Ketahanan Pangan Regional

5.2.1.1. Perkembangan Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan merupakan tantangan yang harus dihadapi seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk karena peningkatan jumlah penduduk akan berbanding lurus dengan peningkatan permintaan pangan. Walaupun Sumsel termasuk salah satu provinsi yang menjadi lumbung pangan nasional, berbagai risiko dapat terjadi sehingga perlu tetap dilakukan strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan terlebih lagi ketahanan pangan tidak hanya dinilai dari aspek ketersediaan pangan tetapi juga mencakup aspek keterjangkauan dan kebermanfaatan.

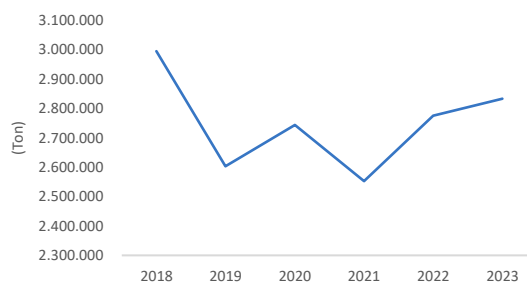
Grafik 5.1. Produktivitas Padi Sumatera Selatan



Sumber: BPS Sumsel (diolah)

Berdasarkan data BPS dan Dinas Pertanian dalam RPJMD Sumsel, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, capaian produksi padi hampir selalu berada di bawah target. Walau masih dalam kategori aman untuk mencukupi kebutuhan lokal namun risiko penurunan produksi perlu diantisipasi agar ketahanan pangan dapat terjaga. Provinsi Sumsel merupakan salah satu lumbung pangan di Indonesia, dengan jumlah produksi padi terbesar kelima di Indonesia pada 2023, sehingga ketidakstabilan produksi pangan akan berpengaruh pada produksi pangan secara nasional.

Grafik 5.2. Produksi Padi Sumatera Selatan



Sumber: BPS Sumsel (diolah)

Di sisi lain, berdasarkan data BPS (diolah), produktivitas padi di wilayah Sumsel menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2020, namun hal ini tidak sejalan dengan jumlah produksi padi/beras sebagaimana tergambar pada grafik di atas. Berbagai faktor penyebabnya antara lain kualitas dan varietas padi yang ditanam maupun kerusakan pasca panen dan lain-lain. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam melakukan mitigasi yang tepat sesuai dengan risiko kejadiannya. Dengan pertimbangan bahwa nasi masih menjadi bahan makanan utama bagi sebagian besar penduduk Indonesia, maka ketersediaan pangan di suatu wilayah dapat diproxy menggunakan tingkat ketersediaan padi/beras.

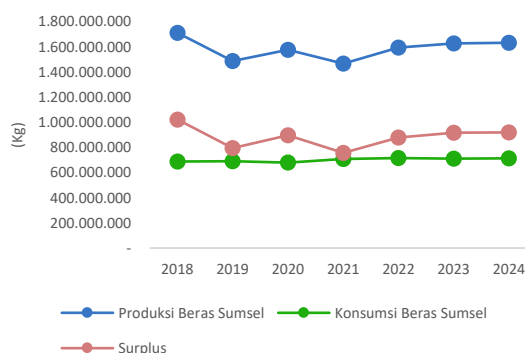
Tabel 5.1. Produksi Beras dan Konsumsi Beras Sumatera Selatan 2018-2024

Tahun	Produksi Beras (kg)	Konsumsi Beras (kg)	Surplus (Kg)
2018	1.710.572.650	688.750.882	1.021.821.768
2019	1.487.312.320	691.461.387	795.850.933
2020	1.575.216.100	679.088.725	896.127.375
2021	1.465.753.550	709.215.637	756.537.913
2022	1.593.597.700	715.255.432	878.342.268
2023	1.626.734.930	711.191.141	915.543.789
2024	1.632.356.000	712.605.103	919.750.897

Sumber: BPS Sumsel (diolah)

Secara umum produksi beras di Sumsel dalam kurun waktu 2018-2024 selalu menunjukkan surplus namun dengan berbagai risiko ketidakpastian termasuk akibat perubahan iklim maupun bencana alam, sehingga sangat perlu untuk memiliki cadangan pangan daerah yang dapat mencukupi kebutuhan penduduk yang terus bertambah jumlahnya. Dengan laju pertumbuhan penduduk Sumsel yang berada di atas 1% per tahunnya, menjadi krusial untuk dapat mengamankan kecukupan pangan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.

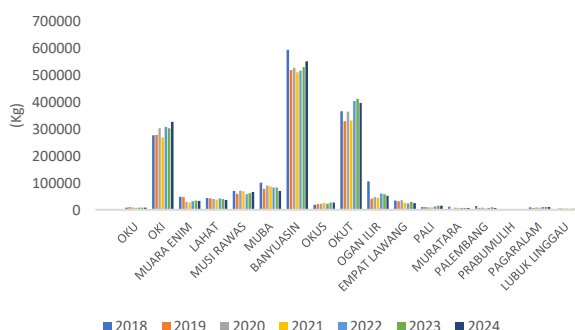
Grafik 5.3. Produksi dan Konsumsi Beras Sumatera Selatan



Sumber: BPS Sumsel (diolah)

Data konsumsi beras pada tabel diperoleh dari konsumsi beras per kapita setahun dikalikan dengan jumlah penduduk Sumsel. Dari grafik di bawah ini tergambar tiga daerah di Sumsel yang menjadi kontributor utama beras yaitu Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ulu Timur (OKUT), dan Ogan Komering Ilir (OKI).

Grafik 5.4. Produksi Beras Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

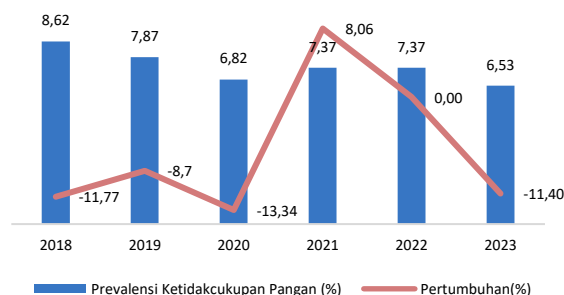


Sumber: BPS Sumsel (diolah)

Ketahanan pangan dapat diukur melalui prevalensi ketidakcukupan pangan. Berdasarkan data Susenas, pada tahun 2023 prevalensi ketidakcukupan pangan di Sumatera Selatan tercatat sebesar 6,53 persen. Angka ini lebih rendah

dibandingkan tingkat nasional mencapai 8,53% pada tahun 2023. Ketahanan pangan dipengaruhi oleh inflasi, terutama yang didorong oleh kenaikan harga, khususnya beras. Di Sumatera Selatan, beras menjadi penyumbang inflasi tertinggi. Kenaikan inflasi pangan menurunkan daya beli dan meningkatkan kemiskinan, dan Salah satu indikator dalam Indeks Ketahanan Pangan adalah jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menjaga kecukupan pangan adalah melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP).

Grafik 5.5. Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Sumatera Selatan (%)



Sumber: BPS Sumsel (diolah)

Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi pangan yang besar dengan luas pertanian sekitar ±1,5 juta ha. Komoditas unggulan meliputi padi, palawija, dan perkebunan. Pada tahun 2024 521.252 ha, meningkat 3,39% dibandingkan tahun 2023 tercatat seluas 504.143 ha.

5.2.1.2. Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan

Secara umum kondisi ketahanan pangan Provinsi Sumatera Selatan masuk dalam kategori Tahan dan berada pada urutan ke 21 dari 34 Provinsi berdasarkan IKP 2024, angka ini menurun dari tahun sebelumnya dari peringkat ke 20 pada tahun 2023. Data IKP Sumatera Selatan menunjukkan tren yang meningkat dengan peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik berikut. Sumatera Selatan terlihat memiliki ketersediaan pangan yang baik, tetapi masih rentan dalam aksestabilitas dan pemanfaatan pangan.

Tabel 5.2. Cut off Point Skor Komposit Ketahanan Pangan

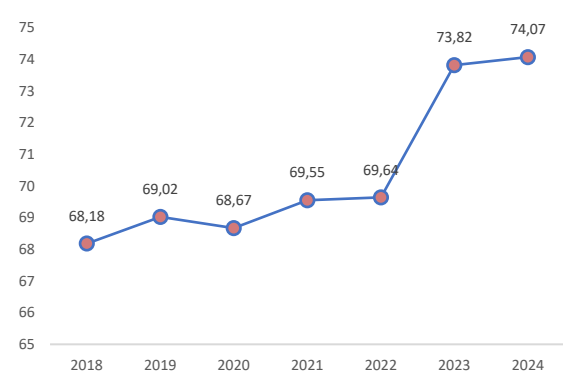
Kel IKP	Keterangan	Provinsi	Kabupaten	Kota
1	Sangat Rentan	<=37,61	<=41,52	<=28,84
2	Rentan	>37,61 – 48,27	>41,52 – 51,42	>28,84 – 41,44
3	Agak Rentan	>48,27 – 57,11	>51,42 – 59,58	>41,44 – 51,29
4	Agak Tahan	>57,11 – 65,96	>59,58 – 67,75	>51,29 – 61,13
5	Tahan	>65,96 – 74,40	>67,75 – 75,68	>61,13 – 70,64
6	Sangat Tahan	>74,40	>75,68	>70,64

Sumber: Badan Pangan Nasional (diolah)

Data IKP secara spasial kabupaten/kota di Sumsel menunjukkan skor IKP yang mengalami fluktuasi pada beberapa kabupaten/kota namun Kota Pagaralam selalu berada pada skor terendah, sedangkan untuk kabupaten dengan skor terendah berada di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) sehingga mendudukkan Kab. Muratara pada kelompok daerah prioritas 3 (Agak Rentan) dari sebelumnya yang berada di kelompok prioritas 4 (Agak Tahan). Kab. Muratara mengalami penurunan pada aspek kemanfaatan

dari sebelumnya dengan skor 64 pada tahun 2023 menjadi 60,43 di tahun 2024.

Grafik 5.6. Indeks Ketahanan Pangan Sumatera Selatan



Sumber: BPS Sumsel (diolah)

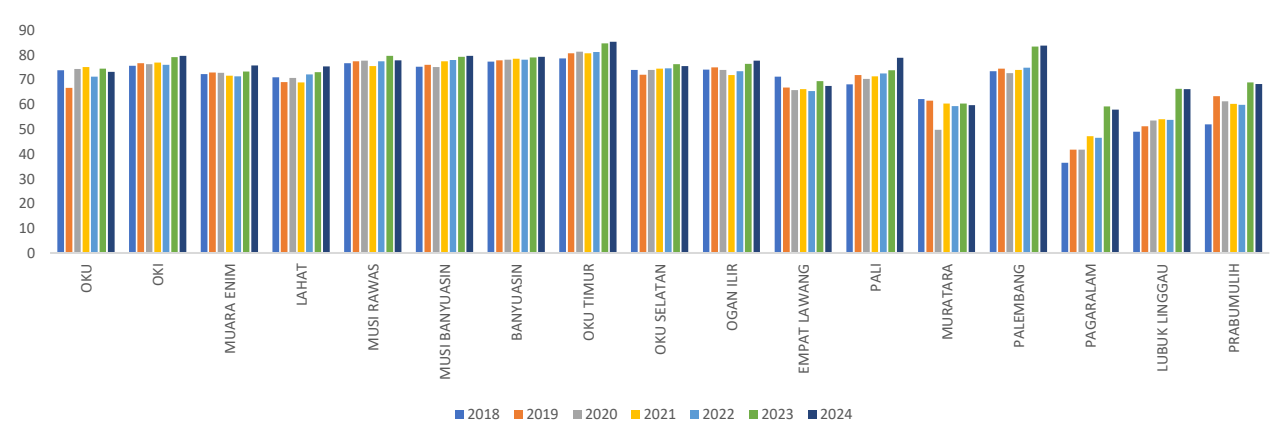
Berdasarkan IKP 2024 dari Bapanas terdapat 1 kota dan 7 kabupaten di Sumsel yang masuk dalam wilayah Sangat Tahan Pangan, 3 kota dan 3 kabupaten masuk dalam wilayah Tahan Pangan, 1 kota dan 1 kabupaten masuk dalam wilayah Agak Tahan (Kab. Empat Lawang dan Kota Pagaralam), dan 1 kabupaten masuk dalam wilayah Agak Rentan Pangan (Musi Rawas Utara). Tiga kota di Sumsel termasuk dalam 7 kota dengan skor IKP terendah dari 98 kota di Indonesia, yaitu Kota Pagaralam, Lubuk Linggau, dan Prabumulih. Penggunaan lahan pertanian perlu dioptimalkan secara efisien untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayah tersebut. Hal ini perlu dicermati sebagai early warning kepada pengambil kebijakan untuk melakukan intervensi yang tepat dan sistematis. Selain adanya penurunan tingkat ketahanan pangan, juga terdapat 1 kabupaten yang mengalami peningkatan dari kelompok tahan pangan menjadi sangat tahan pangan yaitu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Tabel 5.3. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
OKU	73,74	66,54	74,23	74,93	71,10	74,36	73,01
OKI	75,49	76,59	76,12	76,81	75,89	79,04	79,54
Muara Enim	72,12	72,84	72,70	71,54	71,29	73,22	75,62
Lahat	70,82	68,94	70,55	68,85	72,00	72,87	75,19
Musi Rawas	76,58	77,34	77,53	75,33	77,38	79,56	77,66
Musi Banyuasin	75,13	75,94	75,03	77,27	77,89	79,09	79,48
Banyuasin	77,25	77,71	77,90	78,30	77,97	78,91	79,17
OKU Timur	78,49	80,49	81,22	80,50	81,01	84,52	85,17
OKU Selatan	73,87	71,88	73,86	74,30	74,46	76,15	75,37
Ogan Ilir	73,96	74,88	73,83	71,74	73,28	76,32	77,55
Empat Lawang	71,18	66,75	65,75	66,07	65,25	69,27	67,42
PALI	67,97	71,72	70,18	71,31	72,46	73,71	78,79
Muratara	62,03	61,49	49,70	60,33	59,23	60,31	59,58
Palembang	73,26	74,36	72,57	73,83	74,71	83,29	83,62
Pagaralam	36,41	41,64	41,62	47,09	46,47	59,17	57,79
Lubuk Linggau	48,90	51,06	53,37	53,91	53,71	66,26	66,10
Prabumulih	51,88	63,21	61,23	60,17	59,71	68,83	68,11

Sumber: Badan Pangan Nasional (diolah)

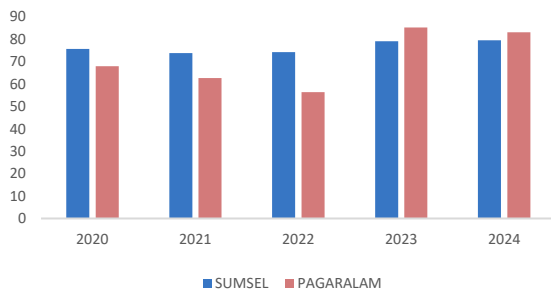
Grafik 5.7. Indeks Ketahanan Pangan Sumatera Selatan



Sumber: Badan Pangan Nasional (diolah)

Dari data pada tabel dan grafik di atas terlihat bahwa Kota Pagaralam mendapat skor IKP terendah di Sumatera Selatan sejak 2018 yang sekaligus menunjukkan wilayah yang paling rentan terhadap kerawanan pangan di Sumatera Selatan. Terdapat sembilan indikator dari tiga aspek (aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan) yang digunakan untuk menghitung skor IKP untuk wilayah kabupaten, sedangkan untuk wilayah kota diukur dengan delapan indikator dari dua aspek yaitu keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, dengan pertimbangan bahwa ketersediaan pangan di tingkat perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar wilayah.

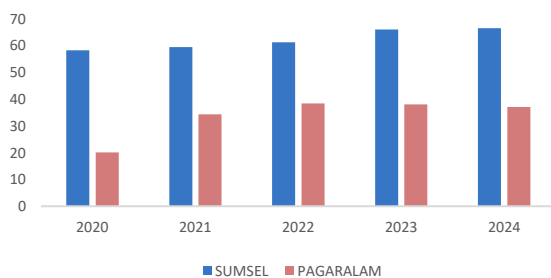
Grafik 5.8. Aspek Keterjangkauan Provinsi Sumsel dan Kota Pagar Alam



Sumber: Badan Pangan Nasional (diolah)

Dengan membandingkan data pada aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan antara skor Sumsel yang mencerminkan nilai rata-rata seluruh kabupaten/kota di Sumsel dengan nilai indikator tersebut pada Kota Pagaralam, dapat dilihat bahwa pada aspek pemanfaatan selama lima tahun terakhir (2020 s.d. 2024) skor Kota Pagaralam selalu di bawah nilai rata-rata Provinsi Sumsel dan termasuk dalam 4 kota dengan skor terendah di Indonesia. Kota Pagar Alam memiliki kelemahan pada aspek pemanfaatan, yang tercermin dari indikator persentase penduduk tanpa air bersih, lama sekolah perempuan, rasio tenaga kesehatan, angka harapan hidup, dan persentase stunting. Aspek ini cenderung mengalami fluktuasi, pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan, namun kembali turun di 2023 dan 2024.

Grafik 5.9. Aspek Pemanfaatan Provinsi Sumsel dan Kota Pagar Alam



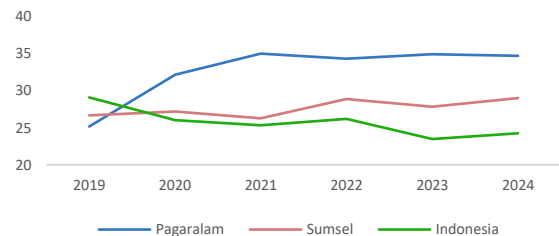
Sumber: Badan Pangan Nasional (diolah)

Dilihat dari perkembangan aspek IKP Pagaralam tahun 2020 – 2024, pada aspek keterjangkauan terjadi peningkatan di tahun 2023 namun kembali turun di 2024. Penilaian pada aspek keterjangkauan dilakukan melalui indikator persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran, serta persentase rumah tangga tanpa akses listrik.

Kota Pagaralam yang selalu termasuk dalam kota dengan skor IKP terendah terindikasi oleh tingginya rumah tangga dengan

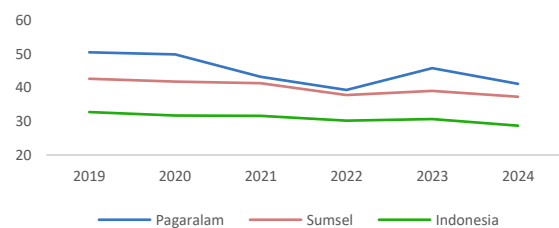
pengeluaran pangan lebih dari 65% dan tingginya rumah tangga tanpa akses ke air bersih. Pengeluaran pangan menjadi proxy untuk mengukur kesejahteraan dan ketahanan pangan sebagaimana teori konsumsi dari Ernst Engel yang menjelaskan hubungan antara pendapatan dan pengeluaran konsumsi. Teori ini menyatakan bahwa ketika pendapatan meningkat, persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun.

Grafik 5.10. Persentase Rumah Tangga dengan Pengeluaran Pangan >65%



Sumber: Badan Pangan Nasional (diolah)

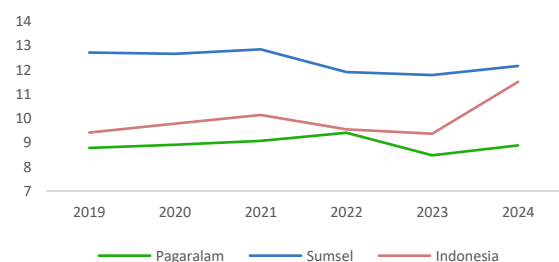
Grafik 5.11. Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih



Sumber: Badan Pangan Nasional (diolah)

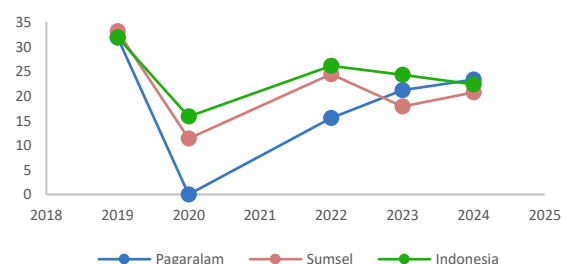
Dari data IKP tahun 2019-2024, diketahui bahwa indikator IKP lainnya untuk Kota Pagaralam masih lebih baik dari rata-rata Provinsi Sumsel maupun nasional sehingga untuk menetapkan intervensi yang tepat dapat lebih difokuskan pada indikator yang nilainya masih di bawah rata-rata capaian Sumsel maupun nasional. Dilihat dari persentase penduduk miskin dan balita stunting, skor Pagaralam masih lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Sumsel dan nasional, namun bukan berarti upaya mengentaskan kemiskinan dan penanganan stunting tidak perlu dilakukan, terlebih lagi akses terhadap air bersih juga turut mempengaruhi prevalensi stunting.

Grafik 5.12. Persentase Penduduk Miskin



Sumber: Badan Pangan Nasional (diolah)

Grafik 5.13. Persentase Balita Stunting



Sumber: Badan Pangan Nasional (diolah)

Tabel 5.4. Aspek Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Pemanfaatan

	Ketersediaan	Keterjangkauan			Pemanfaatan				
	NCPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	Stunting
Muratarata	2,66	18,26	37,47	0,81	44,73	66,37	6,83	7,7	33,1
Sumsel	1,00	12,16	29,00	0,37	37,26	68,78	2,67	8,60	20,71
Nasional	1,33	11,5	24,26	2,38	28,69	70,2	4,03	8,85	22,35

Sumber: Badan Pangan Nasional (diolah)

Pada Kab. Muratarata, selain terjadi penurunan nilai pada aspek pemanfaatan di tahun 2024, nilai pada aspek lainnya pun masih berada pada skor terendah di wilayah Sumsel. Dari aspek ketersediaan pangan, rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih (NCPR) di Kab. Muratarata berada pada angka 2,66 berarti konsumsi lebih besar dari produksi sehingga terjadi defisit pangan. Dari aspek keterjangkauan, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (pov) di Kab. Muratarata melampaui angka rata-rata di Sumsel maupun nasional. Pada indikator persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran (food) di Muratarata juga sangat tinggi. Hal ini sejalan dengan tingkat kemiskinan yang juga tinggi di Muratarata. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik (elec) di Muratarata juga lebih tinggi dari rata-rata Sumsel. Seluruh indikator pada aspek pemanfaatan juga masih menjadi tantangan di Kab. Muratarata. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih (water), angka harapan hidup (life), rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk (health), rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun (school) dan persentase balita stunting yang masih sangat tinggi tentunya membutuhkan strategi/intervensi yang tepat dan segera melalui percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan.

Indikator tersebut di atas merupakan angka rata-rata sehingga suatu kabupaten/kota yang masuk dalam kategori rentan pangan (kelompok prioritas 1-3) tidak semua kecamatan, desa/kelurahan serta penduduk di dalamnya juga rentan pangan, dan juga sebaliknya, kabupaten/kota yang lebih tahan pangan (kelompok prioritas 4-6) tidak berarti semua kecamatan, desa/kelurahan serta penduduknya juga tahan pangan. Berikut beberapa alternatif intervensi yang dapat dilakukan di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan indikator dan penyebabnya.

Tabel 5.5. Alternatif Intervensi Kabupaten/Kota sesuai Indikator dan Penyebab

Indikator	Penyebab	Intervensi
Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan	- Sebaran produksi tidak merata - Keterbatasan akses	- Peningkatan produksi (intensifikasi dan ekstensifikasi) - Penganekaragaman konsumsi pangan
Prevalensi stunting	- Rendahnya akses terhadap air bersih - Pola asuh	- Penyediaan fasilitas dan layanan air bersih - Sosialisasi dan penyuluhan tentang gizi dan pola asuh anak
Penduduk miskin	- Keterbatasan lapangan kerja - Kepemilikan asset - Infrastruktur - Keterbatasan akses finansial	- Penyediaan lapangan kerja padat karya - Redistribusi lahan - Pembangunan infrastruktur dasar - Pemberian bantuan sosial

Indikator	Penyebab	Intervensi
Proporsi pengeluaran pangan	- Terbatasnya akses pangan rumah tangga - Tingginya harga pangan - Tingkat pendapatan	- Pendekatan sumber pangan rumah tangga - Pengendalian harga pangan - Peningkatan pendapatan rumah tangga
Akses terhadap air bersih	- Rendahnya infrastruktur air bersih - Rendahnya sanitasi lingkungan	- Penyediaan fasilitas dan layanan air bersih - Sosialisasi dan penyuluhan

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

5.2.2. Impementasi Kebijakan Ketahanan Pangan

5.2.2.1. Perkembangan pagu, realisasi, serta capaian output Belanja Ketahanan Pangan Wilayah Sumsel

Pada aplikasi sintesa, telah dilakukan tagging khusus tematik ketahanan pangan untuk tahun 2023-2025 namun untuk tahun sebelumnya data belum tersedia pada tematik ketahanan pangan sehingga perlu dilakukan clustering data sesuai dengan output terkait ketahanan pangan. Dari tabel dapat dilihat penurunan alokasi yang sangat signifikan di tahun 2022 dan peningkatan alokasi yang sangat signifikan pada tahun 2024, namun dilihat dari serapan anggaran, pada tahun 2024 hanya sebesar 84,68%. Proporsi anggaran ketahanan pangan masih berfokus pada aspek ketersediaan pangan yang ditunjukkan oleh besarnya share anggaran sub sistem ketersediaan pangan dibandingkan sub sistem ketahanan pangan yang lain.

Tabel 5.6. Pagu, Realisasi dan Persentase Capaian Output Ketahanan Pangan Wilayah Sumsel

Tahun	Pagu	Realisasi	%
2021	1.001.366.096.000	920.571.297.935	91,93
2022	546.498.202.000	532.529.013.541	97,44
2023	1.282.276.449.000	1.193.997.950.269	93,12
2024	3.225.574.605.000	2.731.471.227.425	84,68

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Kondisi tersebut ditunjukkan oleh belanja ketahanan pangan wilayah Sumsel tahun 2023 dan 2024 yang terbesar dialokasikan untuk Program Ketahanan Sumber Daya Air, dengan output utama Bendungan Tiga Dihaji yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pada Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, alokasi terbesar untuk penyediaan bibit ternak unggul, area penyaluran benih padi, dan area penyaluran benih jagung. Terjadi peningkatan alokasi anggaran pada 2024 untuk program ini dengan output utama optimalisasi lahan yang mendapatkan alokasi 87,81% dari total alokasi program. Terdapat program baru yang ditagging pada tematik ketahanan pangan yaitu Program Kualitas Lingkungan Hidup dengan output berupa penetapan

dan pengelolaan kawasan reservasi. Kinerja penyerapan anggaran ketahanan pangan tahun 2024 yang belum optimal turut dipengaruhi oleh pembangunan Bendungan Tiga Dihaji yang belum selesai di tahun 2024 dan berlanjut ke tahun 2025.

Tabel 5.7. Belanja K/L Ketahanan Pangan 2023/2024

Program	2023 (Rp Miliar)			2024 (Rp Miliar)		
	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%
Dukungan Manajemen	127,28	125,70	98,76	120,93	117,18	96,90
Ketahanan Sumber Daya Air	1.024,24	939,99	91,78	2.608,61	2150,68	82,45
Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	90,54	89,37	98,71	453,60	425,90	93,89
Kualitas Lingkungan Hidup				0,130	0,127	98,12
Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	9,16	8,38	91,52	12,98	11,29	87,01
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	29,23	28,83	98,65	28,44	25,57	89,92
Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1,82	1,69	93,18	0,87	0,69	79,65
Total	1.282,28	1.193,99	93,12	3.225,57	2.731,47	84,68

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

5.2.2.2. Perkembangan pagu dan realisasi Penyaluran TKD untuk ketahanan pangan

Alokasi DAK Fisik untuk ketahanan pangan pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Alokasi terbesar pada tahun 2023 dan 2024 terdapat pada Subbidang Jalan-Tematik Pengembangan Food Estate. Pada tabel di atas juga ditambahkan Subbidang Intervensi Stunting dan Sanitasi karena dua subbidang ini turut mempengaruhi tingkat ketahanan pangan karena menjadi indikator penilaian dalam menghitung IKP.

Tabel 5.8. Penyaluran DAK Fisik untuk Ketahanan Pangan

Program	2023 (Rp Miliar)			2024 (Rp Miliar)		
	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%
Irigasi-Food Estate	43,76	41,53	94,89	17,58	16,52	93,94
Irigasi-Sentra Pangan	6,12	4,20	68,61	2,13	2,12	99,41
Jalan-Food Estate	137,58	136,06	98,90	139,65	135,85	97,28
Jalan-Sentra Pangan	60,94	60,51	99,28	56,39	55,59	98,58
Kehutanan-Food Estate	-	-	-	0,60	0,08	14,14
Kelautan & Perikanan – Sentra Pangan	20,59	19,98	97,03	22,83	22,35	97,92
Intervensi Stunting	99,51	91,18	91,63	20,22	19,44	96,13
Pertanian_Food Estate	56,10	48,98	87,32	31,17	29,84	95,72
Pertanian-Sentra Pangan	43,61	31,80	72,94	19,81	17,95	90,64
Sanitasi	-	-	-	1,05	1,04	99,41
Total	468,24	434,27	92,74	311,47	300,82	96,58

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa alokasi ketahanan pangan dari DAK Fisik Kota Pagaralam tidak terserap dengan optimal, sedangkan pada Kab. Muratara dan Ogan Komering Ulu tidak terdapat alokasi ketahanan pangan dari DAK Fisik

tahun 2023, sedangkan pada Kota Lubuk Linggau tidak terdapat alokasi ketahanan pangan dari DAK Fisik di tahun 2024.

Tabel 5.9. Alokasi Ketahanan Pangan dari Dana Alokasi Khusus Fisik per Pemda

Kab/Kota	2023 (Rp Miliar)			2024 (Rp Miliar)		
	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%
Kab. Banyuasin	34,26	33,45	97,62	46,20	44,26	95,80
Kab. Empat Lawang	51,76	50,80	98,16	1,30	1,29	98,98
Kab. L A H A T	1,18	1,16	97,95	2,39	1,99	83,31
Kab. Muara Enim	13,80	11,80	85,50	30,14	27,92	92,63
Kab. Musi Banyuasin	8,61	7,92	91,92	49,77	47,76	95,96
Kab. Musi Rawas	10,71	10,33	96,42	21,39	21,20	99,10
Kab. Muratara				0,04	0,04	100,00
Kab. Ogan Ilir	49,43	47,48	96,06	38,04	37,11	97,54
Kab. Ogan Komering Ilir	67,70	65,05	96,10	34,03	33,24	97,69
Kab. Ogan Komering Ulu				1,71	1,65	96,70
Kab. Oku Selatan	31,63	29,35	92,79	11,89	11,63	97,82
Kab. Oku Timur	57,94	54,65	94,31	18,03	17,90	99,28
Kab. Pali	1,35	1,32	98,12	0,23	0,23	99,71
Kota Lubuk Linggau	11,43	11,05	96,68			
Kota Pagar Alam	11,92	9,42	79,01	0,09	0,09	99,44
Kota Palembang	5,85	4,69	80,21	4,44	4,43	99,69
Kota Prabumulih	14,38	13,14	91,38	0,37	0,36	98,84
Prov Sumatera Selatan	96,29	82,66	85,85	51,42	49,73	96,72
Total	468,24	434,27	92,74	311,47	300,82	96,58

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

DAK Non Fisik

Alokasi DAK Non Fisik untuk Ketahanan Pangan dan Pertanian pada Tahun 2023 dan 2024 yang terbesar terdapat pada Kabupaten Musi Banyuasin, demikian juga dengan realisasi belanjanya, sedangkan yang terendah terdapat pada Kabupaten Empat Lawang, baik dari alokasi anggaran maupun realisasi belanjanya. Pada tahun 2023, DAK Non Fisik untuk Ketahanan Pangan dan Pertanian terdapat pada 2 Kota dan 12 Kabupaten di Provinsi Sumsel, sedangkan untuk tahun 2024 hanya terdapat pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Pada tahun 2023 dan 2024 tidak terdapat alokasi pada Kota Pagaralam, Prabumulih,dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

Tabel 5.10. Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tahun	Pemda	Pagu	Realisasi	%
2024	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	821,73	811,34	98,74
2023	Kab. Musi Banyuasin	1.205,95	1.200,17	99,52
2023	Kab. Ogan Komering Ulu	210,50	207,40	98,53
2023	Kab. Muara Enim	430,08	161,72	37,60
2023	Kab. Lahat	291,00	227,50	78,18

Tahun	Pemda	Pagu	Realisasi	%
2023	Kab. Musi Rawas	291,00	273,74	94,07
2023	Kab. Ogan Komering Ilir	939,30	909,30	96,81
2023	Kab. Banyuasin	371,50	357,56	96,25
2023	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	230,00	217,00	94,35
2023	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	369,08	358,13	97,03
2023	Kab. Ogan Ilir	314,00	232,77	74,13
2023	Kab. Empat Lawang	115,00	8,42	7,32
2023	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	315,08	315,08	100
2023	Kota Palembang	176,00	176,00	100
2023	Kota Lubuk Linggau	347,15	308,03	88,73

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Dana Desa untuk Ketahanan Pangan juga diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024. Dari data OMSPAN_TKD didapatkan angka penyaluran dana desa untuk ketahanan pangan sejumlah Rp16,99 miliar pada tahun 2020, Rp14,18 miliar pada tahun 2021, Rp 192,34 miliar pada tahun 2022, Rp90,36 miliar pada tahun 2023, dan Rp556,42 miliar pada tahun 2024.

Untuk mendukung ketersediaan pangan di desa dapat dilakukan pengembangan pertanian keluarga, pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pengembangan sentra serta pengelolaan lumbung pangan desa, pengembangan pakan ternak alternatif, pelarihan dan pengembangan teknologi tepat guna, diversifikasi usaha tani dan perikanan skala desa, penanaman tumpeng sari tanaman pokok di lahan pekebunan, dll. Untuk mendukung keterjangkauan pangan di desa dapat dilakukan peningkatan dan pemeliharaan jalan usaha tani, pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi. Untuk mendukung pemanfaatan pangan di desa dapat dilakukan sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman serta pengembangan olahan pangan, dsb.

5.2.2.3. Belanja APBD untuk Ketahanan Pangan

Realisasi belanja ketahanan pangan berdasarkan data pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian (LKPDK) Sumatera Selatan secara umum menunjukkan tren kenaikan sejak tahun 2018 namun pada tahun 2024 mengalami penurunan sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel 5.11. Belanja Daerah untuk Ketahanan Pangan

Tahun	Kelautan & Perikanan	Pangan	Pertanian	Total
2018	92,02	-	388,90	480,93
2019	127,04	93,55	533,01	753,60
2020	111,91	88,47	457,53	657,91
2021	134,91	123,92	495,11	753,95
2022	148,00	154,60	574,37	876,98
2023	196,56	159,42	849,56	1.205,55
2024	183,10	115,84	721,01	1.019,96

Sumber: LKPDK-GFS Sumsel (diolah)

Grafik 5.14. Perkembangan APBD untuk Ketahanan Pangan



Sumber: LKPDK-GFS Sumsel (diolah)

5.2.2.4. Proyek Strategis Nasional dan Daerah yang Mendukung Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan tidak terlepas dari dukungan infrastruktur yang baik, saat ini terdapat PSN yang mendukung ketahanan pangan di Sumsel yaitu: Bendungan Tiga Dihaji, Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang, Irigasi Lempuing. Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bersifat multiyears, di mulai 2018 sampai 2024. Realisasi belanja s.d. Desember 2024 sebesar Rp1,44 triliun (76,22%). Pekerjaan terdiri atas 6 paket dengan paket 1-4 telah berkontrak dan paket 5-6 telah selesai proses pengadaan dan berkontrak di bulan Desember 2024 dengan ijin multiyear contract hingga 2026. Paket 5 dan 6 baru berkontrak di Desember 2024 dikarenakan proses pembentukan Tim Kaji Cepat Penunjukan Langsung (TKCPL sesuai Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/IN/M/2024 tentang Mekanisme Kaji Cepat dan Reviu atas Rencana Penggunaan Metode Pemilihan Penunjukan Langsung Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan persetujuan multiyear contract yg membutuhkan waktu yg cukup panjang sehingga penyerapan tidak maksimal.

Pembangunan Daerah Irigasi Lempuing yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PHLN) JICA dan terdiri dari 3 paket pekerjaan untuk pembangunan 18,35 km saluran irigasi. Pagu anggaran sebesar Rp193,14 miliar dengan sumber dana PHLN dan telah terealisasi s.d. bulan Desember sebesar Rp176,09 miliar. Pembangunan Daerah Irigasi Lematang yang terletak di Kota Pagaralam bersumber dari Rupiah Murni (RM) dengan pagu anggaran sebesar Rp339,24 miliar dan telah terealisasi sebesar Rp336,4 miliar (100% dari anggaran terkontrak) dengan pagu anggaran terblokir sebesar Rp256,78 juta. Proyek Strategis Daerah Prov. Sumsel Tahun 2024-2026 yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan yaitu Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Provinsi dengan target 5000ha pada lokasi Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, dan Musi Banyuasin.

5.2.3. Analisis Keterkaitan antara Kebijakan Ketahanan Pangan dengan Pencapaian Indikator-Indikator Ketahanan Pangan

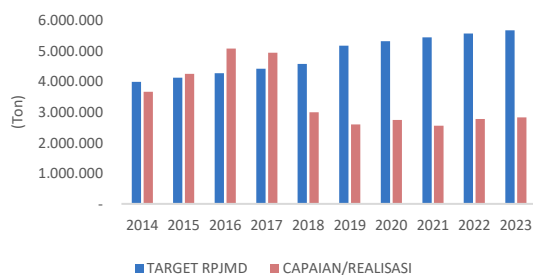
Dalam RPJPD Provinsi Sumsel Tahun 2005-2025, salah satu misi dalam mewujudkan visi Sumsel Unggul dan Terdepan Tahun 2025 adalah meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan. Kebijakan ini diimplementasikan melalui penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di seluruh kabupaten/kota dalam rangka

mempertahankan Sumsel sebagai lumbung pangan nasional. Selain itu untuk menurunkan kerawanan pangan sesuai target RPJMD, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan salah satu inovasi yang dilakukan adalah melalui rekrutmen Petugas Peningkatan Ekonomi Pertanian (PPEP) sebanyak seribu orang pada tahun 2020 dan 400 orang pada tahun 2021 sehingga dapat mendampingi petani/kelompok tani untuk mandiri dan berusaha tani dengan atau tanpa bantuan dari pemerintah.

Persentase daerah rentan rawan pangan sebagai hasil Food Security dan Vulnerability Atlas (FSVA) atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan daerah di bidang pangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Selain itu disebutkan pula perlunya kesiapsiagaan, pengendalian dan intervensi kerawanan pangan dan gizi berbasis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan serta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengantisipasi krisis pangan. Dalam RPJMD Sumsel 2019-2023, salah satu kebijakan/strategi pengembangan struktur ruang yang ditetapkan adalah peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk menunjang kegiatan perkotaan dan pertanian serta kebijakan lumbung pangan nasional, selain itu juga telah ditetapkan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah, mulai dari lahan irigasi sawah, tadah hujan, rawa pasang surut, lebak dan lahan kering, juga pengembangan penggunaan alat mesin pertanian serta percepatan implementasi program food estate untuk mendukung Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan. Namun berdasarkan data pada RPD Sumsel 2024-2026, capaian produksi padi Sumsel masih di bawah target sebagaimana tergambar pada grafik berikut.

Grafik 5.15. Target dan Capaian Produksi Padi Sumatera Selatan



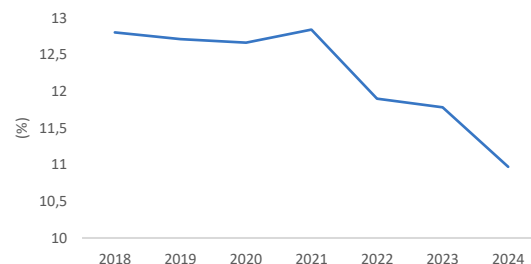
Sumber: Bappeda dan BPS Sumsel (diolah)

Walaupun demikian, produktivitas padi masih mencatatkan pertumbuhan dan masih terdapat surplus beras di Sumsel. Di sisi lain, tingkat ketersediaan beras maupun keterjangkauan harga masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, yang perlu menjadi perhatian adalah stabilitas harga pangan, terutama beras yang masih menjadi penyumbang inflasi di wilayah Sumsel. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan program peningkatan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan serta upaya peningkatan cadangan pangan pemerintah daerah.

Berbagai studi menyebutkan keterkaitan tingkat kemiskinan dengan ketahanan pangan. Dari tahun 2018 persentase penduduk miskin Sumsel mengalami tren penurunan,

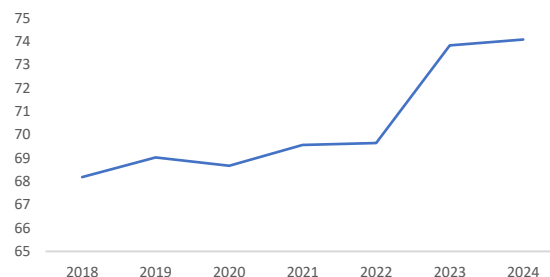
walaupun terjadi peningkatan pada tahun 2021 yang disebabkan oleh Pandemi COVID-19, namun setelahnya terus menurun. Sementara pada nilai IKP terjadi tren peningkatan skor sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 5.16. Persentase Penduduk Miskin Sumatera Selatan



Sumber: BPS Sumsel (diolah)

Grafik 5.17. Indeks Ketahanan Pangan Sumatera Selatan



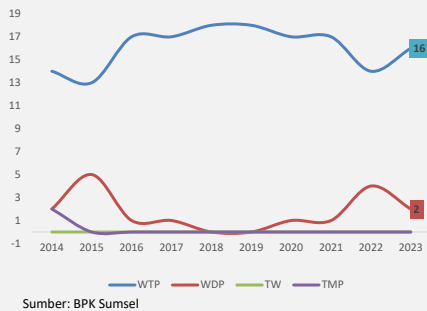
Sumber: Badan Pangan Nasional (diolah)

Dengan berbagai intervensi/kebijakan pemerintah dari sisi belanja maupun non belanja, telah dicapai beberapa peningkatan pada ketahanan pangan Sumsel walaupun masih terdapat beberapa hal yang masih perlu diperbaiki.

Boks 5

Tantangan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumsel

Perkembangan Opini BPK atas LKPD di Sumsel



No Daerah	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Pemerintah Prov. Sumatera Selatan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2 Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3 Pemerintah Kab. Muara Enim	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4 Pemerintah Kab. Lahat	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5 Pemerintah Kab. Musi Rawas	WDP	WTP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6 Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7 Pemerintah Kab. Banyuasin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8 Pemerintah Kab. OKU Timur	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9 Pemerintah Kab. OKU Selatan	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10 Pemerintah Kab. Ogan Ilir	WDP	WTP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
11 Pemerintah Kab. Empat Lawang	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12 Pemerintah Kab. PALI	-	-	-	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WDP
13 Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara	-	-	-	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14 Pemerintah Kota Palembang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15 Pemerintah Kota Prabumulih	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16 Pemerintah Kota Pagaram	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
17 Pemerintah Kota Lubuk Linggau	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18 Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP

Sumber: BPK Sumsel

Tren Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Sumsel menurun. Sejak terakhir 2018-2019 seluruh pemda mencapai opini WTP, setelahnya hingga 2023 beberapa pemda kembali mendapatkan opini WDP mengindikasikan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah di Sumsel. Sejak 2020 s.d. 2023, beberapa pemda mendapatkan opini WDP dari BPK Provinsi Sumsel diantaranya yaitu pemda Kab. PALI, Kab. Musi Banyuasin, Kota Pagaraalam, dan Kab. Ogan Ilir. Pemda Musi Banyuasin bahkan mendapatkan opini WDP dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut sejak 2021-2023. Begitu juga dengan pemda Kab. PALI yang mendapatkan opini WDP pada tahun 2020 dan kembali mendapatkan opini WDP di tahun 2023.

Penurunan pencapaian opini WTP di beberapa daerah disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk lemahnya pengawasan internal, ketidakpatuhan dalam pelaporan anggaran, atau kurang optimalnya tata kelola anggaran, terutama dalam pengadaan barang dan jasa serta belanja modal. Penurunan pencapaian opini WTP juga mengindikasikan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Sumsel masih menghadapi tantangan dan permasalahan. Temuan dari BPK Sumsel atas LKPD 2023 mencatat kewajiban pemda di Sumsel untuk mengembalikan dana sebesar Rp408 Miliar, meningkat 32,04% (yoy) dimana tahun sebelumnya sebesar Rp309 Miliar. Adapun ringkasan temuan BPK atas LKPD 2023 yaitu: 1) Dalam konteks belanja modal, temuan terkait dengan kekurangan volume pekerjaan, pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai spesifikasi, serta penyimpangan dalam proses pelaksanaan proyek. Selain itu juga, terdapat kekeliruan dalam pengeksekusian belanja dengan jenis belanja yang dianggarkan; 2) Dalam penggunaan Dana BOS, BPK menemukan adanya ketidaksesuaian alokasi dan realisasi anggaran yang tidak tepat guna; 3) Kegiatan perjalanan dinas yang tidak sesuai aturan.

Untuk merespon tantangan ini, diperlukan penguatan sistem pengelola keuangan, peningkatan sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta percepatan tindak lanjut temuan BPK. Kanwil DJPb dapat menjadi katalisator yang menjembatani penguatan sinergi dan koordinasi antara BPK, BPKP, Inspektorat Daerah, dan Pemda dalam rangka menindaklanjuti hasil temuan BPK serta pendampingan bagi pemda dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dari sisi pemerintah daerah, BKD dan PSDM Pemda di Sumsel perlu untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola keuangan daerah melalui pelatihan. Selain itu, Inspektorat Daerah perlu untuk melakukan penguatan sistem pengendalian internal dan penerapan audit risiko secara rutin.

BAB VI

**Kesimpulan
dan
Rekomendasi**

Kesimpulan	Rekomendasi
Ekonomi dan Kesejahteraan	
1. Perekonomian Sumsel di tahun 2024 menunjukkan kinerja yang positif. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi Sumsel yang tumbuh di atas 5% dan laju inflasi yang rendah dan terkendali. 2. Inflasi Sumsel perlu untuk menjadi perhatian karena tidak mencapai rentang target $2,5\% \pm 1\%$. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa ekonomi Sumsel belum mencapai kinerja optimalnya. 3. Kondisi kesejahteraan Sumsel terus menunjukkan tren perbaikan dari tahun ke tahun. Pada akhir tahun 2024, semua indikator kesejahteraan Sumsel mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya.	1. Untuk memastikan ekonomi Sumsel terus tumbuh dengan stabil dan mencapai kinerja optimal, disarankan agar pemerintah daerah memperkuat kebijakan pengendalian inflasi dan meningkatkan daya saing ekonomi. 2. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan memperluas sektor ekonomi yang dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan, seperti industri kreatif dan UMKM berbasis teknologi, sembari tetap menjaga stabilitas harga barang dan jasa melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap faktor-faktor penyebab inflasi. 3. Selain itu, meningkatkan program-program kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah Sumsel dapat mempercepat perbaikan kualitas hidup masyarakat.
Fiskal Regional	
1. Kinerja APBN wilayah Sumsel masih dalam tren positif, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, struktur penerimaan pajak masih terkonsentrasi pada sektor perdagangan besar dan eceran serta pertambangan dan penggalian, yang meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas dan permintaan global. Hal ini terlihat dari kontraksi penerimaan pajak industri pengolahan akibat restitusi pajak dan normalisasi harga batubara. 2. Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) berdampak pada kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai infrastruktur dan layanan publik. Selain itu, proses rekonsiliasi pajak antara pemda dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang belum optimal menyebabkan keterlambatan penyaluran DBH di beberapa daerah, seperti Kota Palembang dan Prabumulih yang berdampak pada arus kas daerah. 3. Efisiensi dan kualitas belanja negara menjadi perhatian utama di tahun 2024. Meskipun belanja pegawai meningkat akibat kenaikan gaji ASN dan pembayaran Gaji 13 dan THR. Belanja barang capaian realisasinya lebih rendah dibandingkan tren tahun-tahun sebelumnya, dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran di akhir tahun khususnya <i>self-blocking</i> anggaran belanja perjalanan dinas. Sementara itu, belanja modal yang juga belum optimal, dipengaruhi oleh beberapa proyek strategis nasional (PSN) mengalami kendala teknis dan blokir anggaran yang membutuhkan proses persetujuan panjang. Salah satu proyek besar, Bendungan Tiga Dihaji, harus di-<i>carry over</i> ke tahun 2025, yang berpotensi menunda manfaat pembangunan bagi masyarakat. 4. Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Sumsel masih menghadapi beberapa tantangan, diantaranya kapasitas SDM di kelurahan yang masih terbatas menyebabkan terjadinya gagal salur DAU Pendanaan Kelurahan. Selain itu, keterlambatan penyusunan APBDes menjadi faktor penahan dalam akselerasi penyaluran dana desa, serta sengketa internal desa ataupun permasalahan hukum (penyalahgunaan dana desa) menjadi faktor utama dalam terjadinya gagal salur Dana Desa. 5. Kinerja APBD Sumsel masih terjaga positif sampai di tahun 2024 hal tersebut diindikasikan oleh adanya pembangunan infrastruktur dan aktivitas ekonomi. Pendapatan daerah didorong oleh meningkatnya alokasi penyaluran TKD dan Pajak Daerah. Belanja daerah didorong oleh pembangunan infrastruktur, kegiatan Pilkada Serentak dan Belanja Hibah; Pertumbuhan Pajak Daerah ditopang oleh penerimaan Pajak PBB P2 dan Pajak Konsumsi (PBJT). Adanya pertumbuhan ekonomi memberikan dampak kepada kenaikan jenis pajak tersebut. 6. Optimalisasi Pendapatan Daerah: Pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, terutama pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Konsumsi (PBJT). Kampanye kesadaran pajak dan inovasi dalam sistem pembayaran	1. Diversifikasi Basis Penerimaan Pajak: Pemangku kebijakan perlu mendorong ekstensifikasi pajak melalui peningkatan kepatuhan dan perluasan basis pajak dari sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, seperti industri pengolahan dan sektor jasa, serta meningkatkan insentif bagi sektor manufaktur dan industri hilir untuk memperluas kontribusi terhadap penerimaan pajak dan mengurangi dampak volatilitas harga komoditas. Selain itu, juga perlu dilakukan penguatan kebijakan perpajakan yang mendukung digitalisasi dan ekonomi kreatif sebagai sumber penerimaan pajak baru. 2. Percepatan Proses Rekonsiliasi Pajak: Kanwil Direktorat Jenderal Pajak perlu untuk membentuk tim satuan tugas percepatan rekonsiliasi pajak khususnya di Kota Palembang dan Prabumulih. Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk lebih aktif dalam melakukan koordinasi dan validasi data dengan kantor pajak guna menghindari penundaan transfer DBH yang berdampak pada arus kas daerah. 3. Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Belanja: Kebijakan efisiensi anggaran belanja barang khususnya belanja perjalanan dinas dapat dilanjutkan dan diterapkan di tahun berikutnya dengan harapan dapat dialokasikan pada belanja yang bersifat produktif dan memberikan <i>multiplier effect</i>. Selain itu, diperlukannya percepatan dari satker K/L di Sumsel dalam merealisasikan belanja modal yang terbukti dapat memberikan <i>multiplier effect</i> dengan memastikan proyek strategis nasional (PSN) berjalan sesuai jadwal, mengurangi kendala teknis dalam eksekusi proyek, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam proses persetujuan anggaran. 4. Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Belanja Daerah: Belanja daerah harus diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan dukungan untuk pemilu/pilkada serentak. Pemda perlu mengadopsi prinsip <i>spending better</i> dengan fokus pada efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. Selain itu, porsi belanja modal khususnya yang berdampak jangka panjang seperti jalan, irigasi dan jaringan perlu dialokasikan lebih namun hal tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang sehingga di masa depan dapat dirasakan manfaatnya (ekonomi tumbuh dan PAD meningkat). 5. Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah dan Tata Kelola TKD: Pemerintah daerah dan Kementerian Keuangan perlu untuk meningkatkan kapasitas SDM di tingkat kelurahan dalam pengelolaan anggaran melalui pelatihan teknis, sosialisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, serta pendampingan dalam realisasi DAU Pendanaan Kelurahan. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan dan tata kelola dana desa guna mencegah penyalahgunaan anggaran, dengan memperkuat peran inspektorat daerah dan mekanisme audit internal yang lebih proaktif. 6. Optimalisasi Pendapatan Daerah: Pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, terutama pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Konsumsi (PBJT). Kampanye kesadaran pajak dan inovasi dalam sistem pembayaran

Kesimpulan	Rekomendasi
7. Pendapatan transfer mendominasi pendapatan daerah di pemda Sumsel. Berdasarkan indeks kemandirian fiskal 18 pemda di Sumsel, terdapat 2 Pemda yang berstatus “Menuju Kemandirian” yaitu Provinsi Sumsel dan Kota Palembang. 8. Komposisi belanja daerah masih didominasi oleh belanja yang bersifat operasional. Proporsi belanja modal yang akan meningkatkan perekonomian di masa depan masih dalam porsi yang sedikit.	pajak berbasis teknologi juga perlu diperluas untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. 7. Mendorong Kemandirian Fiskal: Bagi pemda yang masih memiliki indeks kemandirian fiskal rendah, perlu ada strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer. Langkah ini meliputi pengembangan sektor ekonomi lokal, efisiensi belanja, dan pengelolaan aset daerah yang lebih optimal. 8. Kerja Sama Antar Level Pemerintahan: Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mengoptimalkan penyaluran dana transfer, menyelesaikan kendala administratif, dan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai target. 9. Penguatan Kepatuhan Internal pada Pemda. Untuk mendukung percepatan realisasi belanja daerah di akhir tahun anggaran, Pemda dapat menggandeng APIP untuk mengawal proses bisnis pencairan dana APBD. Dengan adanya peran APIP tersebut, pencairan belanja akan semakin terkendali dan sesuai dengan ketentuan.
Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik	
1. Komposisi Belanja K/L RO Harmonis yang mendukung DAK Fisik di wilayah Sumsel hingga akhir Desember 2024 secara umum menunjukkan kinerja yang optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh perkembangan realisasi, baik anggaran maupun capaian output yang tercapai optimal sesuai target. 2. Tantangan pelaksanaan anggaran pada belanja K/L yang mendukung DAK Fisik terutama terkait dengan regulasi yang terlambat, blokir anggaran, dan kendala teknis lainnya. Kendala tersebut menyebabkan realisasi anggaran dan capaian output di beberapa sektor masih rendah pada semester I 2024, meskipun pada akhirnya terlaksana dengan baik hingga akhir tahun 2024.	1. Percepatan Regulasi dan Koordinasi: Pemerintah pusat perlu memastikan regulasi terkait penyaluran DAK Fisik diterbitkan lebih awal agar pemerintah daerah dapat memulai proses pengadaan dan pelaksanaan proyek lebih cepat. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga harus ditingkatkan, khususnya dalam hal pemahaman teknis dan administrasi; 2. Penyelesaian Blokir Anggaran: Segera selesaikan permasalahan blokir anggaran yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan kegiatan. Ini dapat dilakukan dengan mempercepat proses penyusunan dan pengesahan dokumen yang diperlukan; 3. Optimisasi Pengadaan dan Pembangunan Infrastruktur: Perbaiki proses pengadaan dan penyelesaian masalah pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur agar tidak ada lagi keterlambatan yang signifikan. Pendekatan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan bisa menjadi solusi efektif; 4. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi anggaran dan capaian output, dengan fokus pada identifikasi masalah sedini mungkin untuk segera ditangani. Keterlibatan Unit in Charge (UIC) di tiap tahap akan sangat membantu dalam mencapai target yang telah ditetapkan; 5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah: Pemda perlu diberikan pelatihan yang lebih intensif terkait penyusunan dokumen dan proses administrasi yang diperlukan untuk memaksimalkan pemanfaatan DAK Fisik. Ini penting untuk memastikan bahwa mereka mampu memenuhi persyaratan teknis dan administrasi dengan lebih baik.
Reviu Atas Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional di Sumatera Selatan	
1. Dari sisi ketersediaan beras sebagai bahan pangan utama, Sumatera Selatan masih mencatatkan surplus karena produksi beras Sumsel masih melampaui konsumsi masyarakat Sumsel. 2. Kondisi ketahanan pangan Sumatera Selatan masih terjaga dan berdasarkan skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun 2024 berada dalam kategori tahan pangan namun masih terdapat kabupaten yang berstatus agak rentan pangan yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dan terdapat 3 kota yang termasuk dalam peringkat terendah dari 98 kota di seluruh Indonesia. 3. Intervensi pemerintah melalui kebijakan belanja melalui alokasi anggaran ketahanan pangan pada DIPA satker K/L, DAK Fisik dan DAK Non Fisik maupun Dana Desa berdampak pada peningkatan ketahanan pangan di Sumatera Selatan walaupun masih belum optimal dari seluruh aspek yaitu aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan terutama dari aspek pemanfaatan.	1. Walaupun dalam kondisi yang masih surplus dalam produksi beras, namun risiko ketidakpastian termasuk akibat perubahan iklim maupun bencana alam dan ketidakstabilan harga perlu dimitigasi dengan menambah cadangan pangan daerah. 2. Skor IKP berikut seluruh indikatornya perlu dicermati pemerintah daerah sebagai <i>early warning</i> untuk menetapkan intervensi yang tepat dalam mengatasi permasalahan ketahanan pangan yang terjadi di wilayahnya karena dalam perkembangan IKP tahun 2018-2024 terdapat kenaikan maupun penurunan skor IKP pada kabupaten maupun kota di Provinsi Sumatera Selatan yang idealnya seluruhnya dapat berada di kategori tahan pangan mengingat Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu lumbung pangan. 3. Optimalisasi belanja ketahanan pangan perlu dilakukan terutama pada indikator ketahanan pangan dalam penilaian IKP yang secara rata-rata masih di bawah skor rata-rata nasional yaitu antara lain meningkatkan ketersediaan air bersih melalui pembangunan dan perbaikan sarana/prasarana akses air bersih untuk masyarakat, Angka kemiskinan di wilayah rentan pangan juga perlu diturunkan melalui kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan/daya beli misalnya melalui program padat karya.



Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Selatan
Jl. Kapten A. Rival No. 2, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I
Kota Palembang, Sumatera Selatan 30135
Telp. (0711) 356534



djp.b.kemenkeu.go.id/kanwil/sumsel/id/



@KanwilDJPbSumsel



@DJPbSumsel



@KanwilDJPbSumsel

ISSN 3047-0994

